



PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2023

**MALANG
2022**



**NOTA KESEPAKATAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD**

**KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2023**



TAHUN 2022

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MALANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MALANG**

**Nomor : 903/3338/35.73.503/2022
Nomor : 172/36 /35.73.200/2022**

**TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Nama : Drs. H. SUTIAJI
Jabatan : Walikota Malang
Alamat Kantor : Jl. Tugu No. 1 Malang
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Malang

- 2 a. Nama : I MADE RIANDIANA KARTIKA, SE, MM
Jabatan : Ketua DPRD Kota Malang
Alamat Kantor : Jl. Tugu No. 1A Malang

- b. Nama : H. ABDURROCHMAN, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Malang
Alamat Kantor : Jl. Tugu No. 1A Malang

- c. Nama : H. ASMUALIK, ST
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Malang
Alamat Kantor : Jl. Tugu No. 1A Malang

- d. Nama : RIMZAH, S.IP
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Malang
Alamat Kantor : Jl. Tugu No. 1A Malang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disepakati Bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu kesepakatan antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang tentang Kebijakan Umum

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Malang, 4 Agustus 2022

WALIKOTA MALANG



Drs. H. SUTIAJI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MALANG

Ketua



I MADE RIANDIANA KARTIKA, SE, MM

Wakil Ketua

H. ABDURROCHMAN, SH

Wakil Ketua

H. ASMUALIK, ST

Wakil Ketua

RIMZAH, S.IP



**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

**MALANG
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penyusunan PPAS	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS	2
BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH	5
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	10
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	119
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	119
4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	120
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	122
BAB VI PENUTUP	123

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2023.....	8
Tabel 3.1 Sinergitas Kebijakan Pemerintah Kota Malang Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional	11
Tabel 3.2 Sinergitas Kebijakan Pemerintah Kota Malang Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi	42
Tabel 3.3 Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah	65
Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	120
Tabel 5.1 Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023	122

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I** TABEL PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA
- LAMPIRAN II** PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 merupakan tahap lanjutan dari penyusunan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023 sebagaimana ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai proses awal dalam penyusunan dokumen APBD, penyusunan dokumen PPAS merupakan tahapan penting karena secara substansi, dokumen PPAS memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan. Selain itu, PPAS menjadi gambaran umum dari kebutuhan dan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah yang nantinya digunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan fungsi pemberian layanan kepada masyarakat. Struktur pendanaan yang optimal dapat dicapai apabila seluruh komponen pendapatan daerah dan belanja daerah diukur dalam sebuah proyeksi kinerja pemerintah secara menyeluruh. Pencapaian kinerja yang dimaksud adalah pengukuran tingkat output dari satu program dan atau kegiatan. Optimalisasi anggaran juga memerlukan dukungan politik (*political will*) dari pimpinan Perangkat Daerah, yang akan berimplikasi pada produktifitas dan kinerja aparatur pemerintah yang berwibawa, bertanggung jawab, efisien, akuntabel dan transparan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memuat komponen prioritas dan plafon untuk pencapaian kinerja pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dimana komponen prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan klasifikasi fungsi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Format penyusunan PPAS disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat Rencana Pendapatan Daerah, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta rencana Pembiayaan Daerah. Selanjutnya dokumen rancangan PPAS tahun 2023 yang telah tersusun disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran 2023.

1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Memperhatikan kondisi dan kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 bertujuan:

1. Sebagai rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD;
2. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun anggaran 2023 menurut Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, penanggung jawab, indikator dan target kinerja serta plafon indikatif untuk setiap program dan kegiatan.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Penyusunan Prioritas dan Plafon dan Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor);

15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2021 Nomor 5);
16. Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor).

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah terbagi dalam 3 kelompok pendapatan yaitu (1) Pendapatan Asli Daerah (2) Pendapatan Transfer (2) dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan Potensi Daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas Otonomi Daerah. Semakin tinggi kualitas Otonomi Daerah, maka ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin berkurang. Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari pemerintah pusat.

Rencana penerimaan daerah tahun anggaran 2023 yang berasal dari pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp. 2.368.058.031.778, naik sebesar Rp. 291.080.766.934 atau 14,01% jika dibandingkan dengan target tahun anggaran 2022 yang diproyeksikan sebesar Rp. 2.076.977.264.844. Adapun rincian masing-masing jenis pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp. 1.179.181.683.130, bertambah Rp. 426.385.854.521 atau sebesar 56,64% dari target pendapatan asli daerah Tahun Anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp. 752.795.828.609. Rincian penambahan/pengurangan tiap jenis pendapatan asli daerah sebagai berikut.
 - a. Pajak daerah ditargetkan sebesar Rp. 1.000.006.000.000, bertambah 65,02% atau sebesar 394. 006.000.000 jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp.606.000.000.000;
 - b. Retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp. 53.467.985.400, bertambah 1,08% atau sebesar Rp. 569.300.000 jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp. 52.898.685.400;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp. 28.696.022.152, berkurang sebesar Rp. 195.874.307 atau 0,68% jika

- dibandingkan dengan tahun 2022 yang ditargetkan Rp. 28.891.896.459; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah ditargetkan sebesar Rp. 97.011.675.578, bertambah sebesar Rp. 32.006.428.828 atau 49,24% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang ditargetkan sebesar Rp. 65.005.246.750.
2. Pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp. 1.133.063.257.273, berkurang sebesar Rp. 87.801.378.962 atau 7,19% dari target pendapatan tranfer tahun 2022 yang diproyeksi sebesar Rp.1.220.864.636.235. Rincian penambahan/pengurnagan tiap jenis pendapatan transfer sebagai berikut:
- a. Transfer pemerintah pusat ditargetkan sebesar Rp. 1.003.220.973.050, berkurang sebesar Rp.81.085.268.950 atau 7,48% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang ditarget sebesar Rp.1.084.306.242.000. Proyeksi pendapatan transfer pemerintah pusat belum termasuk Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan akan dilakukan penyesuaian setelah terbitnya Rincian Alokasi Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023. Sedangkan rincian proyeksi berdasarkan kelompok pendapatan transfer pemerintah pusat sebagai berikut:
- Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum) dan Dana Alokasi Khusus diproyeksikan sebesar Rp. 972.132.058.050, berkurang Rp.81.085.268.950 atau 7,7% dibandingkan dengan tahun 2022 yang diproyeksi sebesar Rp. 1.053.217.327.000;
 - Dana Insentif Daerah diproyeksi sama dengan tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 31.088.915.000.
- b. Transfer antar daerah ditargetkan sebesar Rp. 129.842.284.223, berkurang sebesar Rp. 6.716.110.012 atau 4,92% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang ditarget sebesar Rp. 136.558.394.235. Sedangkan rincian proyeksi berdasarkan kelompok pendapatan transfer antar daerah sebagai berikut:
- Dana Bagi Hasil diproyeksikan sebesar Rp. 127.606.090.223, berkurang Rp. 6.716.110.012 atau 5% dibandingkan dengan tahun 2022 yang diproyeksi sebesar Rp. 134.322.200.235;
 - Bantuan Keuangan diproyeksi sama dengan tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 2.236.194.000.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp. 81.309.091.375, berkurang sebesar Rp.22.007.708.625 atau berkurang 21,30% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang ditargetkan sebesar

Rp.103.316.800.000. Adapun rincian proyeksi berdasarkan kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai berikut:

- Pendapatan hibah tahun 2023 diproyeksi sebesar Rp. 7.500.000.000 yang merupakan Program Hibah Air Minum dalam APBN Tahun Anggaran 2023 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan diproyeksikan sebesar Rp. 73.809.091.375, berkurang sebesar Rp.29.507.708.625 atau 28,56% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang diproyeksi sebesar Rp. 103.316.800.000. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan merupakan pendapatan Hibah Dana BOS untuk sekolah negeri dan swasta dimana pada tahun 2023 hanya diproyeksi pendapatan Hibah dana BOS untuk sekolah negeri, sedangkan Hibah Dana BOS untuk sekolah akan dilakukan penyesuaian setelah terbitnya Rincian Alokasi Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan rencana penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan pembiayaan daerah dapat bersumber dari dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Penerimaan pembiayaan daerah tahun anggaran diproyeksikan sebesar Rp. 196.250.000.000 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Rincian proyeksi penerimaan daerah tahun anggaran 2023 sebagaimana Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Penerimaan Daerah	Proyeksi Pendapatan	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	PENDAPATAN DAERAH		
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.179.181.683.130	
4.1.01	Pajak Daerah	1.000.006.000.000	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ❖ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
4.1.02	Retribusi Daerah	53.467.985.400	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ❖ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum ❖ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha ❖ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Tertentu
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	28.696.022.152	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. ❖ Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	97.011.675.578	-
4.2	Pendapatan Transfer	1.133.063.257.273	
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.003.220.973.050	-
4.2.01.01	Dana Perimbangan	972.132.058.050	-
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	31.088.915.000	-
4.2.02	Transfer Antar Daerah	129.842.284.223	-
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	127.606.090.223	-
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	2.236.194.000	-
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	81.309.091.375	
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.500.000.000	-

4.3.02	Dana Darurat	0,00	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	73.809.091.375	❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.368.058.031.778	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
6.1.01	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	196.250.000.000	-
			-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	196.250.000.000	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	2.564.308.031.778	

Sumber : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Rencana Pembangunan Kota Malang pada tahun 2023 mengusung tema “*Pemantapan Industri Kreatif Melalui Transformasi Digital dengan Dukungan Infrastruktur yang Terintegrasi*”, dengan fokus pada pemantapan perekonomian, pengembangan industri kreatif, pelayanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, transformasi digital, dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi. Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah Kota Malang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kota Malang. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Jawa Timur guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah.

Prioritas pembangunan Pemerintah Kota Malang pada Tahun 2023 merupakan prioritas pembangunan tahun terakhir RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas Belanja Kota Malang yang tertuang dalam Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 memuat:

1. Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional;
2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi;
3. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah.

Selanjutnya prioritas pembangunan daerah terinci dalam program dan kegiatan perangkat daerah beserta kebutuhan anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Adapun rincian Sinergitas Kebijakan Pemerintah Kota Malang terhadap Prioritas Pembangunan Nasional, sinergitas terhadap prioritas pembangunan pemerintah provinsi dan Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah sebagaimana Tabel 3.1, Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.1 Sinergitas Kebijakan Pemerintah Kota Malang Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
1.	MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peserta pelatihan ketrampilan kerja	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
			Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rasio Konsumsi Pangan Lokal Non Beras Terhadap Beras	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase PSAT yang layak konsumsi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase penilaian kesehatan koperasi	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang dididik dan dilatih	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase WUB Mikro yang diberdayakan	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi penanaman modal	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi penanaman modal	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah minat investor	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah minat investor	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penambahan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang memenuhi persyaratan dan standard	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase destinasi wisata yang dibina	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Persentase Destinasi Wisata Yang Dibina	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Persentase Industri Pariwisata Yang Dibina	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pemasaran Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif pada 7 subsektor yang mendapat pembekalan sertifikasi HKI	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pengembangan ekonomi kreatif	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Persentase pengembangan ekonomi kreatif	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian dalam kondisi baik / Jumlah Prasarana Pertanian Keseluruhan X 100%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kenaikan Skor Kelompok Tani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase penetapan pasar rakyat yang ber SNI	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase jumlah alat UTTP yang di tera dan terra ulang	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2.	MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	-	-	-

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
3.	MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			prosentase dokumen perencanaan, keuangan, pelaporan yang tepat waktu	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Prosentase dokumen perencanaan keuangan, pelaporan yang tepat waktu	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			APK Sekolah Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			APK Sekolah Menengah Pertama	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			APM PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			APM Sekolah Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			APM Sekolah Menengah Pertama	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Capaian Peningkatan rata rata karakter siswa PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Capaian peningkatan rata rata karakter siswa PAUD PNF	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Capaian Peningkatan Rata Rata Karakter siswa PAUD PNF	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Capaian Peningkatan Rata Rata Karakter siswa SD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Capaian Peningkatan Rata Rata Karakter siswa SMP	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			SD NEGERI ARJOWINANGUN 01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			SD NEGERI BAKALAN KRAJAN 01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Presentase guru dengan nilai Uji kompetensi guru (UKG) minimal 75	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			presentase guru tersertifikasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Presentase profesionalitas dan keahlian teknis tenaga pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BOR (Bed Occupancy Rate) RSUD	DINAS KESEHATAN
			Persentase puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Penduduk yang Terjamin Asuransi Kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Penduduk yang Terjamin Asuransi Kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	NDR (Net Death Ret)	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	NDR (Net Death Ret)	DINAS KESEHATAN

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase balita stunting	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase balita stunting	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase gedung puskesmas dan puskesmas pembantu yang direhab	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase gedung puskesmas dan puskesmas pembantu yang direhab	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kelurahan UCI	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kelurahan UCI	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan alat kesehatan dan obat-obatan sesuai standar	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan alat kesehatan dan obat-obatan sesuai standar	DINAS KESEHATAN
			Persentase unit pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Unit Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi SPM	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Unit Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi SPM	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Medis yang berkompeten	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Medis yang berkompeten	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	persentase sarana kefarmasian dan industri rumah tangga yang dibina diawasi dan memenuhi syarat	DINAS KESEHATAN

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	persentase sarana kefarmasian dan industri rumah tangga yang dibina diawasi dan memenuhi syarat	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persentase UKBM yang dibina	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persentase UKBM yang dibina	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Dinas Sosial P3AP2KB
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Dan Perlindungan Jaminan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhannya Serta Meningkatkan Kemampuan Fungsi Sosialnya	Dinas Sosial P3AP2KB
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	Dinas Sosial P3AP2KB
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	Dinas Sosial P3AP2KB
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Terpelihara Dengan Baik	Dinas Sosial P3AP2KB
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peserta pelatihan ketrampilan kerja	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
			Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif	Dinas Sosial P3AP2KB
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Dinas Sosial P3AP2KB
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Ibu Rumah Tangga yang mendapatkan peningkatan kualitas keluarga	Dinas Sosial P3AP2KB
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat daerah yang menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG)	Dinas Sosial P3AP2KB
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Dinas Sosial P3AP2KB
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR per WUS (15 s/d 49 tahun)	Dinas Sosial P3AP2KB
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan peserta KB Aktif	Dinas Sosial P3AP2KB
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok UPPKS Aktif	Dinas Sosial P3AP2KB
			Persentase keluarga kelompok kegiatan Tribina aktif	Dinas Sosial P3AP2KB
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase cabor berprestasi	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Cabor Berprestasi	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pertumbuhan anggota pramuka di Kota Malang	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pertumbuhan anggota pramuka di Kota Malang	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase cakupan wilayah operasional perpustakaan keliling di 57 kelurahan	Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
			Persentase peningkatan koleksi yang terdigitalisasi	Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Kecamatan Klojen
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Kecamatan Klojen
			Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	Kecamatan Klojen
			Persentase usulan masyarakat untuk sarana dan prasarana di wilayah yang diakomodir	Kecamatan Klojen
			IKM Pelayanan Perangkat Daerah	Kecamatan Blimbing
			persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kecamatan Blimbing
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kecamatan Blimbing
			persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kewilayahan	Kecamatan Blimbing
			Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kewilayahan	Kecamatan Blimbing
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kecamatan Kedungkandang
			"Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan"	Kecamatan Kedungkandang

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
			"Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir"	Kecamatan Kedungkandang
			0Prosentase Lembaga Kemasyarakatan dan Ormas di Wilayah Kec dan Kel yang aktif	Kecamatan Lowokwaru
			Indeks Pembangunan Masyarakat (IP Mas) Kecamatan	Kecamatan Lowokwaru
			Prosentase Lembaga Kemasyarakatan dan Ormas di Wilayah Kec dan Kel yang aktif	Kecamatan Lowokwaru
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kecamatan Sukun
			Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kewilayahan	Kecamatan Sukun
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	Kecamatan Klojen
			Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Kecamatan Klojen
			persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Kecamatan Blimbing
			Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Kecamatan Blimbing
			Prosentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Kecamatan Kedungkandang
			Rasio Linmas per RT	Kecamatan Kedungkandang
			Indeks Pembangunan Masyarakat (IP Mas) Kecamatan	Kecamatan Lowokwaru
			Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Kecamatan Lowokwaru
				Kecamatan Sukun
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kecamatan Klojen

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
			yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	
			cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	Kecamatan Blimbing
			Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	Kecamatan Kedungkandang
			Indeks Pembangunan Masyarakat (IP Mas) Kecamatan	Kecamatan Lowokwaru
			Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	Kecamatan Sukun
4.	REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	presentase kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dibina	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	presentase peningkatan lembaga kesenian tradisional yang aktif	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	presentase peningkatan pelaku sejarah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	presentase cagar budaya yang dilestarikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	presentase peningkatan pengunjung museum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
			pelaporan yang disusun tepat waktu	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase ketersediaan debit air melalui penyediaan bangunan penampung	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase ketersediaan debit air melalui penyediaan bangunan penampung	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tinggal berakses air bersih	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tinggal berakses air bersih	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Kota Dalam Kondisi Baik	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Kota Dalam Kondisi Baik	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan infrastruktur permukiman	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan infrastruktur permukiman	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Gedung Milik Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Gedung Milik Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Pembangunan Kawasan Pioritas Sesuai RTBL	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Pembangunan Kawasan Pioritas Sesuai RTBL	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase fasilitas penerangan jalan	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase fasilitas penerangan jalan	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan yang memiliki jalur pejalan kaki	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan yang memiliki jalur pejalan kaki	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jembatan kota dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jembatan kota dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
			---	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Pemanfaatan SIPR Dalam Pemanfaatan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Pemanfaatan SIPR Dalam Pemanfaatan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan area kawasan kumuh	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan area kawasan kumuh	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan PSU	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan PSU	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase kelurahan yang sudah terinventarisir tanah kosong dalam data base	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu.	Dinas Perhubungan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penurunan prosentase angka kemacetan	Dinas Perhubungan
			Penurunan prosentase angka kemacetan	Dinas Perhubungan
6.	MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Risiko Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Risiko Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rata-rata waktu tanggap (respon time) bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rata-rata waktu tanggap (respon time) bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
			yang Tersusun dan Sesuai Standart	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas RTH Publik yang dikelola	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas RTH Publik yang dikelola	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	persentase pelaku usaha yang sudah melakukan pengelolaan limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Masyarakat dan Kegiatan/Usaha Pemilik Izin Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Masyarakat dan Kegiatan/Usaha Pemilik Izin Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Komunitas Berbudaya Lingkungan di Kota Malang	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bernilai baik	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan yang terselesaikan	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase Pengurangan Sampah yang berkurang di masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
			dan Sektor Informal (Merupakan nilai kumulatif)	
7.	MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BOR (Bed Occupancy Rate) RSUD	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	DINAS KESEHATAN
			Persentase puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
			pelaporan yang disusun tepat waktu	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
			Persentase barang milik daerah yang terpelihara	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan, pelaporan yang di kirim tepat waktu	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Nilai survey kepuasan internal	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Patroli siaga, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat dalam sehari	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Persentase penanganan pelanggaran Perda	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Rasio Poskamling per RW	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Risiko Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen	Dinas Sosial P3AP2KB

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
			Persentase dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	Dinas Sosial P3AP2KB
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
			Nilai Survey Kepuasan Internal	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Nilai Survey Kepuasan Internal	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan yang disusun tepat waktu	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
			Nilai Survey Kepuasan Internal	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase penduduk yang telah tertib administrasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase data hasil pelayanan selama 1 tahun	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Dinas Perhubungan
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Dinas Perhubungan
			Nilai survei kepuasan masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Dinas Komunikasi dan Informatika
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah/Pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi informasi yang terintegrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Survey Kepuasan Internal	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
			Persentase dokumen perencanaan , keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
			Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
			---	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Ijin Dan Non Ijin Pekerjaan Umum	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Ijin Dan Non Ijin Pekerjaan Umum	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Ijin dan Non Izin Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Ijin dan Non Izin Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Target Retribusi IMB	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Target Retribusi IMB	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	persentase ketaatan pelaku usaha wajib LKPM	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	persentase ketaatan pelaku usaha wajib LKPM	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase sistem informasi yang dapat diakses masyarakat	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase sistem informasi yang dapat diakses masyarakat	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
			persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Nilai survey kepuasan internal	Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
			Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase dokumen arsip yang wajib terkelola sesuai kaidah kearsipan	Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan penyelamatan arsip	Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Survei Internal Organisasi	Sekretariat Daerah
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat Daerah
			Nilai survey kepuasan internal	Sekretariat Daerah
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Sekretariat Daerah
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Tata Pemerintahan	Sekretariat Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Sekretariat Daerah
			Presentase Pengembangan Kebijakan Hukum yang Ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	jumlah dokumen	Sekretariat Daerah

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
			Peresentase kebijakan bidang perekonomian, infrastruktur dan SDA yang ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah
			Persentase Kebijakan bidang Pisdas yang ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah
			Persentase paket selesai tender	Sekretariat Daerah
			Presentase kebijakan bidang Perekonomian, Infrastruktur dan SDA yang ditindak lanjuti	Sekretariat Daerah
			Presentase Kebijakan bidang Pisdas yang ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survei kepuasan internal	Sekretariat DPRD
			persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Sekretariat DPRD
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pelaksanaan pembahasan ranperda	Sekretariat DPRD
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian program dan kegiatan pada RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah yang seuai dengan tahapan dan tata cara	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang sesuai dengan tahapan dan tata cara.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai dengan tahapan dan tata cara.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Badan Keuangan dan Aset Daerah

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			---	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kepuasan Internal	Badan Pendapatan Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kepuasan Internal	Badan Pendapatan Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Badan Pendapatan Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Badan Pendapatan Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Badan Pendapatan Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Badan Pendapatan Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Badan Pendapatan Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Badan Pendapatan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	Badan Keuangan dan Aset Daerah

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	Badan Pendapatan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	Badan Pendapatan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase penurunan piutang pajak daerah	Badan Pendapatan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase penurunan piutang pajak daerah	Badan Pendapatan Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	BKPSDM
			persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	BKPSDM
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	BKPSDM
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	BKPSDM
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang memperoleh nilai kinerja dibawah standar	BKPSDM
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang memperoleh nilai kinerja dibawah standar	BKPSDM
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelanggaran disiplin ASN yang telah ditindaklanjuti	BKPSDM
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelanggaran disiplin ASN yang telah ditindaklanjuti	BKPSDM
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemangku jabatan fungsional tertentu	BKPSDM
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemangku jabatan fungsional tertentu	BKPSDM

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase terisinya jab struktural dan pelaksana	BKPSDM
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase terisinya jab struktural dan pelaksana	BKPSDM
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	BKPSDM
			Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	BKPSDM
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase Jumlah Kajian/ Analisa/ Studi / Rencana Induk/ Grand Design Sektor Ekonomi Dan Sumberdaya Alam Yang Mendukung Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase Jumlah Kajian/ Analisa/ Studi / Rencana Induk/ Grand Design Sektor Infrastruktur Dan Kewilayahan Yang Mendukung Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase Jumlah Kajian/ Analisa/ Studi / Rencana Induk/ Grand Design Sektor Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Yang Ditindaklanjuti	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan PD tersusun tepat waktu	Inspektorat Daerah
			Nilai survei kepuasan internal	Kecamatan Klojen
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktuperangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	Kecamatan Klojen
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kecamatan Klojen

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
			Nilai survey kepuasan internal	Kecamatan Blimbing
			persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Kecamatan Blimbing
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Kecamatan Blimbing
			persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kecamatan Blimbing
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kecamatan Blimbing
			---	Kecamatan Blimbing
			IKM Perangkat daerah	Kecamatan Kedungkandang
			Nilai SAKIP	Kecamatan Lowokwaru
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kecamatan Lowokwaru
			Nilai survey kepuasan internal	Kecamatan Sukun
			persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Kecamatan Sukun
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Kecamatan Sukun
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kecamatan Sukun
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM pelayanan	Kecamatan Klojen
			IKM Pelayanan Perangkat Daerah	Kecamatan Blimbing
			IKM Perangkat daerah	Kecamatan Kedungkandang
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Lowokwaru
			Nilai SAKIP	Kecamatan Lowokwaru
			IKM Pelayanan Perangkat Daerah	Kecamatan Sukun
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survei kepuasan internal	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			persentase dokumen perencanaan, keuangan dan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
			pelaporan yang disusun tepat waktu	
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase peran serta ormas dalam pembangunan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan kondisi Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan dan Keamanan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 3.2 Sinergitas Program Pemerintah Kota Malang Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
1.	PEMULIHAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PENINGKATAN NILAI TAMBAH SEKTOR SEKUNDER DAN PARIWISATA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peserta pelatihan ketrampilan kerja	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
			Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rasio Konsumsi Pangan Lokal Non Beras Terhadap Beras	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase PSAT yang layak konsumsi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase penilaian kesehatan koperasi	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang dididik dan dilatih	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase WUB Mikro yang diberdayakan	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi penanaman modal	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi penanaman modal	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah minat investor	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah minat investor	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penambahan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang memenuhi persyaratan dan standard	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase destinasi wisata yang dibina	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Persentase Destinasi Wisata Yang Dibina	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Persentase Industri Pariwisata Yang Dibina	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pemasaran Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif pada 7 subsektor yang mendapat pembekalan sertifikasi HKI	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pengembangan ekonomi kreatif	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Persentase pengembangan ekonomi kreatif	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian dalam kondisi baik / Jumlah Prasarana Pertanian Keseluruhan X 100%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kenaikan Skor Kelompok Tani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase penetapan pasar rakyat yang ber SNI	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase jumlah alat UTTP yang di tera dan terra ulang	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2.	-	-	-	-

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
3.	PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, KESEHATAN, PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING KETENAGAKERJAAN, SERTA PENGENTASAN KEMISKINIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			prosentase dokumen perencanaan, keuangan, pelaporan yang tepat waktu	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Prosentase dokumen perencanaan keuangan, pelaporan yang tepat waktu	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			APK Sekolah Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			APK Sekolah Menengah Pertama	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			APM PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			APM Sekolah Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			APM Sekolah Menengah Pertama	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Capaian Peningkatan rata rata karakter siswa PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Capaian peningkatan rata rata karakter siswa PAUD PNF	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Capaian Peningkatan Rata Rata Karakter siswa PAUD PNF	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Capaian Peningkatan Rata Rata Karakter siswa SD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Capaian Peningkatan Rata Rata Karakter siswa SMP	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			SD NEGERI ARJOWINANGUN 01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
			SD NEGERI BAKALAN KRAJAN 01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Presentase guru dengan nilai Uji kompetensi guru (UKG) minimal 75	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			presentase guru tersertifikasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Presentase profesionalitas dan keahlian teknis tenaga pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BOR (Bed Occupancy Rate) RSUD	DINAS KESEHATAN
			Persentase puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Penduduk yang Terjamin Asuransi Kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Penduduk yang Terjamin Asuransi Kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	NDR (Net Death Ret)	DINAS KESEHATAN

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	NDR (Net Death Ret)	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase balita stunting	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase balita stunting	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase gedung puskesmas dan puskesmas pembantu yang direhab	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase gedung puskesmas dan puskesmas pembantu yang direhab	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kelurahan UCI	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kelurahan UCI	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan alat kesehatan dan obat-obatan sesuai standar	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan alat kesehatan dan obat-obatan sesuai standar	DINAS KESEHATAN
			Persentase unit pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Unit Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi SPM	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Unit Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi SPM	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Medis yang berkompeten	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Medis yang berkompeten	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	persentase sarana kefarmasian dan industri rumah tangga yang	DINAS KESEHATAN

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
			dibina diawasi dan memenuhi syarat	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	persentase sarana kefarmasian dan industri rumah tangga yang dibina diawasi dan memenuhi syarat	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persentase UKBM yang dibina	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persentase UKBM yang dibina	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Dinas Sosial P3AP2KB
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Dan Perlindungan Jaminan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhannya Serta Meningkatkan Kemampuan Fungsi Sosialnya	Dinas Sosial P3AP2KB
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	Dinas Sosial P3AP2KB
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	Dinas Sosial P3AP2KB
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Terpelihara Dengan Baik	Dinas Sosial P3AP2KB
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peserta pelatihan ketrampilan kerja	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
			Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif	Dinas Sosial P3AP2KB
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Dinas Sosial P3AP2KB
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Ibu Rumah Tangga yang mendapatkan peningkatan kualitas keluarga	Dinas Sosial P3AP2KB
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat daerah yang menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG)	Dinas Sosial P3AP2KB
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Dinas Sosial P3AP2KB
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR per WUS (15 s/d 49 tahun)	Dinas Sosial P3AP2KB
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan peserta KB Aktif	Dinas Sosial P3AP2KB
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok UPPKS Aktif	Dinas Sosial P3AP2KB
			Persentase keluarga kelompok kegiatan Tribina aktif	Dinas Sosial P3AP2KB
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda Kota malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase cabor berprestasi	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Cabor Berprestasi	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pertumbuhan anggota pramuka di Kota Malang	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pertumbuhan anggota pramuka di Kota Malang	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase cakupan wilayah operasional perpustakaan keliling di 57 kelurahan	Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
			Persentase peningkatan koleksi yang terdigitalisasi	Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Kecamatan Klojen
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Kecamatan Klojen
			Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	Kecamatan Klojen
			Persentase usulan masyarakat untuk sarana dan prasarana di wilayah yang diakomodir	Kecamatan Klojen
			IKM Pelayanan Perangkat Daerah	Kecamatan Blimbing
			persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kecamatan Blimbing
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kecamatan Blimbing
			persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kewilayahan	Kecamatan Blimbing
			Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kewilayahan	Kecamatan Blimbing
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kecamatan Kedungkandang

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
			"Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan"	Kecamatan Kedungkandang
			"Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir"	Kecamatan Kedungkandang
			0Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Ormas di Wilayah Kec dan Kel yang aktif	Kecamatan Lowokwaru
			Indeks Pembangunan Masyarakat (IP Mas) Kecamatan	Kecamatan Lowokwaru
			Prosentase Lembaga Kemasyarakatan dan Ormas di Wilayah Kec dan Kel yang aktif	Kecamatan Lowokwaru
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kecamatan Sukun
			Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kewilayahan	Kecamatan Sukun
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	Kecamatan Klojen
			Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Kecamatan Klojen
			persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Kecamatan Blimbing
			Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Kecamatan Blimbing
			Prosentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Kecamatan Kedungkandang
			Rasio Linmas per RT	Kecamatan Kedungkandang
			Indeks Pembangunan Masyarakat (IP Mas) Kecamatan	Kecamatan Lowokwaru
			Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Kecamatan Lowokwaru

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
				Kecamatan Sukun
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	Kecamatan Klojen
			cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	Kecamatan Blimbing
			Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	Kecamatan Kedungkandang
			Indeks Pembangunan Masyarakat (IP Mas) Kecamatan	Kecamatan Lowokwaru
			Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	Kecamatan Sukun
4.	PENINGKATAN KEPEDULIAN SOSIAL DAN PELESTARIAN NILAI-NILAI BUDAYA LOKAL	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	presentase kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dibina	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	presentase peningkatan lembaga kesenian tradisional yang aktif	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	presentase peningkatan pelaku sejarah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	presentase cagar budaya yang dilestarikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	presentase peningkatan pengunjung museum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	PENGUATAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH DALAM UPAYA PEMERATAAN HASIL PEMBANGUNAN SERTA PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
			pelaporan yang disusun tepat waktu	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase ketersediaan debit air melalui penyediaan bangunan penampung	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase ketersediaan debit air melalui penyediaan bangunan penampung	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tinggal berakses air bersih	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tinggal berakses air bersih	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Kota Dalam Kondisi Baik	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Kota Dalam Kondisi Baik	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan infrastruktur permukiman	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan infrastruktur permukiman	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Gedung Milik Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Gedung Milik Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Pembangunan Kawasan Prioritas Sesuai RTBL	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Pembangunan Kawasan Prioritas Sesuai RTBL	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase fasilitas penerangan jalan	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase fasilitas penerangan jalan	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan yang memiliki jalur pejalan kaki	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan yang memiliki jalur pejalan kaki	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jembatan kota dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jembatan kota dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
			---	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Pemanfaatan SIPR Dalam Pemanfaatan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Pemanfaatan SIPR Dalam Pemanfaatan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan area kawasan kumuh	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan area kawasan kumuh	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan PSU	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan PSU	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase kelurahan yang sudah terinventarisir tanah kosong dalam data base	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu.	Dinas Perhubungan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penurunan prosentase angka kemacetan	Dinas Perhubungan
			Penurunan prosentase angka kemacetan	Dinas Perhubungan
6.	PENINGKATAN KETAHANAN BENCANA DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Risiko Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Risiko Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rata-rata waktu tanggap (responstime) bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rata-rata waktu tanggap (respon time) bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun dan Sesuai Standart	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas RTH Publik yang dikelola	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas RTH Publik yang dikelola	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	persentase pelaku usaha yang sudah melakukan pengelolaan limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Masyarakat dan Kegiatan/Usaha Pemilik Izin Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Masyarakat dan Kegiatan/Usaha Pemilik Izin Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Komunitas Berbudaya Lingkungan di Kota Malang	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bernilai baik	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan yang terselesaikan	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase Pengurangan Sampah yang berkurang di masyarakat dan Sektor Informal (Merupakan nilai kumulatif)	Dinas Lingkungan Hidup
7.	PENINGKATAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI MASYARAKAT DI JAWA TIMUR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BOR (Bed Occupancy Rate) RSUD	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	DINAS KESEHATAN
			Persentase puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum PRPKP
			Persentase barang milik daerah yang terpelihara	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan, pelaporan yang di kirim tepat waktu	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Nilai survey kepuasan internal	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Patroli siaga, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat dalam sehari	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Persentase penanganan pelanggaran Perda	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Rasio Poskamling per RW	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Risiko Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen	Dinas Sosial P3AP2KB
			Persentase dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	Dinas Sosial P3AP2KB
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
			Nilai Survey Kepuasan Internal	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Nilai Survey Kepuasan Internal	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
			Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan yang disusun tepat waktu	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Dinas Lingkungan Hidup
			Nilai Survey Kepuasan Internal	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase penduduk yang telah tertib administrasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase data hasil pelayanan selama 1 tahun	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Dinas Perhubungan
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Dinas Perhubungan
			Nilai survei kepuasan masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Dinas Komunikasi dan Informatika
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
			informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah/Pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota	
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi informasi yang terintegrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Survey Kepuasan Internal	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
			Persentase dokumen perencanaan , keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
			Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
			---	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Ijin Dan Non Ijin Pekerjaan Umum	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Ijin Dan Non Ijin Pekerjaan Umum	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Ijin dan Non Ijin Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Ijin dan Non Ijin Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Target Retribusi IMB	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Target Retribusi IMB	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	persentase ketaatan pelaku usaha wajib LKPM	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	persentase ketaatan pelaku usaha wajib LKPM	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase sistem informasi yang dapat diakses masyarakat	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase sistem informasi yang dapat diakses masyarakat	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Nilai survey kepuasan internal	Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
			Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase dokumen arsip yang wajib terkelola sesuai kaidah kearsipan	Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan penyelamatan arsip	Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Survei Internal Organisasi	Sekretariat Daerah
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat Daerah
			Nilai survey kepuasan internal	Sekretariat Daerah
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Sekretariat Daerah
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Tata Pemerintahan	Sekretariat Daerah

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Sekretariat Daerah
			Presentase Pengembangan Kebijakan Hukum yang Ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	jumlah dokumen	Sekretariat Daerah
			Peresentase kebijakan bidang perekonomian, infrastruktur dan SDA yang ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah
			Persentase Kebijakan bidang Pisdas yang ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah
			Persentase paket selesai tender	Sekretariat Daerah
			Presentase kebijakan bidang Perekonomian, Infrastruktur dan SDA yang ditindak lanjuti	Sekretariat Daerah
			Presentase Kebijakan bidang Pisdas yang ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survei kepuasan internal	Sekretariat DPRD
			persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Sekretariat DPRD
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pelaksanaan pembahasan ranperda	Sekretariat DPRD
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian program dan kegiatan pada RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah yang sesuai dengan tahapan dan tata cara	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang sesuai dengan tahapan dan tata cara.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai dengan tahapan dan tata cara.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Badan Keuangan dan Aset Daerah

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			---	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kepuasan Internal	Badan Pendapatan Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kepuasan Internal	Badan Pendapatan Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Badan Pendapatan Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Badan Pendapatan Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Badan Pendapatan Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Badan Pendapatan Daerah

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Badan Pendapatan Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Badan Pendapatan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	Badan Pendapatan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	Badan Pendapatan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase penurunan piutang pajak daerah	Badan Pendapatan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase penurunan piutang pajak daerah	Badan Pendapatan Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	BKPSDM
			persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	BKPSDM
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	BKPSDM
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	BKPSDM
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang memperoleh nilai kinerja dibawah standar	BKPSDM

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang memperoleh nilai kinerja dibawah standar	BKPSDM
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelanggaran disiplin ASN yang telah ditindaklanjuti	BKPSDM
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelanggaran disiplin ASN yang telah ditindaklanjuti	BKPSDM
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemangku jabatan fungsional tertentu	BKPSDM
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemangku jabatan fungsional tertentu	BKPSDM
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase terisinya jab struktural dan pelaksana	BKPSDM
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase terisinya jab struktural dan pelaksana	BKPSDM
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	BKPSDM
			Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	BKPSDM
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase Jumlah Kajian/ Analisa/ Studi / Rencana Induk/ Grand Design Sektor Ekonomi Dan Sumberdaya Alam Yang Mendukung Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase Jumlah Kajian/ Analisa/ Studi / Rencana Induk/ Grand Design Sektor Infrastruktur Dan Kewilayahan Yang Mendukung Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase Jumlah Kajian/ Analisa/ Studi / Rencana Induk/ Grand Design Sektor Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Yang Ditindaklanjuti	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan PD tersusun tepat waktu	Inspektorat Daerah
			Nilai survei kepuasan internal	Kecamatan Klojen
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktuperangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	Kecamatan Klojen
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kecamatan Klojen
			Nilai survey kepuasan internal	Kecamatan Blimbing
			persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Kecamatan Blimbing
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Kecamatan Blimbing
			persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kecamatan Blimbing
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kecamatan Blimbing
			---	Kecamatan Blimbing
			IKM Perangkat daerah	Kecamatan Kedungkandang
			Nilai SAKIP	Kecamatan Lowokwaru
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kecamatan Lowokwaru
			Nilai survey kepuasan internal	Kecamatan Sukun
			persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Kecamatan Sukun
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Kecamatan Sukun
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kecamatan Sukun

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM pelayanan	Kecamatan Klojen
			IKM Pelayanan Perangkat Daerah	Kecamatan Blimbing
			IKM Perangkat daerah	Kecamatan Kedungkandang
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Lowokwaru
			Nilai SAKIP	Kecamatan Lowokwaru
			IKM Pelayanan Perangkat Daerah	Kecamatan Sukun
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survei kepuasan internal	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase peran serta ormas dalam pembangunan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan kondisi Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan dan Keamanan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 3.3 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah

NO	PRIORITAS PROV/KAB/KOTA	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (RP)	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1			Mendorong aktivitas industri kreatif dan pengembangan pariwisata untuk pembangunan ekonomi kreatif					
			Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial					
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
			Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan					
					Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	104.420.000		
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
			Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak					
					Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	493.700.200		
			Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kreatif					
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
			Persentase realisasi penanaman modal					
					Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.990.000		
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
			Persentase peningkatan jumlah minat investor					
					Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	548.990.000		

NO	PRIORITAS PROV/KAB/KOTA	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (RP)	KETERANGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8		
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						
				Persentase Destinasi Wisata Yang Dibina					
					Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	360.000.000			
				Persentase Industri Pariwisata Yang Dibina					
					Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	60.000.000			
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						
				Persentase Pemasaran Pariwisata					
					Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	102.632.001			
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						
				Persentase pengembangan ekonomi kreatif					
					Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3.943.305.000			

			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						
				Rasio Konsumsi Pangan Lokal Non Beras Terhadap Beras					
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	50.000.000			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Nilai Survey Kepuasan Internal					
					Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	445.327.761			

NO	PRIORITAS PROV/KAB/KOTA	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik			
					Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	114.730.000	
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
				Persentase Koperasi Aktif			
					Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	147.292.850	
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				
				Persentase penilaian kesehatan koperasi			
					Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	200.450.000	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
				Persentase SDM Koperasi yang dididik dan dilatih			
					Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	95.685.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				
				Persentase koperasi yang diberdayakan dan dilindungi			
					Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	1.010.267.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
				Persentase WUB Mikro yang diberdayakan			

NO	PRIORITAS PROV/KAB/K OTA	SASARAN PRIORITA S	PROGRA M	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (RP)	KE TE RA	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	4.809.836.051		
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
			Persentase Pertumbuhan Unit UsahaMikro yang naik menjadi Usaha Kecil					
					Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	388.051.200		
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
			Persentase destinasi wisata yang dibina					
					Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3.264.839.000		
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
			Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif pada 7 subsektor yang mendapat pembekalan sertifikasi HKI					
					Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	97.210.000		
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
			Persentase pengembangan ekonomi kreatif					
					Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	75.000.000		
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
			Persentase penetapan pasar rakyat yang ber SNI					
					Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	14.387.001.504		
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan atau fasilitasi pengembangan ekspor			
					Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	54.838.800	
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
				Persentase Peningkatan Jumlah IKM			
					Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	14.769.713.289	
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				
				Persentase izin usaha industri yang diawasi			
					Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	39.900.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				
				Persentase informasi industri yang lengkap dan terkini			
					Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	100.000.000	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
				Persentase kebijakan bidang perekonomian, infrastruktur dan SDA yang ditindaklanjuti			
					Sekretariat Daerah	714.822.300	
2	Peningkatan Kualitas SDM yang terdidik, berkarakter, sehat, berdaya saing dan sejahtera						
		Meningkatnya kualitas layanan kesehatan					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					DINAS KESEHATAN	30.511.675.577		
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Angka Kematian Bayi				
					DINAS KESEHATAN	135.104.477.452		
				Angka Kematian Ibu				
					DINAS KESEHATAN	135.104.477.452		
				Cakupan Penduduk yang Terjamin Asuransi Kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat				
					DINAS KESEHATAN	135.104.477.452		
				NDR (Net Death Ret)				
					DINAS KESEHATAN	147.676.404.352		
				Persentase balita stunting				
					DINAS KESEHATAN	135.104.477.452		
				Persentase gedung puskesmas dan puskesmas pembantu yang direhab				
					DINAS KESEHATAN	135.104.477.452		
				Persentase Kelurahan UCI				
					DINAS KESEHATAN	135.104.477.452		
				Persentase ketersediaan alat kesehatan dan obat-obatan sesuai standar				
					DINAS KESEHATAN	151.851.580.152		
				Presentase Unit Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi SPM				
					DINAS KESEHATAN	137.989.217.452		
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
				Persentase Tenaga Medis yang berkompeten				
					DINAS KESEHATAN	1.219.390.000		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
				persentase sarana kefarmasian dan industri rumah tangga yang dibina diawasi dan memenuhi syarat				
					DINAS KESEHATAN	223.250.000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
				persentase UKBM yang dibina				
					DINAS KESEHATAN	8.755.880.000		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
				Persentase Cabor Berprestasi				
					Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	15.087.210.000		
				Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga				
					Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.777.402.100		
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kreatif						
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
				Persentase peserta pelatihan ketrampilan kerja				
					Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	89.570.000		
				Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi				
					Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.722.280.000		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	500.000.000		
				prosentase dokumen perencanaan, keuangan, pelaporan yang tepat waktu				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	430.587.172.573		
				Prosentase dokumen perencanaan keuangan, pelaporan yang tepat waktu				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	500.000.000		
				prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	10.037.602.989		
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	46.410.037.572		
			APK PAUD					
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	79.134.629.684		
			APK Sekolah Dasar					
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	46.410.037.572		
			APK Sekolah Menengah Pertama					
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	69.243.689.372		
			APM PAUD					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	79.134.629.684	
				APM SD			
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.452.600.000	
				APM Sekolah Dasar			
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	46.410.037.572	
				APM Sekolah Menengah Pertama			
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	67.791.089.372	
				Capaian Peningkatan rata rata karakter siswa PAUD			
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	32.724.592.112	
				Capaian peningkatan rata rata karakter siswa PAUD PNF			
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4.006.200.000	
				Capaian Peningkatan Rata Rata Karakter siswa PAUD PNF			
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	46.410.037.572	
				Capaian Peningkatan Rata Rata Karakter siswa SD			
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	46.410.037.572	
				Capaian Peningkatan Rata Rata Karakter siswa SMP			
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	67.791.089.372	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan			
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	86.567.649.038	
				Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan0			
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.862.856.800	
				SD NEGERI ARJOWINANGUN 01			
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	838.080.000	
				SD NEGERI BAKALAN KRAJAN 01			
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	721.440.000	

					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	9.392.398.200	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				
				Presentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum			
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	25.000.000	
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
				Presentase guru dengan nilai Uji kompetensi guru (UKG) minimal 75			
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	582.100.544	
				presentase guru tersertifikasi			
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	582.100.544	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Presentase profesionalitas dan keahlian teknis tenaga pendidikan			
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	582.100.544	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				BOR (Bed Occupancy Rate) RSUD			
					DINAS KESEHATAN	40.000.000.000	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
				Persentase unit pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM			
					DINAS KESEHATAN	75.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase dokumen			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	71.000.000	
				Persentase dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15.096.422.675	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
				Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.826.708.000		
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Dan Perlindungan Jaminan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhannya Serta Meningkatkan Kemampuan Fungsi Sosialnya				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15.364.067.900		
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
				Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	113.989.712		
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
				Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	289.520.000		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
				Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Terpelihara Dengan Baik				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	271.772.924		
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
				Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	561.068.000		
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
				Persentase Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	436.710.000		
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
				Persentase Ibu Rumah Tangga yang mendapatkan peningkatan kualitas keluarga				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	2.002.474.000		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Penduduk dan Keluarga Berencana			
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
				Persentase Perangkat daerah yang menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG)				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	99.000.000		
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
				Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu				
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	929.778.700		
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
				Rasio Konsumsi Pangan Lokal Non Beras Terhadap Beras				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.765.787.800		
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
				Persentase PSAT yang layak konsumsi				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	107.616.000		
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
				TFR per WUS (15 s/d 49 tahun)				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	215.000.000		
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
			Cakupan peserta KB Aktif					
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	145.430.000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
			Persentase Kelompok UPPKS Aktif					
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.704.400.000		
			Persentase keluarga kelompok kegiatan Tribina aktif					
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.704.400.000		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan			
					Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.729.790.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				
				Pertumbuhan anggota pramuka di Kota Malang			
					Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	500.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				
				presentase kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dibina			
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	112.855.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				
				presentase peningkatan lembaga kesenian tradisional yang aktif			
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	579.270.000	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
				Persentase cakupan wilayah operasional perpustakaan keliling di 57 kelurahan			
					Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah	1.328.662.000	
				Persentase peningkatan koleksi yang terdigitalisasi			
					Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah	1.078.165.000	
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				
				Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah	43.250.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
			Persentase peningkatan produksi perikanan				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.634.579.000	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
			Penambahan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang memenuhi persyaratan dan standard				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	381.594.000	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
			Jumlah produksi pertanian				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	857.971.500	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
			Persentase Prasarana Pertanian dalam kondisi baik / Jumlah Prasarana Pertanian Keseluruhan X 100%				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	740.086.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
			Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	402.472.000	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
			Kenaikan Skor Kelompok Tani				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket		
1	2	3	4	5	6	7	8		
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	60.948.800			
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						
				Persentase Peningkatan Fasilitas Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan					
					Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	164.516.400			
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						
				Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok					
					Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	250.000.000			
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						
				Persentase jumlah alat UTTP yang di tera dan tera ulang					
					Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	391.570.900			
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						
				Persentase produk UKM yang difasilitasi dengan promosi pemasaran					
					Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	603.146.000			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						
				Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP					
					Inspektorat Daerah	765.107.000			
				Persentase SAKIP PD dengan Nilai A					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Inspektorat Daerah	765.107.000	
				Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti			
					Inspektorat Daerah	765.107.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
			IKM Pelayanan Perangkat Daerah				
					Kecamatan Sukun	64.135.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif				
					Kecamatan Klojen	5.474.655.200	
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif				
					Kecamatan Klojen	633.017.840	
			Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan				
					Kecamatan Klojen	564.360.151	
			Persentase usulan masyarakat untuk sarana dan prasarana di wilayah yang diakomodir				
					Kecamatan Klojen	11.779.512.851	
			persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif				
					Kecamatan Blimbing	686.327.510	
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif				
					Kecamatan Blimbing	1.707.783.000	
			persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kewilayahan				
					Kecamatan Blimbing	3.041.883.200	
			Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kewilayahan				
					Kecamatan Blimbing	671.781.500	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif			
					Kecamatan Kedungkandang	22.123.093.258	
				"Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan"			
					Kecamatan Kedungkandang	22.123.093.258	
				"Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir"			
					Kecamatan Kedungkandang	22.123.093.258	
				0Prosentase Lembaga Kemasyarakatan dan Ormas di Wilayah Kec dan Kel yang aktif			
					Kecamatan Lowokwaru	716.198.400	
				Indeks Pembangunan Masyarakat (IP Mas) Kecamatan			
					Kecamatan Lowokwaru	2.211.372.824	
				Prosentase Lembaga Kemasyarakatan dan Ormas di Wilayah Kec dan Kel yang aktif			
					Kecamatan Lowokwaru	21.521.561.250	
				Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif			
					Kecamatan Sukun	4.836.879.600	
				Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kewilayahan			
					Kecamatan Sukun	14.808.400.800	
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
				Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam			
					Kecamatan Klojen	174.325.000	
				Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan			
					Kecamatan Klojen	1.713.702.900	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan			
					Kecamatan Blimbing	357.350.000	
				Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan			
					Kecamatan Blimbing	32.200.000	
				Prosentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum yang dapat diselesaikan			
					Kecamatan Kedungkandang	1.637.239.800	
				Rasio Linmas per RT			
					Kecamatan Kedungkandang	1.637.239.800	
				Indeks Pembangunan Masyarakat (IP Mas) Kecamatan			
					Kecamatan Lowokwaru	21.346.400	
				Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan			
					Kecamatan Lowokwaru	1.960.454.950	
					Kecamatan Sukun	1.322.604.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
				Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam			
					Kecamatan Klojen	64.800.000	
				cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam			
					Kecamatan Blimbing	59.200.000	
				Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam			
					Kecamatan Kedungkandang	26.199.200	
				Indeks Pembangunan Masyarakat (IP Mas) Kecamatan			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Lowokwaru	120.080.000	
				Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam			
					Kecamatan Sukun	5.520.000	
3	Mendorong revolusi mental dan pembangunan budaya masyarakat						

			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				
			presentase kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dibina				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	390.676.160	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				
			presentase peningkatan lembaga kesenian tradisional yang aktif				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	90.705.000	
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				
			presentase peningkatan pelaku sejarah				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	31.470.000	
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				
			presentase cagar budaya yang dilestarikan				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	102.680.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				
			presentase peningkatan pengunjung museum				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket		
1	2	3	4	5	6	7	8		
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	221.999.072			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
				Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif					
					Kecamatan Sukun	1.334.431.300			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Nilai survei kepuasan internal					
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.392.319.712			
				persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu					
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.369.736.833			
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik					
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	510.190.500			
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						
				Persentase peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa					
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	709.559.200			
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						
				Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat					
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	42.082.716.960			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						
				Persentase peran serta ormas dalam pembangunan					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	380.460.412	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				
				Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan kondisi Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	898.761.896	
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
				Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan dan Keamanan			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.715.569.000	
4	Percepatan pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian yang beririsan dengan prioritas nasional dan penyelesaian masalah prioritas kota						
		Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
				Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.768.755.136	
				Persentase Pemanfaatan SIPR Dalam Pemanfaatan Ruang			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.768.755.136	
		Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif					
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.156.320.000	
				Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah yang sesuai dengan tahapan dan tata cara			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.156.320.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
				Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD			
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	463.640.000	
			Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu				
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
				Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.483.350.000	
				Persentase ketersediaan debit air melalui penyediaan bangunan penampung			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	979.490.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
				Persentase rumah tinggal berakses air bersih			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan	763.470.000	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Permukiman		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
			Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.707.152.222	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
			Persentase Drainase Kota Dalam Kondisi Baik				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	59.714.288.531	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				
			Persentase penanganan infrastruktur permukiman				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	26.705.061.631	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				
			Persentase Pembangunan Kawasan Pioritas Sesuai RTBL				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.740.440.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				
			Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	645.530.000		
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni					
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.293.110.000		
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
			Persentase penanganan area kawasan kumuh					
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	505.110.000		
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
			Persentase Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan PSU					
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.280.026.224		

			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
			Persentase Gedung Milik Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas dalam kondisi baik					
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan	37.515.809.673		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Permukiman		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
				Persentase fasilitas penerangan jalan			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	238.249.400.432	
				Persentase jalan yang memiliki jalur pejalan kaki			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	238.249.400.432	
				Persentase jembatan kota dalam kondisi baik			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	238.249.400.432	
				Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	239.605.047.280	
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				

					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	387.490.000	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
				Persentase Rumah Tidak Layak Huni				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	383.440.000		
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
				Persentase kejadian kebakaran yang ditangani				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.260.301.888		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai Survey Kepuasan Internal				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	26.400.000		
				persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	299.570.500		
				0Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu.				
					Dinas Perhubungan	72.781.000		
				Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu				
					Dinas Perhubungan	4.607.746.267		
				Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu				
					Dinas Perhubungan	27.624.513.616		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				Penurunan prosentase angka kemacetan				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Dinas Perhubungan	794.072.700		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai survei kepuasan masyarakat				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	9.595.852.920		
				Persentase dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan yang disusun tepat waktu				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	9.595.852.920		
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	9.595.852.920		
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
				Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah/Pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	6.813.830.286		
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
				Persentase aplikasi informasi yang terintegrasi				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	15.474.724.735		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
				prosentase keterisian E Database SIPD				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	517.102.500		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase tingkat Keamanan Informasi Pemerintah			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	415.161.412	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai SAKIP				
					Kecamatan Lowokwaru	25.690.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
			IKM Pelayanan Perangkat Daerah				
					Kecamatan Blimbing	8.450.000	
			IKM Perangkat daerah				
					Kecamatan Kedungkandang	6.905.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
			Persentase usulan masyarakat untuk sarana dan prasarana di wilayah yang diakomodir				
					Kecamatan Klojen	997.389.300	
			persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kewilayahan				
					Kecamatan Blimbing	1.217.626.400	
			Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kewilayahan				
					Kecamatan Blimbing	769.668.500	
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif				
					Kecamatan Kedungkandang	795.840.000	
			"Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan"				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Kedungkandang	795.840.000	
				"Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir"			
					Kecamatan Kedungkandang	795.840.000	
5	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana						
		Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup					
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
			Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun dan Sesuai Standart				
					Dinas Lingkungan Hidup	1.304.370.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
			Persentase pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup				
					Dinas Lingkungan Hidup	370.490.000	
			Persentase pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup				
					Dinas Lingkungan Hidup	1.028.720.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
			Persentase luas RTH Publik yang dikelola				
					Dinas Lingkungan Hidup	12.981.563.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				
			persentase pelaku usaha yang sudah melakukan pengelolaan limbah B3				
					Dinas Lingkungan Hidup	108.280.000	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
			Persentase Ketaatan Masyarakat dan Kegiatan/Usaha Pemilik Izin Lingkungan				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Dinas Lingkungan Hidup	591.083.100		
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				Persentase Komunitas Berbudaya Lingkungan di Kota Malang				
					Dinas Lingkungan Hidup	400.670.000		
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bernilai baik				
					Dinas Lingkungan Hidup	283.280.000		
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Persentase pengaduan yang terselesaikan				
					Dinas Lingkungan Hidup	94.420.000		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
				Persentase Penanganan Sampah				
					Dinas Lingkungan Hidup	18.062.536.400		
				Persentase Pengurangan Sampah yang berkurang di masyarakat dan Sektor Informal (Merupakan nilai kumulatif)				
					Dinas Lingkungan Hidup	18.062.536.400		
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan					
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
				Indeks Risiko Bencana				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.940.169.400		
				Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.576.860.000		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Rata-rata waktu tanggap (respon time) bencana				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.576.860.000		

			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				jumlah dokumen				
					Sekretariat Daerah	95.960.000		
				Persentase Kebijakan bidang Pisdas yang ditindaklanjuti				
					Sekretariat Daerah	95.960.000		
				Presentase Kebijakan bidang Pisdas yang ditindaklanjuti				
					Sekretariat Daerah	95.960.000		
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan				
					Kecamatan Blimbing	173.566.400		
				Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan				
					Kecamatan Sukun	153.600.000		
6	Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah							
		Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi						
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
				persentase ketaatan pelaku usaha wajib LKPM				
					Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	146.555.000		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
				Persentase sistem informasi yang dapat diakses masyarakat				
					Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	177.680.558		
		Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN						
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
				Persentase ASN yang memperoleh nilai kinerja dibawah standar				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	367.445.000		
				Persentase pelanggaran disiplin ASN yang telah ditindaklanjuti				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	367.445.000		
				Persentase pemangku jabatan fungsional tertentu				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	774.470.000		
				Persentase terisinya jab struktural dan pelaksana				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	1.692.913.700		
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
				Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	146.640.000	
				Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	2.496.410.000	
		Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai survey kepuasan internal				
					DINAS KESEHATAN	8.851.589.336	
				persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu			
					DINAS KESEHATAN	501.640.784.432	
				persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			
					DINAS KESEHATAN	3.160.954.000	
				Nilai survey kepuasan internal			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	103.828.426.328	
				persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	103.828.426.328	
				persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	103.828.426.328	
				Nilai survey kepuasan internal			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.645.428.320	
				persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.397.752.812	
				persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.349.046.060	
				Nilai survey kepuasan internal			
					Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.366.619.840	
				persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu			
					Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	44.771.402.104	
				persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			
					Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	24.899.416.432	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
				Persentase Penerbitan Ijin Dan Non Ijin Pekerjaan Umum				
					Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.856.159.104		
				Persentase Penerbitan Ijin dan Non Izin Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya				
					Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.856.159.104		
				Persentase Realisasi Target Retribusi IMB				
					Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.856.159.104		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai survey kepuasan internal				
					Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	16.390.173.680		
				persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu				
					Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	39.960.598.860		
				persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				
					Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	4.301.322.380		
				Nilai survey kepuasan internal				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.664.502.000	
				persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	31.171.814.124	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
				Persentase Capaian program dan kegiatan pada RKPD			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	479.840.000	
				Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.028.520.000	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
				Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.021.800.000	
				Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah yang sesuai dengan tahapan dan tata cara			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.021.800.000	
				Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang sesuai dengan tahapan dan tata cara.			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.826.373.360	
				Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai dengan tahapan dan tata cara.			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket		
1	2	3	4	5	6	7	8		
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.035.860.000			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Nilai survey kepuasan internal					
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.142.952.000			
				persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu					
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.142.952.000			
				persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik					
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.142.952.000			
				persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu					
					Badan Pendapatan Daerah	847.200.000			
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
				Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI					
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.985.023.800			
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						
				Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD					
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	20.355.162.536			
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
				Kontribusi pajak daerah terhadap PAD					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Badan Pendapatan Daerah	58.289.905.520	
				persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			
					Badan Pendapatan Daerah	58.289.905.520	
				Persentase penurunan piutang pajak daerah			
					Badan Pendapatan Daerah	58.289.905.520	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Nilai survey kepuasan internal			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	6.402.690.628	
				persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	30.797.707.688	
				persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	1.923.902.800	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
				Persentase implementasi rencana kelitbangan			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.877.080.000	
				Persentase Jumlah Kajian/ Analisa/ Studi / Rencana Induk/ Grand Design Sektor Ekonomi Dan Sumberdaya Alam Yang Mendukung Perencanaan			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.532.880.000	
				Persentase Jumlah Kajian/ Analisa/ Studi / Rencana Induk/ Grand Design Sektor Infrastruktur Dan Kewilayahan Yang Mendukung Perencanaan			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.532.880.000	
				Persentase Jumlah Kajian/ Analisa/ Studi / Rencana Induk/ Grand Design Sektor Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Yang Ditindaklanjuti			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	501.040.000	
				Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	667.400.000	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase barang milik daerah yang terpelihara			
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.608.266.900	
				Persentase dokumen perencanaan,keuangan,pelaporan yang di kirim tepat waktu			
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	19.136.582.249	
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Cakupan Patroli siaga, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat dalam sehari			
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10.397.952.392	
				Persentase penanganan pelanggaran Perda			
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10.397.952.392	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Rasio Poskamling per RW			
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10.397.952.392	
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
				Persentase kejadian kebakaran yang ditangani			
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.185.000.000	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Nilai Survey Kepuasan Internal			
					Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.105.172.621	
				Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu			
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	14.063.495.574	
				Nilai Survey Kepuasan Internal			
					Dinas Lingkungan Hidup	7.462.306.900	
				Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu			
					Dinas Lingkungan Hidup	98.716.369.992	
				Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan yang disusun tepat waktu			
					Dinas Lingkungan Hidup	504.660.000	
				Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik			
					Dinas Lingkungan Hidup	17.424.225.382	
				Nilai Survey Kepuasan Internal			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.395.945.735	
				persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.439.494.343	
				persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.887.765.087	
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
				Persentase Penduduk yang memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.321.491.360	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
				Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.531.410.480	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
				Persentase penduduk yang telah tertib administrasi kependudukan			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	330.183.460	
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				
				Persentase data hasil pelayanan selama 1 tahun			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60.500.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				0Penurunan prosentase angka kemacetan				
					Dinas Perhubungan	11.544.200.000		
				Penurunan prosentase angka kemacetan				
					Dinas Perhubungan	11.544.200.000		

					Dinas Perhubungan	3.221.152.680		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai Survey Kepuasan Internal				
					Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.879.750.801		
				Persentase dokumen perencanaan , keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu				
					Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	26.260.014.150		
				Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik				
					Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	1.987.273.065		

					Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	70.267.603		
				Nilai survey kepuasan internal				
					Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah	21.990.000		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu			
					Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah	7.254.706.684	
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			
					Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah	7.392.824.684	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
				Persentase dokumen arsip yang wajib dikelola sesuai kaidah kearsipan			
					Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah	266.068.048	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				
				Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan penyelamatan arsip			
					Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah	51.210.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Hasil Survei Internal Organisasi			
					Sekretariat Daerah	1.273.396.100	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
					Sekretariat Daerah	30.000.000	
				Nilai survey kepuasan internal			
					Sekretariat Daerah	19.046.766.269	
				Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu			
					Sekretariat Daerah	27.392.445.825	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				
					Sekretariat Daerah	7.188.043.529		

					Sekretariat Daerah	10.006.795.993		
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Tata Pemerintahan				
					Sekretariat Daerah	1.582.837.795		
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri				
					Sekretariat Daerah	144.698.800		
				Persentase Pengembangan Kebijakan Hukum yang Ditindaklanjuti				
					Sekretariat Daerah	3.016.977.434		

					Sekretariat Daerah	12.361.300.000		
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Persentase kebijakan bidang perekonomian, infrastruktur dan SDA yang ditindaklanjuti				
					Sekretariat Daerah	85.321.700		
				Persentase paket selesai tender				
					Sekretariat Daerah	1.519.497.000		
				Persentase kebijakan bidang Perekonomian, Infrastruktur dan SDA yang ditindak lanjuti				
					Sekretariat Daerah	96.970.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai survei kepuasan internal				
					Sekretariat DPRD	11.097.834.865		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu			
					Sekretariat DPRD	40.061.320.689	
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			
					Sekretariat DPRD	4.697.909.554	
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
				Persentase pelaksanaan pembahasan ranperda			
					Sekretariat DPRD	17.932.338.025	
				persentase publikasi kegiatan DPRD			
					Sekretariat DPRD	3.842.097.500	
				Persentase publikasi kegiatan DPRD			
					Sekretariat DPRD	6.936.320.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	32.200.000	
				Nilai survey kepuasan internal			
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	16.951.415.344	
				Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu			
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	16.951.415.344	
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	16.951.415.344	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	

					Badan Keuangan dan Aset Daerah	50.114.000		
				Nilai kepuasan Internal				
					Badan Pendapatan Daerah	69.273.781.938		
				Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu				
					Badan Pendapatan Daerah	69.061.981.938		
				Persentase sarana dan Prasarana dalam kondisi baik				
					Badan Pendapatan Daerah	69.273.781.938		
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
				Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI				
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	22.468.356.784		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan PD tersusun tepat waktu				
					Inspektorat Daerah	9.628.356.294		
				Persentase prasarana dan sarana dalam kondisi baik				
					Inspektorat Daerah	675.659.400		
				Survei Kepuasan Internal				
					Inspektorat Daerah	2.444.790.550		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Inspektorat Daerah	350.364.710		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
				Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP				
					Inspektorat Daerah	777.020.200		
				Persentase SAKIP PD dengan Nilai A				
					Inspektorat Daerah	777.020.200		
				Persentase temuan hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti				
					Inspektorat Daerah	714.704.500		
				Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti				
					Inspektorat Daerah	777.020.200		
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
				Cakupan kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional				
					Inspektorat Daerah	264.922.500		
				Persentase PD yang memiliki akses mendapatkan layanan pendampingan dan asistensi				
					Inspektorat Daerah	306.729.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai survei kepuasan internal				
					Kecamatan Klojen	2.205.180.000		
				Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktuperangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan				
					Kecamatan Klojen	17.467.952.994		
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				
					Kecamatan Klojen	849.436.440		
				Nilai survey kepuasan internal				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Blimbing	505.391.650	
				persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu			
					Kecamatan Blimbing	48.500.000	
				Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu			
					Kecamatan Blimbing	18.277.440.406	
				persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			
					Kecamatan Blimbing	685.673.472	
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			
					Kecamatan Blimbing	73.773.024	

					Kecamatan Blimbing	22.000.000	
				IKM Perangkat daerah			
					Kecamatan Kedungkandang	21.599.771.593	
				Nilai SAKIP			
					Kecamatan Lowokwaru	21.983.466.866	
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			
					Kecamatan Lowokwaru	157.690.000	
				Nilai survey kepuasan internal			
					Kecamatan Sukun	469.884.550	
				persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu			
					Kecamatan Sukun	26.780.000	
				Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Sukun	20.470.145.779	
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			
					Kecamatan Sukun	607.154.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
			IKM pelayanan				
					Kecamatan Klojen	7.404.869.036	
			IKM Pelayanan Perangkat Daerah				
					Kecamatan Blimbing	4.541.041.635	
			IKM Perangkat daerah				
					Kecamatan Kedungkandang	3.983.223.965	
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
					Kecamatan Lowokwaru	500.000	
			Nilai SAKIP				
					Kecamatan Lowokwaru	4.432.466.807	
			IKM Pelayanan Perangkat Daerah				
					Kecamatan Sukun	4.430.912.964	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
			Persentase usulan masyarakat untuk sarana dan prasarana di wilayah yang diakomodir				
					Kecamatan Klojen	11.300.000	
			IKM Pelayanan Perangkat Daerah				
					Kecamatan Blimbing	502.714.800	
			persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Blimbing	4.355.033.350	
				Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif			
					Kecamatan Blimbing	1.224.228.800	
				persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kewilayahan			
					Kecamatan Blimbing	7.066.218.700	
				Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kewilayahan			
					Kecamatan Blimbing	3.601.430.000	
				Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif			
					Kecamatan Kedungkandang	4.413.284.900	
				"Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan"			
					Kecamatan Kedungkandang	4.413.284.900	
				"Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir"			
					Kecamatan Kedungkandang	4.413.284.900	
				Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif			
					Kecamatan Sukun	1.574.655.000	
				Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kewilayahan			
					Kecamatan Sukun	3.511.818.400	
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
				Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan			
					Kecamatan Klojen	144.000.000	
				persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Blimbing	870.876.000	
				Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan			
					Kecamatan Blimbing	499.200.000	
				Prosentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum yang dapat diselesaikan			
					Kecamatan Kedungkandang	209.335.200	
				Rasio Linmas per RT			
					Kecamatan Kedungkandang	209.335.200	
				Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan			
					Kecamatan Sukun	333.600.000	

Sedangkan Tabel Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja sebagaimana pada Lampiran I.

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar adalah dalam rangka memenuhi Standart Pelayanan Minimal, sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Adapun urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Pada proses perencanaan, Pemerintah Perangkat Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan kegiatan dan anggaran sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan azas efektif, efisien, kepatutan, kewajaran dan akuntabel serta tanggung jawab yang dituangkan dalam Renja RKPD tahun anggaran 2023. Penentuan jumlah alokasi plafon setiap Perangkat Daerah maupun Unit Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan penentuan skala prioritas kegiatan Prioritas dan kegiatan strategis yang telah disusun dalam RKPD tahun anggaran 2023. Adapun prosesnya dilakukan secara detail dengan cara komunikasi intensif antara Perangkat Daerah dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, sehingga diperoleh kegiatan tahun 2023 yang akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan. Hasil dari proses tersebut, ditetapkan menjadi PPAS sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kepala daerah menyusun Kebijakan Umum APBD dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. Selanjutnya penjelasan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana Lampiran II.

4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Struktur APBD berdasarkan kelompok belanja terdiri atas Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tak terduga, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Operasional mempunyai rincian jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal terinci dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Tetap Lainnya.

Plafon Anggaran Sementara Belanja daerah tahun anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp.2.553.120.351.778, bertambah 15,04% atau sebesar Rp. 333.832.961.641 jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 yang dianggarkan sebesar Rp.2.219.287.390.137. Rincian masing-masing jenis belanja daerah sebagai berikut.

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
(1)	(2)	(3)
5	BELANJA DAERAH	
5.1	Belanja Operasi	2.161.895.958.597
5.1.01	Belanja Pegawai	1.061.710.658.442
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	942.579.278.923
5.1.03	Belanja Bunga	0
5.1.04	Belanja Subsidi	0
5.1.05	Belanja Hibah	144.064.981.232
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	13.541.040.000
5.2	Belanja Modal	396.971.292.997
5.3	Belanja Tidak Terduga	19.749.100.184
5.4	Belanja Transfer	0
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.578.616.351.778

Sumber : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

1. Belanja Operasi tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 2.161.895.958.597, bertambah 14,57% atau sebesar Rp. 274.966.290.460 jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 yang dianggarkan sebesar Rp. 1.886.929.668.137. Rincian masing-masing jenis belanja operasi dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 1.061.710.658.442, bertambah 21,54% atau sebesar Rp. 188.149.745.824 jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang dianggarkan sebesar Rp. 873.560.912.618.
 - b. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 942.579.278.923, bertambah 5,12% atau sebesar Rp. 45.894.675.404 jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang dianggarkan sebesar Rp. 896.684.603.519;
 - c. Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp. 144.064.981.232, bertambah 37,45% atau sebesar Rp. 39.255.869.232 jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 yang dianggarkan sebesar Rp. 104.809.112.000; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp. 13.541.040.000, bertambah 14,03% atau sebesar Rp. 1.666.000.000 jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 yang dianggarkan sebesar Rp. 11.875.040.000.
2. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 396.971.292.997, bertambah 60,78% atau sebesar Rp. 150.072.970.168 jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang dianggarkan sebesar Rp. 246.898.322.829 dan
3. Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp. 19.749.100.184, berkurang 76,89% atau sebesar Rp. 65.710.298.987 jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang dianggarkan sebesar Rp. 85.459.399.171.

BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Rencana Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
(1)	(2)	(3)
	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	196.250.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	196.250.000.000
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	196.250.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	11.187.680.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	11.187.680.000
	Pembiayaan Netto	185.062.320.000

Sumber : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

BAB VI PENUTUP

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ini disusun sebagai pedoman dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Apabila terjadi perubahan proyeksi penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 akibat:

1. Adanya kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
2. Adanya pergeseran atau perubahan baik penambahan maupun pengurangan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah;

setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 antara Walikota Malang dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, maka akan dituangkan dalam persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.



MALANG, 4 Agustus 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MALANG,



I MADE RIANDIANA KARTIKA, SE, MM

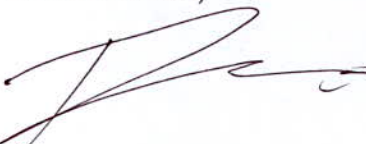
Wakil Ketua

H. ABDURROCHMAN, SH

Wakil Ketua,

H. ASMUALIK, ST

Wakil Ketua,



RIMZAH, S.IP

LAMPIRAN I

TABEL PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DAN INDIKATOR KINERJA

Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80 %	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	7 dokumen	1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
		Prosentase dokumen perencanaan keuangan, pelaporan yang tepat waktu	100 %								
		prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80 %				1.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Malang	
							1.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		
							1.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Malang	
							1.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		
							1.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Kota Malang	
							1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kota Malang	
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen administrasi keuangan	10 dokumen	1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3345 ASN	Kota Malang	
							1.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian Keuangan SKPD	2 Dokumen	Kota Malang	
							1.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	Kota Malang	
							1.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan	3 Dokumen		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Dokumen		Kota Malang	
			1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	34 dokumen	1.01.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah (asuransi)	15 Unit		Kota Malang	
						1.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah yang tersusun	39 Dokumen		Kota Malang	
			1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kepegawaian	3 dokumen	1.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diolah	2 Dokumen			
						1.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen			
						1.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	250 Pegawai		Semua Kab/Kota Kota Malang	
			1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi perangkat daerah	10 dokumen	1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen alat listrik yang tersedia	11 Jenis		Kota Malang	
						1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis alat tulis kantor, bahan cetak dan bahan komputer yang tersedia	60 Jenis		Kota Malang	
						1.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	21 Jenis			
						1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	10 bahan		Kota Malang	
						1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetak dan penggandaan yang tersedia	28 Jenis		Kota Malang	
						1.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	4 Jenis		Kota Malang	
						1.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	1250 Tamu		Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	795 Perjalanan Dinas	Kota Malang	
			1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan	2 dokumen	1.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan		5 Unit	Kota Malang	
						1.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan Gedung Kantor		1 Gedung		
						1.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana Prasarana Gedung Kantor yang diadakan		1 Kantor	Kota Malang	
			1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	7 dokumen	1.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik		4000 Surat	Kota Malang	
						1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik		12 Bulan	Kota Malang	
						1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan umum yang terlayani		8 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang	
			1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah	5 dokumen	1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan		2 Unit	Kota Malang	
						1.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		136 Unit	Kota Malang	
						1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Lainnya yang di Rehabilitasi		1 Gedung	Kota Malang	
						1.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara		1 Gedung	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		99.5 %	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitas pendidikan	135 Siswa	1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Lembaga/Satuan Pendidikan yang Memperoleh Bantuan Sarana Prasarana	6 Sekolah			
	APK PAUD	91.88 %									
	APK Sekolah Dasar	110.71 %									
	APK Sekolah Menengah Pertama	107.4 persen									
	APK Sekolah Menengah Pertama	107.45 %									
	APM PAUD	82.90 %									
	APM SD	107.4 persen									
	APM Sekolah Dasar	109.35 %									
	APM Sekolah Menengah Pertama	87.67 %									
	Capaian Peningkatan Rata Rata Karakter siswa PAUD PNF	20 %									
	Capaian Peningkatan Rata Rata Karakter siswa SD	20 %									
	Capaian Peningkatan Rata Rata Karakter siswa SMP	20 %									
	Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	101 siswa									
	Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	104 siswa									
	Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	108 siswa									
	Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	124 siswa									
	Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	128 siswa									
	Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	129 siswa									
	Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	135 siswa									
	Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	135 Siswa									
	Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	136 siswa									
	Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	139 Siswa									
	Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	140 siswa									
Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	142 siswa										
Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	150 siswa										
Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	152 siswa										

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	157 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	104 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	158 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	108 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	160 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	124 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	161 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	128 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	164 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	129 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	167 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	135 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	168 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	140 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	169 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	142 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	169 Siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	150 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	170 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	152 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	171 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	157 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	172 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	158 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	173 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	160 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	175 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	161 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	176 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	164 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	177 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	167 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	178 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	168 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	179 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	169 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	179 Siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	170 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	181 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	171 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	182 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	172 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	183 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	173 siswa					

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	185 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	175 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	187 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	176 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	188 Siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	177 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	189 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	178 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	191 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	179 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	193 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	181 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	194 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	182 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	195 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	183 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	196 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	185 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	198 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	187 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	199 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	189 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	201 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	191 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	202 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	193 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	203 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	194 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	204 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	195 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	206 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	196 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	207 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	198 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	211 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	199 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	212 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	201 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	214 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	202 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	218 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	203 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	225 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	204 siswa					

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	232 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	206 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	238 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	207 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	243 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	211 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	250 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	212 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	252 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	214 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	254 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	218 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	256 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	225 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	259 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	232 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	263 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	238 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	283 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	243 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	285 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	250 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	286 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	252 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	289 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	254 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	293 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	256 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	297 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	259 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	300 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	263 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	301 Siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	283 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	303 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	285 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	305 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	286 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	306 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	289 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	317 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	293 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	319 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	297 siswa					

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	323 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	300 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	327 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	303 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	333 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	305 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	335 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	306 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	344 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	317 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	345 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	319 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	352 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	323 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	353 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	327 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	356 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	333 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	357 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	335 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	360 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	344 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	361 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	345 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	362 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	352 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	365 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	353 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	366 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	356 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	367 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	357 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	368 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	361 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	369 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	362 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	370 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	365 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	377 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	366 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	385 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	367 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	390 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	368 siswa					

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	409 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	369 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	415 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	370 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	425 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	377 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	433 Siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	385 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	438 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	390 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	440 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	409 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	448 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	415 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	45 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	425 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	450 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	438 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	464 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	440 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	464 Siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	448 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	476 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	450 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	491 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	464 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	500 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	476 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	502 Siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	491 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	504 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	500 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	505 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	504 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	510 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	505 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	515 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	510 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	516 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	515 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	517 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	516 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	522 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	517 siswa					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	524 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	522 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	532 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	524 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	548 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	532 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	560 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	548 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	595 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	560 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	596 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	595 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	602 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	596 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	650 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	602 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	688 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	650 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	72 siswa		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	688 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	81 siswa		SD NEGERI ARJOWINANGUN 01	218 siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	93 siswa		SD NEGERI ARJOWINANGUN 01	440 siswa					
		SD NEGERI ARJOWINANGUN 01	218 siswa		SD NEGERI BAKALAN KRAJAN 01	491 siswa					
		SD NEGERI ARJOWINANGUN 01	440 siswa		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99.5 %					
		SD NEGERI BAKALAN KRAJAN 01	491 siswa								
							1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Sekolah yang mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat	3 Sekolah		
							1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah unit bangunan Pendidikan Sekolah Dasar yang dibangun/ direhabilitasi	1 Sekolah		
							1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah lembaga yang mendapatkan Sarana dan Prasarana Mebel Sekolah	1 lembaga		
							1.01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1 Sekolah		
							1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah siswa prasejahtera Pendidikan Dasar yang mendapatkan bantuan sarana sekolah	258 Siswa		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.01.02.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	318 Sekolah			
						1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	45 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	51 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	72 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	81 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	93 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	96 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	101 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	104 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	108 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	117 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	124 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	128 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	129 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	131 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	133 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	135 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	136 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	139 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	140 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	142 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	150 Siswa			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	152 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	154 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	155 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	157 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	158 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	160 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	161 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	161 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	164 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	167 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	167 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	168 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	169 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	170 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	170 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	171 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	172 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	172 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	173 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	173 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	175 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	176 Siswa			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	177 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	177 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	178 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	179 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	181 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	181 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	182 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	182 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	183 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	183 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	185 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	187 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	187 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	188 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	190 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	190 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	191 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	192 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	193 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	194 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	195 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	196 siswa			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	198 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	199 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	201 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	202 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	203 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	203 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	204 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	207 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	211 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	212 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	214 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	218 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	218 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	225 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	232 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	238 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	238 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	243 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	250 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	252 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	254 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	256 Siswa			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	258 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	259 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	263 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	276 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	284 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	285 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	289 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	293 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	300 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	301 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	303 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	305 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	306 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	317 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	317 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	319 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	323 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	327 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	333 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	335 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	344 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	345 siswa			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	352 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	353 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	355 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	357 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	360 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	361 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	362 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	365 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	366 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	367 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	368 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	369 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	370 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	374 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	377 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	379 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	385 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	390 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	409 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	415 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	425 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	427 Siswa			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	433 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	438 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	440 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	448 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	450 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	464 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	464 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	476 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	487 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	491 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	497 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	500 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	502 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	504 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	505 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	510 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	515 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	516 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	517 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	522 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	524 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	529 siswa			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	532 Siswa		
								Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	548 siswa		
								Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	560 siswa		
								Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	595 siswa		
								Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	596 siswa		
								Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	602 siswa		
								Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	650 Siswa		
								Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	688 Siswa		
								Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	864 siswa		
								Jumlah Yayasan yang Mendapatkan BOSDA	1 Dokumen		
							1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah dokumen pemetaan, Jumlah lembaga yang memperoleh pembinaan, Jumlah Pengembangan Inovasi Mutu Pendidikan	420 Peserta		
							1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah dokumen bahan perumusan yang dihasilkan, Jumlah prestasi tingkat provinsi dan nasional	5 Komunitas		
							1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				
							1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang mendapatkan pembinaan	195 Sekolah		
							1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Yayasan Pendidikan yang Memperoleh Bantuan Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	686 Lembaga 45 Siswa 51 siswa		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	72 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	81 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	93 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	96 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	101 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	104 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	108 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	117 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	124 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	128 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	129 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	131 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	133 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	135 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	135 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	136 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	139 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	140 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	142 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	150 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	152 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	154 Siswa			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	155 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	157 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	158 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	158 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	160 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	161 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	161 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	164 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	167 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	167 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	168 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	169 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	169 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	170 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	170 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	171 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	172 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	172 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	173 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	173 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	175 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	175 Siswa			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	176 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	177 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	177 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	178 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	179 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	179 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	181 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	181 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	182 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	182 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	183 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	183 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	185 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	187 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	187 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	188 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	190 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	190 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	191 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	192 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	193 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	193 Siswa			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	194 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	195 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	196 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	198 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	199 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	201 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	202 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	203 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	204 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	206 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	207 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	211 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	212 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	214 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	218 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	218 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	225 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	232 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	238 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	243 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	250 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	252 Siswa			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	254 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	256 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	258 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	259 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	261 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	263 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	276 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	284 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	285 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	289 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	293 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	297 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	300 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	301 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	303 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	305 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	306 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	317 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	317 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	319 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	323 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	327 siswa			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	333 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	335 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	335 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	344 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	345 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	352 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	353 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	355 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	356 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	357 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	360 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	362 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	365 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	366 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	367 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	368 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	369 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	370 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	374 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	377 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	379 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	385 Siswa			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	390 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	409 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	415 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	425 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	427 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	433 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	438 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	440 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	448 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	450 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	464 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	476 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	487 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	491 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	497 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	500 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	502 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	504 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	505 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	510 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	515 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	516 Siswa			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	517 Siswa		
								Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	522 Siswa		
								Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	524 siswa		
								Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	529 siswa		
								Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	532 Siswa		
								Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	548 siswa		
								Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	560 Siswa		
								Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	595 siswa		
								Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	596 siswa		
								Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	602 siswa		
								Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	650 Siswa		
								Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	688 Siswa		
								1.01.02.2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang mendapatkan peningkatan Kapasitas pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	4 RKB	
								1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Lembaga/Satuan Pendidikan yang Memperoleh Bantuan Sarana Prasarana	6 Sekolah	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	384 siswa					
					Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	420 siswa					
					Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	585 siswa					
					Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	621 siswa					
					Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	687 siswa					

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	693 s						
				Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	721 siswa						
				Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	757 siswa						
				Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	770 siswa						
				Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	771 siswa						
				Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	777 siswa						
				Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	784 siswa						
				Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	794 siswa						
				Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	805 siswa						
				Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	814 siswa						
				Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	817 siswa						
				Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	824 siswa						
				Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	830 siswa						
				Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	838 siswa						
				Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	857 siswa						

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
					Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	863 siswa					
					Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	870 siswa					
					Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	881 siswa					
					Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	891 siswa					
					Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	903 siswa					
					Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	905 siswa					
					Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	1074 siswa					
					Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	97.3 %					
							1.01.02.2.02.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Pengadaan Peralengkapan Sekolah	30 Sekolah		
							1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
							1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah lembaga yang mendapatkan Sarana dan Prasarana Mebel Sekolah	2 lembaga		
							1.01.02.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3 Sekolah		
								Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0 Paket		
							1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa				
							1.01.02.2.02.30 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah dokumen bahan perumusan yang dihasilkan, Jumlah prestasi tingkat provinsi dan nasional	107 Sekolah		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	384 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	621 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	687 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	693 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	721 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	784 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	794 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	814 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	817 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	830 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	870 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	891 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	903 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	1074 Siswa			
						1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Penyelenggara Proses Belajar dan Ujian Peserta Didik	120 Peserta			
						1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah dokumen bahan perumusan yang dihasilkan, Jumlah prestasi tingkat provinsi dan nasional	15 Komunitas			
						1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
						1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mendapatkan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	45 Sekolah			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Yayasan Pendidikan yang Memperoleh Bantuan	107 Lembaga			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	384 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	621 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	687 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	693 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	721 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	784 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	794 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	814 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	817 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	830 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	870 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	891 Siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	903 siswa			
							Jumlah Siswa yang mendapatkan Layanan Pendidikan	1074 Siswa			
						1.01.02.2.02.43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah dokumen pemetaan, Jumlah lembaga yang memperoleh pembinaan, Jumlah Pengembangan Inovasi Mutu Pendidikan	1 Lokasi			
			1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	74 siswa	1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarna dan Utilitas PAUD	3 Lembaga			
				Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	81 siswa						
				Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	151 siswa						
				Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	214 siswa						

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
					Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	93.5 %					
							1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah sekolah yang mendapatkan peningkatan Kapasitas pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	686 Lembaga		
							1.01.02.2.03.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah lembaga PAUD dan PNF yang memperoleh bantuan rehab sesuai SPM menuju SNP	4 Lembaga		
							1.01.02.2.03.05 Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD				
							1.01.02.2.03.06 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pengadaan Sarana Prasarana PAUD dan PNF sesuai SPM menuju SNP	50 Lembaga		
							1.01.02.2.03.11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Siswa yang mendapatkan pelayanan Pendidikan PAUD	175 Lembaga		
							1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Lembaga yang menerima Pengadaan Alat Prasktik dan Peraga Siswa PAUD	5 Komunitas		
							1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah yang menyelenggarakan Proses Belajar PAUD	35 Peserta		
							1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah komunitas PKG yang memperoleh fasilitasi Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	500 Lembaga		
							1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah dokumen pemetaan, Jumlah lembaga yang memperoleh pembinaan	13 Lembaga		
							1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Lembaga PAUD yang mendapatkan BOP PAUD	161 Lembaga		
			1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pendidikan	98 siswa 750 siswa	1.01.02.2.04.09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang diadakan	15 Lembaga		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
					Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	97.65 %					
							1.01.02.2.04.10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik kesetaraan SKB yang memperoleh fasilitas pendidikan	15 Lembaga		
							1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga PAUD PNF yang memperoleh fasilitas	80 Lembaga		
							1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan				
							1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	47.24 %	1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	rata rata capaian nilai kompetensi literasi memenuhi kompetensi minimum	53.25 %	1.01.03.2.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah lembaga yang memperoleh pembinaan	375 Lembaga		
				1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			1.01.03.2.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah lembaga yang memperoleh pembinaan	60 Lembaga		
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Presentase guru dengan nilai Uji kompetensi guru (UKG) minimal 75 presentase guru tersertifikasi Presentase profesionalitas dan keahlian teknis tenaga pendidikan	80 % 91.95 % 42 %	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pendidik pada jenjang PAUD negeri dan swasta yang ijazah diploma IV atau sarjana dan sertifikat pendidikan	45.25 %	1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Dokumen		
							1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12000 Orang/bulan		Kota Malang	
						1.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	5 Laporan		Kota Malang	
			1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100 %	1.02.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		Kota Malang	
						1.02.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		Kota Malang	
			1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100 %	1.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang		Semua Kab/Kota Kota Malang	
			1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100 %	1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		Kota Malang	
						1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		Kota Malang	
						1.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			
						1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	47 Paket		Kota Malang	
						1.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen		Kota Malang	
						1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1972 Laporan		Kota Malang	
			1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	100 %	1.02.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100 %	1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Malang	
							1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Malang	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %	1.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Malang	
							1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	Kota Malang	
							1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Malang	
							1.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	Kota Malang	
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase puskesmas dan RSUD yang melaksanakan pengelolaan anggaran BLUD	100 %	1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Malang	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Cakupan Penduduk yang Terjamin Asuransi Kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat NDR (Net Death Ret) Persentase balita stunting Persentase gedung puskesmas dan puskesmas pembantu yang direhab Persentase Kelurahan UCI Persentase ketersediaan alat kesehatan dan obat-obatan sesuai standar Presentase Unit Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi SPM	4.16 - 24,98 - 100 % <2 % <16 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasyankes yang memenuhi standar	100 %	1.02.02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.02.02.2.01.05 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan 1 Unit Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000		Kota Malang		
						1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 14 Unit				
						1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 37 Unit		Kota Malang		
						1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan 4 Paket Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan 78 Paket		Kota Malang		
						1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan 1 Paket Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan 5 Paket		Kota Malang		
						1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 7 Unit Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 45 Unit Jumlah kalibrasi alat kesehatan 250 item		Kota Malang		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan balita 100 % Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100 % Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin 100 % Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil 100 % persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat 100 % Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV 100 % Persentase pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (TB) 100 %		1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 12946 Orang		Kota Malang		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
					Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100 %					
					Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100 %					
					Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif	100 %					
					Persentase pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)	100 %					
					Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100 %					
							1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11928 Orang	Kota Malang	
							1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11360 Orang	Kota Malang	
							1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	46427 Orang	Kota Malang	
							1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	98532 Orang	Kota Malang	
							1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	606244 Orang	Kota Malang	
							1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	110746 Orang	Kota Malang	
							1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	228720 Orang	Kota Malang	
							1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22227 Orang	Kota Malang	
							1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17014 Orang	Kota Malang	
							1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan	18600 Orang	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							dengan Risiko Terinfeksi HIV	Sesuai Standar			
							1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 Dokumen	Kota Malang	
							1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6 Dokumen	Kota Malang	
							1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	40 Dokumen	Kota Malang	
							1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	Kota Malang	
							1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	4 Dokumen	Kota Malang	
							1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) berat yang dilayani Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1415 orang 16 Orang	Kota Malang	
							1.02.02.2.02.24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	2 Dokumen	Kota Malang	
							1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	128 Dokumen	Kota Malang	
							1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	3 Dokumen	Kota Malang	
							1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	10 Dokumen	Kota Malang	
							1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	17 Dokumen	Kota Malang	
							1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	13 Dokumen	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen		
							1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	10 Unit	Kota Malang	
							1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	14 Dokumen		
			1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit kelas C, D yang berizin	100 %		1.02.02.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	42 Unit		
							1.02.02.2.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	3 Unit		
								Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	16 Unit		
							1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	66 Unit	Kota Malang	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Medis yang berkompeten	90 %	1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang dibina diawasi dan memenuhi syarat	95 %	1.02.03.2.01.02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	12 Dokumen		
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan sesuai standar	80 %	1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah pembayaran tenaga kesehatan dengan perjanjian kerja Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12 bulan 50 Orang	Kota Malang	
							1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen		
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN	persentase sarana kefarmasian dan industri rumah tangga yang dibina diawasi dan	90 %	1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal,	Persentase sarana kefarmasian yang dibina dan diawasi	55 %	1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek,	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan	145 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	MAKANAN MINUMAN	memenuhi syarat		Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
				1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase sarana industri rumah tangga pangan yang dibina dan diawasi	14 %	1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	300 Dokumen		
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persentase UKBM yang dibina	100 %	1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang aktif	75 %	1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 Dokumen		
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah dan Puskesmas yang melaksanakan Germas	100 %	1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen		
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang mencapai strata tertinggi	65 %	1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	80 -	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penanggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
		persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %					Jumlah dokumen Renja/RKT dan Renstra	6 Dokumen		
		persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80 %					Jumlah peserta sosialisasi	200 orang		
							1.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1 dokumen	Kota Malang	
								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		
							1.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA	1 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
						1.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen	Kota Malang	
						1.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan DPA Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen		
						1.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	70 Dokumen 39 Laporan	Kota Malang	
						1.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56 Dokumen 25 Laporan	Kota Malang	
			1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	145 orang 125 Orang/bulan	Kota Malang	
						1.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Dokumen 4 Laporan	Kota Malang	
			1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	20 %	1.03.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan barang milik daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 dokumen 4 Laporan	Kota Malang	
			1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100 %	1.03.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan	40 Orang 20 orang	Semua Kab/Kota Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								kapasitasnya			
			1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	80 %	1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	Kota Malang		
						1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor	85 Jenis	Kota Malang		
						1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan	6100 kotak	Kota Malang		
						1.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan fasilitasi tamu	6100 kotak	Kota Malang		
						1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	32 kali	Kota Malang		
			1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100 %	1.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Malang		
						1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan belanja telpon, air dan listrik	48 tagihan listrik	Kota Malang		
						1.03.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	15 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang		
			1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	85 %	1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah bbm dan pelumas yang disediakan selama 1 tahun	63220 liter	Kota Malang		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan diproses perizinannya	60 Unit 60 kendaraan		
							1.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	6 Unit 16 jenis	Kota Malang	
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik Persentase ketersediaan debit air melalui penyediaan bangunan penampung	100 % 71,45 %	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Volume debit air pada bangunan penampung	630 m3	1.03.02.2.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun Jumlah lokasi penampung air yang dibangun	74 Unit 75 titik		
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	10 ha	1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Lokasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2 Lokasi 0.3 KM		
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tinggal berakses air bersih	94,16 %	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	1466 SR	1.03.03.2.01.14 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya "Jumlah peserta pada pelaksanaan pembinaan rutin"	140 Penyelenggara SPAM 200 orang		
							1.03.03.2.01.15 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	"Jumlah sambungan rumah yang dipelihara secara rutin " Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	1000 SR 1 Unit		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak	85,47 %	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman Jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	1200 SR 1200.5 SR .TS	1.03.05.2.01.05 Rehabilitasi/Peningkatan /Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan infrastruktur air limbah Jumlah instalasi pengolahan air limbah domestik yang dipelihara Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman Jumlah Saluran Rumah (SR) yang direhabilitasi/dikembangkan	5 dokumen 20 lokasi 100 Rumah Tangga 1000 SR		
							1.03.05.2.01.06 Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Lokasi Pembangunan/ Penyediaan SubSistem Pengolahan Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik Jumlah sambungan rumah (SR) yang tersambung	20 lokasi 175 Rumah Tangga 700 SR		
							1.03.05.2.01.08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Jumlah peserta sosialisasi air limbah domestik	57 Kelompok 1000 orang		
							1.03.05.2.01.09 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah peserta pada pelaksanaan monitoring dan peningkatan kinerja pengolahan air limbah domestik Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	150 orang 200 Orang		
							1.03.05.2.01.10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Modular Sewerage System yang terpelihara Jumlah penerimaan dari pelayanan pembuangan lumpur tinja dan air kotor dari tangki ke saluran pembuangan pada IPLT Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	2 Lokasi 3750 kali 4 Unit		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.03.05.2.01.12 Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Lokasi Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	3 Lokasi			
							Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	150 Rumah Tangga			
							Jumlah sambungan rumah (SR) yang tersambung	350 SR			
						1.03.05.2.01.14 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Layanan Penyedotan lumpur tinja	250 kali			
							Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	250 Rumah Tangga			
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Kota Dalam Kondisi Baik	84,52 %	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase kota dalam kondisi baik	22 KM	1.03.06.2.01.02 Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	3 dokumen		
							Jumlah Outline Plan pada Kawasan Genangan yang Disusun	3 Dokumen			
							1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah lokasi genangan air yang ditangani	6 Lokasi		
							Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	3.631 M			
							1.03.06.2.01.06 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah titik Pemeliharaan Insidentil Turap/Talud/ Bronjong	3 titik		
							Panjang drainase kota yang ditingkatkan fungsinya	3.5 KM			
							Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	2.4 KM			
							1.03.06.2.01.07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah Titik Rehabilitasi/Pengembangan Turap/Talud/Bronjong	1 titik		
							Panjang Saluran Drainase/ Gorong-gorong yang di lakukan Pemeliharaan	3 KM			
							Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	1.175 M			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan infrastruktur permukiman	65,88 %	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi Kawasan Permukiman yang berhasil ditata secara layak dan nyaman	36 Lokasi	1.03.07.2.01.01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi Kawasan Permukiman yang berhasil ditata secara layak dan nyaman	39 Lokasi		
							1.03.07.2.01.02 Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi permukiman yang dipelihara	19 Lokasi		
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Gedung Milik Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas dalam kondisi baik	100 %	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	19 Gedung	1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	"Jumlah pelaksanaan pengendalian terhadap kesesuaian konstruksi bangunan gedung "	80 pelaksanaan		
							1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	160 Dokumen		
							1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	"Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum "	5 dokumen		
							1.03.08.2.01.12 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen		
							1.03.08.2.01.12 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	15 Unit		
							1.03.08.2.01.12 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum yang dibangun dan direhabilitasi	15 gedung		
							1.03.08.2.01.13 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	10 gedung		
							1.03.08.2.01.13 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan	16 gedung		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Pemeliharaan dan Perawatan Jumlah Gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum yang dipelihara secara rutin dan insidental	6 gedung		
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Pembangunan Kawasan Prioritas Sesuai RTBL	9.00 %	1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan bangunan dan lingkungan yang tertata dengan baik	200 m	1.03.09.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan PBL Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1 dokumen 1 Dokumen		
							1.03.09.2.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Luasan kawasan penataan bangunan	2 Kawasan 200 m2		
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase fasilitas penerangan jalan Persentase jalan yang memiliki jalur pejalan kaki Persentase jembatan kota dalam kondisi baik Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	70.41 % 94.74 % 95.24 % 96.91 %	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Penerangan Jalan dalam kondisi baik Jumlah jembatan Kota dalam Kondisi Mantap Panjang jalan Kota dalam Kondisi Mantap	2500 titik 28 lokasi 30 KM	1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian Jumlah dokumen perencanaan Infrastruktur jalan Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur penerangan jalan	7 Dokumen 6 Dokumen 1 Dokumen		
							1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan	jumlah jalan yang terbangun/terehabilitasi jumlah lokasi pedestrian yang terbangun/terehabilitasi Jumlah titik penerangan jalan kota malang yang terbangun/terehabilitasi Panjang Jalan yang Dibangun	2 Lokasi 2 Lokasi 469 titik 155 m		
							1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi Panjang Jalan yang direhabilitasi dan dikembangkan panjang pedestrian yang direhabilitasi dan dikembangkan	33 KM 25 KM 4 Lokasi		
							1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah Pelayanan Laboratorium Pengujian Konstruksi Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	35 kali 6 KM		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah Titik Penerangan Jalan yang terpelihara Panjang Jalan yang dilakukan pemeliharaan Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	2250 titik 12 KM 4 KM			
						1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun Panjang Jembatan yang Dibangun	3 Lokasi 100 M			
						1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah lokasi Pemeliharaan Rutin jembatan Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	10 Lokasi 48 M			
						1.03.10.2.01.20 Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah lokasi Pemeliharaan Insidentil jembatan Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	10 Lokasi 100 m			
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	100 %	1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	60 orang	1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang tersertifikasi	60 Orang 60 orang		
				1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			1.03.11.2.02.02 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah dokumen perangkat pendukung	3 Dokumen 3 Dokumen		
				1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan	200 Badan Usaha	1.03.11.2.03.03 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta Pelaksanaan Pemberdayaan Jasa Konstruksi Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	200 peserta 250 Orang		
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani Persentase Pemanfaatan SIPR Dalam Pemanfaatan Ruang	100 % 89 %	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan persetujuan teknis substansi teknis RTR	1 Materi Teknis	1.03.12.2.01.02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota Jumlah dokumen rencana tata ruang	1 Dokumen 1 Dokumen		
							1.03.12.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-	1 Dokumen		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Penataan Ruang	undangan Bidang Penataan ruang Jumlah peserta sosialisasi	480 orang		
			1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Luas bidang pemanfaatan ruang yang tersinkronisasi dalam peta	100000 m2		1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen		
							1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang Jumlah dokumen pemanfaatan ruang yang tersinkronisasi dalam peta	200 Dokumen 200 Dokumen		
			1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Identifikasi pelanggaran Tata Ruang / Bangunan	6 Lokasi		1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang "Jumlah Lokasi Identifikasi pelanggaran Tata Ruang / Bangunan"	5 Dokumen 6 Lokasi		
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	0.00 %	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	1 dokumen	1.04.02.2.01.01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen kajian Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana	1 Dokumen 1 Dokumen		
				1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100 %	1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	4 Unit Rumah		
				1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah unit hunian dalam kondisi baik	288 Unit	1.04.02.2.05.02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah unit hunian yang ter huni	288 Dokumen 288 unit		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan area kawasan kumuh	73,61 %	1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	6,55 %	1.04.03.2.03.01 Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen perencanaan peremajaan/ pemugaran permukiman dan kawasan kumuh	1 Dokumen		
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan PSU	80 %	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Perumahan yang sedang terfasilitasi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	70 PSU	1.04.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	4 Laporan		
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 persen	1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
		Persentase dokumen perencanaan, keuangan, pelaporan yang di kirim tepat waktu	80 persen		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen 2 Dokumen		
							1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	Kota Malang	
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		
							1.05.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	Kota Malang	
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 persen	1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	Kota Malang	
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	122 Orang/bulan		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	90 %						
						1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		Kota Malang	
						1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				Kota Malang	
			1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100 %	1.05.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		Kota Malang	
			1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100 persen	1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket 240 Paket		Kota Malang	
						1.05.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		Semua Kab/Kota Kota Malang	
			1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100 % 100 persen	1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket 11 Paket		Kota Malang	
						1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket 24 Paket		Kota Malang	
						1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket 3 Paket		Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Malang		
						1.05.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Malang		
						1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Malang		
						1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	Kota Malang		
						1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	20 Kali	Kota Malang		
			1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	100 persen	1.05.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Malang		
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai RKBMD	100 %						
						1.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	Kota Malang		
						1.05.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit			
						1.05.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	Kota Malang		
			1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	1 Tahun	1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2400 Laporan	Kota Malang		
				Persentase Surat Dinas yang ditindaklanjuti	100 %						
						1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Malang		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Malang	
			1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara 100 persen Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara 100 %		1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit 55 Unit		Kota Malang	
						1.05.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit		Kota Malang	
						1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit 24 Unit		Kota Malang	
						1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Kota Malang	
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Patroli siaga, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat dalam sehari Persentase penanganan pelanggaran Perda Rasio Poskamling per RW	100 persen 100 persen 3 kali	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban lingkungan 50 penanganan Jumlah Penanganan pengaduan K3 133 penanganan Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban , Ketentraman, dan Keindahan) 135 penanganan	1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	0 Kasus			
						1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen			
						1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3100 Orang			
						1.05.02.2.01.06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan	1 Dokumen			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan		
			1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang ditegakkan	15 Perda/Perwal		1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	0 Laporan	
							1.05.02.2.02.03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Risiko Bencana	85	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang Mendapat Informasi Rawan Bencana	100 %	1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	1865 Orang		Kota Malang
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100 %	1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	700 Orang		Kota Malang
							1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 Dokumen		
							1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Jumlah masyarakat yang mendapat layanan informasi dari Pusdalops PB	20 orang		
							1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	404 Unit		Kota Malang
							1.05.03.2.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	15 Orang		
							1.05.03.2.02.09 Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen		
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				Kota Malang

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi	100 %			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	250 Orang		
						1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	200 Orang	Kota Malang	
			1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase peraturan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun	50 %	1.05.03.2.04.06 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 Dokumen	Kota Malang	
								Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan	60 KK		
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani	100 persen	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	1.05.04.2.01.01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen		
						1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan		
						1.05.04.2.01.05 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen		
						1.05.04.2.01.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	6 Unit		
						1.05.04.2.01.07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	50 Orang		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan informasi pencegahan kebakaran	250 orang	1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	250 Orang			
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jumlah dokumen Renstra/Renja	0 Dokumen 3 Dokumen 3 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							1.06.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dokumen 4 Dokumen	Kota Malang	
							1.06.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen 1 Laporan	Kota Malang	
							1.06.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen 2 Laporan	Kota Malang	
			1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 dokumen 65 Orang/bulan	Kota Malang		
							1.06.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang akuntabel	1 Laporan 1 dokumen	Kota Malang	
			1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisasi	100 %	1.06.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kota Malang		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100 %	1.06.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah kegiatan peningkatan/ pengembangan kapasitas sumber daya aparatur Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	65 Asn 65 Orang	Semua Kab/Kota Kota Malang		
			1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100 %	1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 jenis 1 Paket	Kota Malang		
						1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peraalatan dan perlengkapan kantor	1 Paket 77 jenis	Kota Malang		
						1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/ kegiatan	2 Paket 1 kali	Kota Malang		
						1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 jenis 2 Paket	Kota Malang		
						1.06.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 exemplar 24 Dokumen	Kota Malang		
						1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat- rapat koordinasi, konsultasi keluar daerah dan jumlah makanan dan minuman	12 Laporan 12 bulan	Kota Malang		
			1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	100 %	1.06.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan kantor dan mesin lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 jenis 20 Unit	Kota Malang		
			1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100 %	1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Malang		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik dan jumlah informasi publikasi	96000 surat		
						1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telepon, air dan listrik	12 bulan		Kota Malang	
						1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			
						1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Malang	
						1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas kebersihan, keamanan dan sopir	27 orang			
			1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %	1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	82 Unit		Kota Malang	
						1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	82 unit			
						1.06.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumah Mebel yang dipelihara	15 jenis		Kota Malang	
						1.06.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit			
						1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		Kota Malang	
						1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	15 jenis			
						1.06.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		Kota Malang	
						1.06.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dibangun dan dipelihara	4 gedung			
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100 %	1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi pengumpulan uang dan barang (PUB)	50 lembaga	1.06.02.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	2 Dokumen		
							jumlah peserta sosialisasi	70 orang			
			1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang terfasilitasi	452 orang	1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	202 Orang		Kota Malang	
							jumlah pekerja sosial masyarakat yang di bina.puskesos	202 orang			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	83 Lembaga	Kota Malang	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Dan Perlindungan Jaminan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Serta Meningkatkan Kemampuan Fungsi Sosialnya	14.26 %	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	14.26 %	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial (gelandangan dan pengemis) di luar panti yang memperoleh bantuan permakanan	942 Orang 960 orang	Kota Malang	
							1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial (gelandangan dan pengemis) di luar panti yang memperoleh bantuan sandang	40 Orang 30 orang	Kota Malang	
							1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah penyandang Disabilitas terlantar yang mendapatkan alat bantu	28 Orang 20 orang	Kota Malang	
							1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial yang memperoleh layanan reunifikasi keluarga	27 Orang 150 orang	Kota Malang	
							1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	464 Orang	Kota Malang	
							1.06.04.2.01.07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran,	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk	20 Orang	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
							Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah penyandang disabilitas terlantar, 20 orang anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat memperoleh fasilitas				
							1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah penyandang disabilitas terlantar, 25 orang anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan	10 Orang		Kota Malang	
							1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis yang memperoleh layanan rujukan	10 Orang 15 orang		Kota Malang	
			1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100 %		1.06.04.2.02.01 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah layanan data dan pengaduan yang tersedia Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen 20 Orang		Kota Malang	
							1.06.04.2.02.03 Penyediaan Permakanan	Jumlah Fakir Miskin /KPM yang memperoleh bantuan permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	6400 KPM 6400 Orang		Kota Malang	
							1.06.04.2.02.04 Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sandang	90 Orang 10 orang		Kota Malang	
							1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								jumlah PMKS Lainnya yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	50 orang		
						1.06.04.2.02.12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang		Kota Malang	
							Jumlah PMKS lainnya memperoleh pelayanan reunifikasi keluarga	15 orang			
						1.06.04.2.02.13 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang		Kota Malang	
							Jumlah PMKS lainnya memperoleh pelayanan rujukan	15 orang			
						1.06.04.2.02.14 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen		Kota Malang	
							Jumlah kerjasama yang dibuat	10 lembaga			
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	75.5 %	1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak telantar yang terlayani	10 anak	1.06.05.2.01.02 Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang		Kota Malang
							Jumlah anak terlantar yang dirujuk	10 anak			
							1.06.05.2.01.03 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang		Kota Malang
							Jumlah pemantauan yang dilaksanakan	10 kali			
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin yang tervalidasi	1 dokumen	1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin yang dikelola	10150 KPM		Kota Malang
							Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	9505 Keluarga			
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	100 %	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial	100 %	1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan	jumlah korban bencana yang diberi bantuan makanan	200 orang		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	340 Orang			
							1.06.06.2.01.02 Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang memperoleh bantuan sandang	50 orang		Kota Malang

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang		
						1.06.06.2.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	Kota Malang	
			1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Tagana yang diberdayakan	100 %	1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Kota Malang	
								Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial	10 orang		
								Jumlah peserta	65 orang		
	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Terpelihara Dengan Baik	100 %	1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 makam	1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	150 Makam	Kota Malang	
								jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara	2 TMP		
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	2.07.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
								Jumlah dokumen Renja/RKT	0 dokumen		
								Jumlah dokumen Renstra	0 dokumen		
							2.07.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	0 dokumen	Kota Malang	
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22 Laporan		
							2.07.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SKM	0 dokumen	Kota Malang	
								Jumlah dokumen standar pelayanan	0 dokumen		
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		
								Jumlah sertifikasi	0 sertifikasi		
								Jumlah ZI	0 dokumen		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100 %	2.07.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang 72 Orang/bulan	Kota Malang		
						2.07.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan 5 Laporan	Kota Malang		
			2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	80 %	2.07.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 laporan 4 Laporan	Kota Malang		
			2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100 %	2.07.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 stel 0 Paket	Kota Malang		
						2.07.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	65 Orang 0 orang	Semua Kab/Kota Kota Malang		
			2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	80 %	2.07.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 jenis 1 Paket	Kota Malang		
						2.07.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 jenis 4 Paket	Kota Malang		
						2.07.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 jenis 1 Paket	Kota Malang		
						2.07.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah peraturan perundang-undangan	0 eksemplar 2 Dokumen 0 dokumen	Kota Malang		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.07.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86 Laporan		Kota Malang	
							Jumlah makanan dan minuman	0 kotak			
							Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	0 kali			
						2.07.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip	0 berkas			
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen			
			2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	100 %	2.07.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor	0 jenis		Kota Malang	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit			
			2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100 %	2.07.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	0 bulan		Kota Malang	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan			
						2.07.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bahan dan alat	0 jenis		Semua Kab/Kota Kota Malang	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan			
							Luasan ruangan yang dibersihkan	0 m2			
			2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	80 %	2.07.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 Unit		Kota Malang	
							Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	0 unit			
							Jumlah volume BBM dan pelumas	0 liter			
						2.07.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dokumen review DED MPP	0 dokumen		Kota Malang	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			
							Luasan gedung kantor yang dipelihara	0 m2			
							Rehabilitasi MPP	0 paket			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.07.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 jenis 124 Unit		Kota Malang	
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi 1 %	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pengangguran yang dilatih 404 orang		2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan peningkatan keterampilan dan produktivitas Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	0 Orang 103 Orang			
			2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang memiliki perizinan 35 lembaga		2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina Jumlah LPK yang Mengikuti Bimtek	35 Lembaga 0 LPKS			
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan 78 %	2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bursa kerja khusus (BKK) wilayah kab/kota 34 BKK		2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Jumlah peserta pembinaan Bursa Kerja Khusus	50 Orang 0 orang			
			2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi 0 orang		2.07.04.2.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya Jumlah peserta sosialisasi perlindungan PMI dan PPTKIS	0 Orang 0 Orang			
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak 11.3 %	2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan 20 %		2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan Jumlah Peserta Bimtek	0 Laporan 0 Orang			
			2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) 70 %		2.07.05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah Jumlah peserta Pembinaan	24 Perkara 0 Orang			
						2.07.05.2.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil LKS Tripartit Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	0 Dokumen 1 Lembaga			
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif	96,5 %	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah fokal point PUG	85 OPD	2.08.02.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Perangkat Daerah		
				2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	1 dokumen	2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Malang	
				2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi wanita yang terfasilitasi	23 organisasi	2.08.02.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta seminar, sosialisasi dan pelatihan	225 orang	Kota Malang	
							2.08.02.2.03.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	Kota Malang	
								Jumlah peserta Musda, seminar, pelatihan, lomba, HUT dan sekolah Kartini	400 orang		
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100 %	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terlayani	25 orang	2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Malang	
							2.08.03.2.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terlayani peserta sosialisasi	25 orang	Kota Malang	
								Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	5 Perangkat Daerah		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Kewenangan Kabupaten/Kota			
			2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan	2 lembaga	2.08.03.2.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Malang		
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Ibu Rumah Tangga yang mendapatkan peningkatan kualitas keluarga	0.06 %	2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ibu rumah tangga yang mendapatkan pelatihan	50 orang	2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Malang	
			2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan peningkatan kualitas keluarga	723 orang	2.08.04.2.02.03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Malang		
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat daerah yang menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG)	100 %	2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	2 dokumen	2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	Kota Malang	
							2.08.05.2.01.02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen IPG-IDG	1 dokumen	Kota Malang	
							Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen			
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100 %	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi	1 dokumen	2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Malang	
				2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus korban kekerasan terhadap anak yang ditangani	25 orang	2.08.07.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	Kota Malang	
							Jumlah layanan perlindungan terhadap anak	25 orang			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
						2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan peningkatan kualitas hidup anak (temu anak/KLA dan Forum anak Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	400 orang 2 Layanan		Kota Malang		
						2.08.07.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah peserta	1 Dokumen 100 orang		Kota Malang		
						2.08.07.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah peserta bimtek	1 Dokumen 400 orang		Kota Malang		
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN												
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	2.09.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.09.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen		Kota Malang	
							2.09.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan		Kota Malang	
				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100 %	2.09.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan		Kota Malang	
							2.09.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100 %	2.09.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	71 Orang	Semua Kab/Kota Kota Malang	
			2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100 %	2.09.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			Kota Malang	
						2.09.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket			Kota Malang	
						2.09.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	36 Dokumen			Kota Malang	
						2.09.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat	4311 Kotak	Kota Malang	
			2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	100 %	2.09.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit			Kota Malang	
			2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100 %	2.09.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			Kota Malang	
						2.09.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			Kota Malang	
						2.09.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			Semua Kab/Kota Kota Malang	
			2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %	2.09.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit			Kota Malang	
						2.09.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit			Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.09.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Kota Malang	
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rasio Konsumsi Pangan Lokal Non Beras Terhadap Beras	0.099 Angka	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama	2 %	2.09.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	4 Laporan		
							2.09.03.2.01.06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	60 peserta		
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pengeluaran per Kapita Makanan	645870 Rp	2.09.03.2.04.01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2 Dokumen		
							2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan 100 peserta		
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase PSAT yang layak konsumsi	2 %	2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSAT	15 PSAT	2.09.05.2.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta (Jumlah sampel) Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	100 peserta 3 Dokumen		
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun sesuai Ketentuan	100 %	2.11.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.11.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.11.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan		Kota Malang	
						2.11.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		Kota Malang	
			2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100 %	2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	772 Orang/bulan		Kota Malang	
						2.11.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14 Laporan		Kota Malang	
			2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terinventarisir	100 %	2.11.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		Kota Malang	
			2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100 %	2.11.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket		Kota Malang	
						2.11.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen			
						2.11.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		Semua Kab/Kota Kota Malang	
			2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Kantor yang terfasilitasi	100 %	2.11.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		Kota Malang	
						2.11.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		Kota Malang	
						2.11.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			
						2.11.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Malang	
							2.11.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	200 Dokumen	Kota Malang	
							2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Malang	
			2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD	100 %		2.11.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	Kota Malang	
							2.11.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		
							2.11.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 Unit	Kota Malang	
			2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Surat Dinas yang ditindaklanjuti	100 %		2.11.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Malang	
							2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Malang	
							2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Malang	
			2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %		2.11.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	277 Unit	Kota Malang	
							2.11.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	277 Unit	Kota Malang	
							2.11.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Lainnya				
							2.11.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	48 Unit	Kota Malang	
	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun dan Sesuai Standart	100 %	2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang tersusun sesuai standart	6 Dokumen	2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	3 Dokumen		
							2.11.02.2.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
				2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan	2 Dokumen	2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	0 Dokumen		
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup Persentase pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	64,81 % 64,81 %	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	35 titik	2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen		
							2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen		
							2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	3 Dokumen		
				2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Peta Kerawanan Kerusakan Lingkungan	1 Dokumen	2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan		
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas RTH Publik yang dikelola	0.87 %	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH Publik yang dikelola	95.31551461 Ha	2.11.04.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	141.34911461 Ha		
							2.11.04.2.01.05 Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Ha		
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	persentase pelaku usaha yang sudah melakukan pengelolaan limbah B3	25 %	2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Pelaku usaha yang mempunyai izin penyimpanan sementara limbah B3	20 kegiatan/usaha	2.11.05.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen		
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Masyarakat dan Kegiatan/Usaha Pemilik Izin Lingkungan	25 %	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengawasan kegiatan/usaha yang mempunyai izin lingkungan	67 kegiatan/usaha	2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	115 Dokumen		
							2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	69 Laporan		
							2.11.06.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	1 Dokumen		
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Komunitas Berbudaya Lingkungan di Kota Malang	47,5 %	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komunitas Berbudaya Lingkungan yang dibina	110 Sekolah	2.11.08.2.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	77 Lembaga		
							2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bernilai baik	33.33 %	2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RW yang melaksanakan pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai Kriteria	35 RW	2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	54 Entitas		
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan yang terselesaikan	90 %	2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan yang terselesaikan	90 %	2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	38 Dokumen		
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah Persentase Pengurangan Sampah yang berkurang di masyarakat dan Sektor Informal (Merupakan nilai kumulatif)	72 % 27 %	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Jumlah Sampah yang Tertangani	180069 ton/tahun	2.11.11.2.01.01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	2 Dokumen		
							2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauren Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauren Ulang dan Pemanfaatan Kembali	3 Laporan		
							2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sampah yang terproses di TPA	180069 Ton 177390 ton/tahun		
							2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	26500 Unit		
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	99 %	2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	4 dokumen	2.12.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.12.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Kota Malang	
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan yang disusun tepat waktu	2 dokumen	2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.12.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	2 Laporan		Kota Malang	
			2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100 %	2.12.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		Semua Kab/Kota Kota Malang	
			2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	97 %	2.12.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		Kota Malang	
						2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	85 Paket		Kota Malang	
						2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket		Kota Malang	
						2.12.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen		Kota Malang	
						2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan		Kota Malang	
			2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBM	100 %	2.12.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit		Kota Malang	
			2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	97 %	2.12.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		Kota Malang	
						2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		Kota Malang	
						2.12.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Malang	
						2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 Laporan		Semua Kab/Kota Kota	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Disediakan		Malang	
			2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %	2.12.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		Kota Malang	
						2.12.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		Kota Malang	
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	97 %	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penduduk yang memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	960387 dokumen	2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan		
							2.12.02.2.01.08 Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk	2 Dokumen		
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	94 %	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen akta kelahiran dan akta kematian	24566 dokumen	2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	3 Dokumen		
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase penduduk yang telah tertib administrasi kependudukan	96 %	2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah penduduk yang telah tertib administrasi kependudukan	984953 dokumen kependudukan	2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1 Dokumen		
	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase data hasil pelayanan selama 1 tahun	100 %	2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	profil perkembangan penduduk	1 dokumen	2.12.05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	0 Dokumen			
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR per WUS (15 s/d 49 tahun)	1.7 %	2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian	Jumlah laporan	1 laporan	2.14.02.2.01.10 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal jumlah peserta	1 Laporan 60 orang	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Kuantitas Penduduk							
			2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	4 dokumen	2.14.02.2.02.02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	jumlah data base keluarga	1 dokumen	Kota Malang		
						2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah data base keluarga	1 Dokumen	Kota Malang		
						2.14.02.2.02.13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen	Kota Malang		
						2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	Kota Malang		
						2.14.02.2.02.13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah data TPK (Tim Pendamping Keluarga)	650 TPK	Kota Malang		
						2.14.02.2.02.14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	Kota Malang		
						2.14.02.2.02.14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah sarana dan prasarana di 5 balai penyuluh KB	3 jenis	Kota Malang		
						2.14.02.2.02.14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	jumlah admin Alkon,faskes dan klinik swasta yang bina	100 orang	Kota Malang		
						2.14.02.2.02.14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	1 Laporan	Kota Malang		
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan peserta KB Aktif	75.5 %	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Pelaksanaan dan pengendalian KIE	4 kali	2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 Organisasi	Kota Malang	
							Jumlah peserta rapat koordinasi	25 orang	Kota Malang		
						2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	Kota Malang		
						2.14.03.2.01.04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah media KIE yang terfasilitasi	4 jenis	Kota Malang		
						2.14.03.2.01.04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah bahan materi KIE	3 jenis	Kota Malang		
						2.14.03.2.01.04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	Kota Malang		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.14.03.2.01.06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	5 Laporan		Kota Malang	
						2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah laporan koordinasi yang dilaksanakan	20 kali			
						2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	jumlah fasilitasi operasional Balai Penyuluh KB	12 bulan		Kota Malang	
						2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4 Laporan			
						2.14.03.2.01.08 Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan		Kota Malang	
						2.14.03.2.01.08 Pengendalian Program KKBPK	Jumlah pertemuan audit stunting	4 kali			
			2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PLKB yang aktif	36 orang	2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	jumlah kader IMP yang dibina	1368 orang		Kota Malang	
			2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	114 Orang	2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	114 Orang			
			2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase alat dan obat kontrasepsi yang terfasilitasi	100 %	2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan		Kota Malang	
			2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pengiriman alkon ke faskes	56 faskes	2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	jumlah pengiriman alkon ke faskes	56 faskes			
						2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	jumlah akseptor KB yang terlayani	5128 orang		Kota Malang	
						2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	5128 Orang			
						2.14.03.2.03.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan		Kota Malang	
						2.14.03.2.03.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah pertemuan faskes	2 kali			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Pemberdayaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan	5 organisasi	2.14.03.2.04.01 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	5 Organisasi	jumlah peserta pelayanan KB gratis	450 orang	Kota Malang	
						2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	6 Kampung	jumlah pembinaan dikampung KB	12 kali	Kota Malang	
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok UPPKS Aktif 92.75 % Persentase keluarga kelompok kegiatan Tribina aktif 85.5 %	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan	2 laporan	2.14.04.2.01.02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pengadaan sarana KIE KIT Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 paket 6 Unit			Kota Malang	
						2.14.04.2.01.03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	Jumlah peserta	125 orang	Kota Malang	
						2.14.04.2.01.05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1950 Orang	Jumlah pendamping keluarga yang terfasilitasi	1950 orang	Kota Malang	
						2.14.04.2.01.06 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6 Kelompok	Jumlah peserta sosialisasi	100 orang	Kota Malang	
						2.14.04.2.01.08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi	1 Laporan			Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
							Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah peserta	220 orang		
			2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi yang aktif dan ikut dalam kegiatan	8 organisasi	2.14.04.2.02.01 Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	jumlah peserta penguatan kelembagaan dan petugas pendataan keluarga	5 Organisasi	1260 orang	Kota Malang	
						2.14.04.2.02.03 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	jumlah peserta penguatan ketahanan keluarga, pendidikan & peningkatan ekonomi, pembinaan peningkatan kesehatan keluarga dan lingkungan dan pembinaan karakter	3 Organisasi	2955 orang	Kota Malang	
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN												
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu.	080 0%	2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	6 dokumen	2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	4 Dokumen		Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		Kota Malang	
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang terbayarkan	14 Bulan	2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	108 Orang/bulan		Kota Malang	
							2.15.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	2 Laporan		Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD			
			2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	15 jenis	2.15.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang diasuransikan	70 Unit	Kota Malang		
						2.15.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen			
						2.15.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah jenis barang milik daerah yang diidentifikasi	15 Jenis	Kota Malang		
						2.15.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan			
			2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	110 orang	2.15.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	220 stel	Kota Malang		
						2.15.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Kota Malang		
			2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang disediakan	5 jenis	2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	5 Jenis	Kota Malang		
						2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket			
						2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Jenis	Kota Malang		
						2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kota Malang		
						2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	14 Jenis	Kota Malang		
						2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket			
						2.15.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4260 Eksemplar	Kota Malang		
						2.15.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman	3676 kotak	Kota Malang		
						2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terselenggara	180 Laporan	Kota Malang		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.15.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Kota Malang	
			2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	5000 surat	2.15.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang tercatat dan terdistribusi	5000 surat		Kota Malang	
						2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Bulan		Kota Malang	
						2.15.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Jenis		Semua Kab/Kota Kota Malang	
						2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luas ruang yang dipelihara (gedung)	2 Gedung		Semua Kab/Kota Kota Malang	
			2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	5 jenis	2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	4 jenis		Kota Malang	
						2.15.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Kota Malang	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			2.15.02.2.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen			
						2.15.02.2.01.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					
			2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan yang disediakan	9 jenis	2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					
						2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	9 jenis		Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)					
			2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kontribusi retribusi pelayanan parkir 1.05 % terhadap PAD		2.15.02.2.04.01 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitas Parkir (Gedung Parkir)	1 Gedung		Kota Malang	
						2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah petugas	500 orang			
			2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					
						2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					
						2.15.02.2.05.05 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					
						2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					
			2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			2.15.02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					
						2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					
						2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota					

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.15.02.2.06.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota				
			2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				2.15.02.2.07.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				
							2.15.02.2.07.04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin				
			2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				2.15.02.2.08.02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor				
							2.15.02.2.08.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				
							2.15.02.2.08.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				
							2.15.02.2.08.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				
			2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
			2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2.15.02.2.11.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
							2.15.02.2.11.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.15.02.2.11.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survei kepuasan masyarakat 79 % Persentase dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan yang disusun tepat waktu 100 % Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 70 %	2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan 100 %		2.16.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen		Semua Kab/Kota Kota Malang		
						2.16.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kota Malang		
			2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu 100 %		2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 53 Orang/bulan		Kota Malang		
						2.16.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan		Kota Malang		
			2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi 90 %		2.16.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket		Kota Malang		
						2.16.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket		Kota Malang		
						2.16.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga 4 jenis				
						2.16.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket		Kota Malang		
						2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket		Kota Malang		
						2.16.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan 1 Dokumen		Kota Malang		
						2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan		Kota Malang		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	80 %	2.16.01.2.07.05 Pengadaan Mebel					
						2.16.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Kota Malang	
						2.16.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		Kota Malang	
			2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik dan kebersihan ruangan	12 bulan	2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		Kota Malang	
						2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Malang	
			2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	80 %	2.16.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit		Kota Malang	
						2.16.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit		Kota Malang	
						2.16.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Kota Malang	
						2.16.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit		Kota Malang	
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah/Pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota	72 %	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strakom dan SOP yang ditetapkan Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis Pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah/provinsi/Kota	81 % 61 %	2.16.02.2.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Dokumen		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah/prov/pemda sesuai dengan strakom	62 %						
						2.16.02.2.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	3 Dokumen			
						2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	5 Dokumen			
						2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik					
						2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	8 Dokumen			
						2.16.02.2.01.07 Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	2 Layanan	Semua Kab/Kota		
						2.16.02.2.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	750 Orang	Semua Kab/Kota		
						2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas					
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi informasi yang terintegrasi	86 %	2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	800 Unit	Kota Malang	
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1, Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 2, Cakupan layanan telekomunikasi 3, Prporsi rumah tangga dengan akses internet Cakupan layanan telekomunikasi Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Proporsi rumah tangga dengan akses internet	50 % 90 unit kerja 50 % 85 %	2.16.03.2.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.16.03.2.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit		Semua Kab/Kota	
						2.16.03.2.02.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen			
						2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	4 Unit			
						2.16.03.2.02.08 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	90 Layanan			
						2.16.03.2.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	5 Dokumen 0 Dokumen		Kota Malang	
						2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	0 Dokumen 1 Dokumen		Kota Malang	
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan , keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 % persen	2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan , keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 persen	2.17.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 dokumen 6 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.17.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Kota Malang	
							2.17.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil survey kepuasan masyarakat	0 dokumen	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		
			2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan Keuangan	14 bulan	2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	253 Orang/bulan		Kota Malang	
						2.17.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 dokumen 2 Laporan		Kota Malang	
			2.17.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80 persen	2.17.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 dokumen 1 Laporan		Kota Malang	
			2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.17.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah sumberdaya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	0 Orang 300 Orang 0 orang		Semua Kab/Kota Kota Malang	
			2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Internal	80 Angka	2.17.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 jenis 54 Paket		Kota Malang	
						2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 jenis 16 Paket		Kota Malang	
						2.17.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 jenis surat kabar 3 Dokumen		Kota Malang	
						2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	0 kali		
			2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80 persen	2.17.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan, perlengkapan gedung kantor	0 jenis		Kota Malang	
			2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Survey Kepuasan Internal	80 Angka	2.17.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		Kota Malang	
						2.17.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telepon, air dan listrik	0 bulan		Kota Malang	
						2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Malang	
			2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80 persen	2.17.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	0 unit		Kota Malang	
						2.17.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit		Kota Malang	
						2.17.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 jenis		Kota Malang	
						2.17.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	0 m2		Kota Malang	
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	57.94 persen	2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam	Persentase Koperasi Aktif	57.97 persen	2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Bimtek manajemen pengawasan koperasi	0 koperasi	Kota Malang	
							Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan	85 Unit Usaha			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Daerah Kabupaten/ Kota					Kabupaten/Kota					
						2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	90 Unit Usaha	0 koperasi	Kota Malang			
	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase penilaian kesehatan koperasi	91 persen	2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit koperasi yang dinilai sehat dan jumlah unit koperasi yang mengikuti sosialisasi E-penkes	353 koperasi	2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Koperasi yang dinilai sehat dan cukup sehat dan Jumlah Unit Koperasi yang mengikuti Sosialisasi E- Penkes	0 koperasi	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	353 Unit Usaha	Kota Malang	
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang dididik dan dilatih	68.51 persen	2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	688 orang	2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	dan melaksanakan rapat anggota	0 orang	Jumlah koperasi yang meningkat pemahaman, pengetahuan perkoperasian (pembentukan, perubahan, pembubaran), dan melaksanakan rapat anggota	0 koperasi	Kota Malang	
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	73.78 persen	2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	686 koperasi	2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi pameran produk unggulan	0 koperasi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi peningkatan akses permodalan	0 koperasi	Kota Malang	
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase WUB Mikro yang diberdayakan	5.40 persen	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah MOU,Perijinan UM,Peserta klinik bisnis, Peserta Inkubasi bisnis,Database UM dan Peserta Pelatihan WUB Mikro	3000 UM	2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah database usaha mikro	0 aplikasi	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1 Dokumen	Kota Malang	
								Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	686 Unit Usaha	Jumlah pertambahan WUB mikro yang tumbuh	0 persen		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
						2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah kerja sama atau MoU dari keg. Temu bisnis 0 UM	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 137 Unit Usaha	Jumlah usaha mikro yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga 0 UM	Kota Malang		
						2.17.07.2.01.03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah peserta sosialisasi perizinan penerapan, standarisasi dan sertifikasi serta penguatan/ perlindungan bagi usaha mikro 0 UM	Jumlah usaha mikro yang memiliki izin sertifikasi, dan mendapatkan perlindungan usaha 0 hak merk	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 435 Unit Usaha	Kota Malang		
						2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan ketrampilan kerja bagi Tenaga kerja dan masyarakat (calon wirausaha baru) 0 orang	Jumlah UM yang difasilitasi pendampingan pemberdayaan 0 UM	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 3765 Unit Usaha	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dengan pendampingan klinik 0 orang	Kota Malang	
						2.17.07.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 137 Orang	Jumlah stakeholder yang mengikuti forum komunikasi 0 UM		Kota Malang		
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Mikro yang naik menjadi Usaha Kecil 3.60 persen	2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi mengikuti pameran produk unggulan dan jumlah usaha mikro yang ikut dalam pengadaan barang jasa pemerintah 100 UM	2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 300 Unit Usaha	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi mengikuti pameran/pemasaran produk unggulan 0 UM	Jumlah usaha mikro yang menerapkan peningkatan mutu desain produk usaha dan manajemen keamanan pangan 0 UM	Kota Malang			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi penanaman modal	80 %	2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal	1 dokumen	2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	jumlah ranperda/ranperwal yang disusun	0 dokumen	
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah minat investor	60 %	2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	1 kali	2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah keikutsertaan dalam gelar pameran investasi	1 kali	Semua Kab/Kota Kota Malang
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Ijin Dan Non Ijin Pekerjaan Umum	90 %	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Sesuai Standar	6000 izin	2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	11000 Pelaku Usaha	Jumlah perizinan dan nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya yang diterbitkan	0 Izin	
		Persentase Penerbitan Ijin dan Non Ijin Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	90 %		Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum Sesuai Standar	5000 izin		Jumlah pengajuan izin yang ditinjau	0 Izin			
		Persentase Realisasi Target Retribusi IMB	100 %		Persentase IMB yang terbit	80 %		Jumlah Perizinan dan Nonperizinan Pekerjaan Umum yang diterbitkan	0 Izin			
							2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	300 Kegiatan Usaha	Jumlah pengajuan izin yang ditinjau	0 berkas	
							2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	50 Orang	Jumlah pengaduan yang ditangani	0 pengaduan	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	persentase ketaatan pelaku usaha wajib LKPM	80 %	2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penanaman Modal PMA dan PMDN	23 perusahaan	2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	50 Kegiatan Usaha.		
							2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	140 Pelaku Usaha		
							2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penanaman modal Profil hasil pengawasan dan BAP	140 Kegiatan Usaha 0 kali 0 proyek		
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase sistem informasi yang dapat diakses masyarakat	100 %	2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang tersedia	80 %	2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah data yang diolah Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Jumlah fitur	0 data 1 Dokumen 0 fitur		
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penanggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	2.19.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.19.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 dokumen 12 Laporan	Kota Malang	
				2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100 %	2.19.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 ASN 71 Orang/bulan	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.19.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 laporan 3 Laporan		Kota Malang	
			2.19.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100 %	2.19.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 dokumen 6 Laporan		Kota Malang	
			2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100 %	2.19.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan jumlah peserta peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0 Orang 71 Orang 0 orang		Semua Kab/Kota Kota Malang	
			2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	85 %	2.19.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 jenis 16 Paket		Kota Malang	
						2.19.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 jenis 20 Paket		Kota Malang	
						2.19.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 jenis 5 Dokumen		Kota Malang	
						2.19.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah makanan dan minuman jumlah rapat koordinasi	200 Laporan 0 kotak 0 kali		Kota Malang	
			2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	90 %	2.19.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 jenis 4 Unit		Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.19.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah kelengkapan gedung kantor jumlah meubelair Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 jenis 0 jenis 36 Unit	Kota Malang	
			2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	98 %	2.19.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	5000 Laporan 0 surat	Kota Malang		
						2.19.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan pembayaran belanja Telpon,Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 bulan 12 Laporan	Kota Malang		
						2.19.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan jumlah luasan yang di bersihkan	12 Laporan 0 m2	Semua Kab/Kota Kota Malang		
			2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	85 %	2.19.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya jumlah kendaraan/operasional yang terawat dengan baik jumlah volume bbm dan pelumas	21 Unit 0 kendaraan 0 liter	Kota Malang		
						2.19.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit 58 Unit	Kota Malang		
						2.19.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	1 Unit 0 paket	Kota Malang		
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda Kota malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	1 %	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	641 orang	2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya jumlah pemuda pelopor yang terpilih	5 Orang 0 pemuda		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	0 pemuda 250 Orang			
						2.19.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya jumlah pemuda peserta ketrampilan	70 Orang 0 pemuda			
						2.19.02.2.01.04 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan jumlah peserta sosialisasi	232 Orang 0 pemuda			
						2.19.02.2.01.05 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah dokumen data potensi pemuda Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	0 dokumen 1 Dokumen			
						2.19.02.2.01.08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	jumlah pemuda terpilih Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	0 orang 6 Orang			
						2.19.02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	jumlah paskibraka terpilih Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	0 paskibraka 78 Orang			
			2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan	24.005 %	2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan jumlah lembaga yang terakomodasi	1 Dokumen 0 lembaga			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Kabupaten/Kota				jumlah pengurus OKP yang menjadi peserta	0 pemuda		
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga	0.16 %	2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	5 event	2.19.03.2.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dokumen		
								jumlah kegiatan	0 kegiatan		
							2.19.03.2.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	jumlah kegiatan keolahragaan yang terfasilitasi	0 kegiatan		
								Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	70 Orang		
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah cabor yang dibina dan dikembangkan dalam bidang keolahragaan yang berprestasi	14 cabang olahraga	2.19.03.2.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	70 Orang		
								jumlah cabang olahraga	0 cabang olahraga		
								jumlah olahraga prestasi yang di bina	0 cabang olahraga		
				2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	70 medali	2.19.03.2.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	0 Organisasi		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 organisasi		
								jumlah organisasi keolahragaan yang mendapat pembinaan	0 organisasi		
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dikembangkan	6 paket	2.19.03.2.05.02 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	0 Laporan		
								Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan		
								jumlah olahraga rekreasi yang dibina	0 cabor		
							2.19.03.2.05.03 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana	0 paket		
								jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok	0 paket		
								jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	0 paket		
								jumlah kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olahraga	0 paket		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	4 Unit		
						2.19.03.2.05.05 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	6 Dokumen		
								jumlah olahraga tradisional yang dibina	0 jenis		
								jumlah olahraga tradisional yang mengikuti invitasi	0 jenis		
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pertumbuhan anggota pramuka di Kota Malang	12.10 %	2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah anggota yang aktif dalam kegiatan kepramukaan	21180 orang	2.19.04.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	jumlah anggota yang mengikuti pembinaan	0 orang		
								Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	6 Organisasi		
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	prosentase keterisian E Database SIPD	70 %	2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen		
					Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi	80 %	2.20.02.2.01.02 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				
							2.20.02.2.01.03 Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen		
							2.20.02.2.01.04 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral				
							2.20.02.2.01.05 Pengembangan Infrastruktur				
							2.20.02.2.01.06 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen		
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK	Persentase tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	29 %	2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding	80 %	2.21.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi				

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	PENGAMANAN INFORMASI			Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan		Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
							2.21.02.2.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
							2.21.02.2.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				
							2.21.02.2.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
				2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan 50 %		2.21.02.2.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	28 Perangkat Daerah		
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	presentase kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dibina	59 %	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengelilaan kebudayaan yang melibatkan masyarakat	1 kegiatan	2.22.02.2.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	150 Orang		
				2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelestarian kesenian tradisional yang melibatkan masyarakat	2 kegiatan	2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	50 Objek		
							2.22.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	7 Sertifikat		
				2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pembinaan lembaga adat	1 kegiatan	2.22.02.2.03.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	0 Objek		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	presentase peningkatan lembaga kesenian tradisional yang aktif	38 %	2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pembinaan kesenian yang melibatkan masyarakat	2 kegiatan	2.22.03.2.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	10 Orang		
							2.22.03.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	300 Lembaga		
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	presentase peningkatan pelaku sejarah	14 %	2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pembinaan sejarawan lokal	1 kegiatan	2.22.04.2.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	200 Orang		
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	presentase cagar budaya yang dilestarikan	10 %	2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pengelolaan cagar budaya	1 kegiatan	2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	35 Objek		
	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	presentase peningkatan pengunjung museum	45 %	2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah museum yang dikelola	2 museum	2.22.06.2.01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	10 Unit		
							2.22.06.2.01.05 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	10 Unit		
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN											
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi kinerja	4 dokumen	2.23.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Renja dan Renstra	3 Dokumen 0 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.23.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 dokumen 12 Laporan	Kota Malang	
				2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan	13 laporan	2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan 48 Orang/bulan	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.23.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	0 dokumen	Kota Malang	
			2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan administrasi barang milik daerah	1 laporan	2.23.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan administrasi barang milik daerah pada SKPD	0 dokumen	1 Laporan	Kota Malang	
			2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	2 orang	2.23.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	0 orang	2 Orang	Semua Kab/Kota Kota Malang	
			2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum	4 kegiatan	2.23.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis pengadaan Komponen Listrik	10 jenis	1 Paket	Kota Malang	
						2.23.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	72 jenis	1 Paket	Kota Malang	
						2.23.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	8 jenis	1 Paket	Kota Malang	
						2.23.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	0 kali	Kota Malang	
			2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	28 unit	2.23.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	0 jenis	28 Unit	Kota Malang	
						2.23.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan yang dibangun	0 gedung	0 Unit		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan penunjang urusan Pemerintah Daerah	3 kegiatan	2.23.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Malang	
							2.23.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran telpon, air dan listrik	0 bulan	Kota Malang	
							2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah hari melaksanakan kebersihan kantor	0 hari	Semua Kab/Kota Kota Malang	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah	4 kegiatan	2.23.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	Kota Malang	
							2.23.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis meubelair yang dipelihara	0 jenis	Kota Malang	
							2.23.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	Kota Malang	
							2.23.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	113 Unit	Kota Malang	
							2.23.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	0 jenis	Kota Malang	
							2.23.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Malang	
							2.23.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang Dipelihara	0 paket	Kota Malang	
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase cakupan wilayah operasional perpustakaan keliling di 57 kelurahan	100 %	2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	40 %	2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	155 Perpustakaan	Kota Malang	
		Persentase peningkatan koleksi yang terdigitalisasi	100 %				2.23.02.2.01.04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	196 Perpustakaan	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Perpustakaan				
							2.23.02.2.01.08 Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan jumlah bahan perpustakaan yang diadakan	1600 Eksemplar 0 eksemplar	Kota Malang	
							2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan Jumlah bahan perpustakaan yang diolah dan dipreservasi	10000 Eksemplar 0 eksemplar		
							2.23.02.2.01.10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Kota Malang	
			2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat gemar membaca di masyarakat	6 kegiatan		2.23.02.2.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	6 Lokus	Kota Malang	
							2.23.02.2.02.02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	Kota Malang	
							2.23.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota Jumlah Peserta Lomba	0 Orang 50 Peserta		
							2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	50 Perpustakaan	Kota Malang	
	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno 5 % yang dilestarikan	2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi atau dialih media (digitalisasi/terdaftar yang ada di wilayahnya)	2 naskah		2.23.03.2.01.01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno jumlah pemilik naskah kuno di Kota Malang	2 Orang 0 orang		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN											
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase dokumen arsip yang wajib dikelola sesuai kaidah kearsipan	42 %	2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD atau Kelurahan yang sudah menerapkan pengelolaan arsip sesuai kaidah kearsipan	41 PD/Kelurahan	2.24.02.2.01.01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	10 Berkas		
				2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD atau Kelurahan yang sudah menyerahkan arsip statis	10 PD/Kelurahan	2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	8000 Arsip		
				2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah penambahan database online	100 database	2.24.02.2.03.01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	240 Pengguna		
	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan penyelamatan arsip	13 %	2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah perangkat daerah yang digabungkan dan atau dibubarkan	1 PD	2.24.03.2.03.01 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Daftar		
								Jumlah daftar arsip yang disusun	1 daftar		
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan	2,50 %	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya)	143.44 Ton	3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	63 Kelompok		
								Jumlah peserta	637 peserta		
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah benih budidaya air tawar yang diproduksi	246.67 Ton	3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis sarana pembenihan	4 jenis sarana		
								Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit		
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penambahan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang memenuhi persyaratan dan standard	13 Pelaku Usaha	3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pengolah dan pemasar ikan skala mikro dan kecil yang menerima peningkatan kapasitas	60 Orang	3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	70 Unit Usaha		
								Penambahan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang memenuhi persyaratan dan standard	13 pelaku usaha		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA											
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Wisata Yang Dibina	65 %	3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dibina	43 daya tarik wisata	3.26.02.2.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	jumlah daya tarik wisata yang dilaksanakan	0 event		
								Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	40 Lokasi		
								Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	0 Lokasi		
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	25 fasilitas	3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	40 Lokasi		
								jumlah pedagang wisata belanja tugu dan pedagang night market yang dibina	0 pedagang		
								Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	0 peserta		
							3.26.02.2.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana	0 paket		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	23 Unit		
							3.26.02.2.03.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan		
								jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan	0 pelaku		
								jumlah peserta yang berpartisipasi dalam event pariwisata	0 peserta		
							3.26.02.2.03.07 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	11 Lokasi		
				3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten / kota	2120 TDUP	3.26.02.2.04.03 Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	1 Laporan		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam sosialisasi	0 pelaku		
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pemasaran Pariwisata	60 %	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berpartisipasi pada even pariwisata	106 pelaku	3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang di promosikan jumlah peserta pameran dan bazar	14 Laporan 0 pelaku 0 pelaku		
	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif pada 7 subsektor yang mendapat pembekalan sertifikasi HKI	16 %	3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah peserta sosialisasi dan bimtek HKI	70 peserta	3.26.04.2.02.08 Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif jumlah pelaku ekonomi kreatif yang siap mengikuti sertifikasi HKI	1 Dokumen 0 pelaku ekraf		
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pengembangan ekonomi kreatif	50 %	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dibina	205 pelaku	3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	0 peserta 35 Orang		
							3.26.05.2.01.02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah duta wisata yang dipilih dan diberdayakan Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti event pariwisata Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	0 duta wisata 725 Orang 0 pelaku 0 peserta		
							3.26.05.2.01.05 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif jumlah pelaku ekraf yang terwadahi dan terbina di promosi dan eksebisi jumlah peserta pelaku ekonomi kreatif yang di bina	2 Laporan 0 pelaku 0 komunitas		
							3.26.05.2.01.06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	jumlah peserta kreatif yang di bina dan di berdayakan Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	0 pelaku 0 Orang		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
								Ekonomi Kreatif					
			3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti pengembangan kapasitas	35 peserta	3.26.05.2.02.01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	35 Orang	jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memanfaatkan digitalisasi	0 peserta			
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi pertanian	64611.19 Ton	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah jenis sarana pertanian yang diberikan	4 Jenis	3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah jenis alat mesin pertanian	2 Jenis Alat Mesin	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3 Laporan		
							3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Jenis Bantuan	2 jenis				
				3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerapan teknologi peternakan	1 Angka	3.27.02.2.05.05 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	2.88 Ton	Jumlah pelayanan inseminasi buatan	210 pelayanan		
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian dalam kondisi baik / Jumlah Prasarana Pertanian Keseluruhan X 100%	83 %	3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana pertanian yang terbangun	1 Prasarana	3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	7 Unit (Meter Persegi))	Jumlah jaringan irigasi yang terbangun	7 Unit (Meter Persegi)		
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan	2 %	3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	2 %	3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Hewan yang Diperiksa	1440 Ekor	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	12 Laporan		
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pengawasan peredaran produk hewan	1821 Ekor	3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	Jumlah Peserta	50 peserta		
							3.27.04.2.04.02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah contoh pangan asal hewan yang diperiksa	2230 contoh	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kenaikan Skor Kelompok Tani	1000 Angka	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh pertanian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	30 Orang	3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Dokumen Programa	6 dokumen		
							3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Poktan/Gapoktan yang mendapatkan peningkatan kemampuan	41 Poktan/gapoktan		
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Peningkatan Fasilitas Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan	100 persen	3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah gudang yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	25 gudang	3.30.02.2.02.01 Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	10 Dokumen	Kota Malang	
				3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	jumlah penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri	5 STPW	3.30.02.2.03.01 Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	5 Dokumen	Kota Malang	
				3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	jumlah pembinaan dan pengawasan minuman beralkohol	5 kali	3.30.02.2.05.01 Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah izin usaha minuman keras	0 toko	Kota Malang	
								Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 Dokumen		
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase penetapan pasar rakyat yang ber SNI	7.69 persen	3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang bersih dan layak	20 pasar	3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dipelihara	0 pasar rakyat	Kota Malang	
								Jumlah pasar yang direvitalisasi	0 pasar rakyat		
								Jumlah pedagang yang akan didata	0 pedagang		
								Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi	0 kali		
								Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	6 Unit		
								umlah pedagang yang ditampung saat revitalisasi	0 pedagang		
							3.30.03.2.01.02 Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	16 Unit	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
								Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan operasional	0 jenis			
			3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah peserta Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	50 orang	3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	0 UKM commers	Kota Malang		
						3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	0 toko modern	Kota Malang		
							Jumlah pelaksanaan monitoring terhadap target retribusi daerah	0 kali	Jumlah PKL yang menerima penyuluhan	0 PKL		
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	1.75 persen	3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	365 hari	3.30.04.2.02.02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Informasi harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya berbasis online	0 hari	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 Laporan	
							Jumlah pemantauan ketersediaan/distribusi bahan pokok dan bahan penting lainnya	0 kali	Jumlah penayangan informasi harga barang pokok dan bahan penting lainnya di media	0 kali		
							3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kota Malang		
							Jumlah pengadaan pasar murah	0 kali				
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan atau fasilitasi pengembangan ekspor	0.70 persen	3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKM yang mengikuti misi dagang	14 UKM	3.30.05.2.01.04 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	80 Pelaku Usaha	Kota Malang		
							Jumlah produk unggulan ekspor yang mengikuti misi dagang	0 produk				

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase jumlah alat UTTTP yang di tera dan terra ulang	13400 UTTTP	3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah pengawasan alat UTTTP	10 Lokasi	3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	13400 Unit	Kota Malang	
							3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaksanaan pengawasan ukur ulang barang non BDKT	0 kali	Kota Malang	
								Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	0 Orang		
								Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	400 Orang		
								Jumlah peserta penyuluhan kemetrologian	0 peserta		
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk UKM yang difasilitasi dengan promosi pemasaran	1.50 persen	3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UKM yang terfasilitasi	50 UKM	3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UKM yang mengikuti pameran	0 UKM	Kota Malang	
								Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30 UMKM		
							3.30.07.2.01.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 Dokumen	Kota Malang	
								Jumlah UKM yang di data	0 data		
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Jumlah IKM	5 persen	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan dalam RIPIK yang dilaksanakan	15 kegiatan	3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	Kota Malang	
								Jumlah sasaran pembangunan sumber daya manusia industri, pengembangan dan pemanfaatan teknologi serta pemanfaatan dan jaminan ketersediaan sumber daya alam	0 dokumen		
								Jumlah sasaran pembangunan sumber daya manusia industri, pengembangan dan pemanfaatan teknologi serta pemanfaatan dan jaminan ketersediaan sumber daya alam	0 IKM		
							3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah penerima fasilitasi standarisasi 0 IKM dan pengembangan perwilayahan industri			
						3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	Kota Malang		
						3.31.02.2.01.06 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	Kota Malang		
						3.31.02.2.01.06 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen evaluasi rencana pembangunan industri Kota Malang	0 dokumen			
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase izin usaha industri yang diawasi	100 persen	3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Data IKM yang diawasi perijinannya	100 IKM	3.31.03.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Malang	
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase informasi industri yang lengkap dan terkini	1 sistem	3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sistem informasi industri yang dimutakhirkan	1 sistem	3.31.04.2.01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	Kota Malang	
4.01 SEKRETARIAT DAERAH											
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Survei Internal Organisasi Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,3 nilai 1 Laporan	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	1 Laporan 100 persen	4.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Daerah yang disusun sesuai ketentuan							
						4.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Kota Malang	
			4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100 %	4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan		Kota Malang	
						4.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan		Kota Malang	
			4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100 %	4.01.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen		Kota Malang	
						4.01.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan			
						4.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan		Kota Malang	
			4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100 %	4.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket		Kota Malang	
						4.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		Semua Kab/Kota Kota Malang	
			4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100 %	4.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket		Kota Malang	
						4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket		Kota Malang	
						4.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket			
						4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket		Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket		Kota Malang	
						4.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket			
						4.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0 Laporan		Kota Malang	
						4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan		Kota Malang	
			4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	80 %	4.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		Kota Malang	
						4.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit			
						4.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit			
						4.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		Kota Malang	
						4.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit			
			4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100 %	4.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan		Kota Malang	
						4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan		Kota Malang	
						4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Malang	
						4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	80 %	4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit		Kota Malang	
						4.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit		Kota Malang	
						4.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit		Kota Malang	
						4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit		Kota Malang	
						4.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit		Kota Malang	
						4.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit			
			4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi layanan administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan	2 jenis layanan	4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Orang/Bulan			
				Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tepat waktu	100 %						
						4.01.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Orang/Bulan			
			4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Jumlah fasilitasi layanan kerumahtangaan kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretariat daerah sesuai ketentuan	180 paket	4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	0 Paket			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						4.01.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	0 Paket			
						4.01.01.2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	0 Paket			
			4.01.01.2.13 Penataan Organisasi			4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen hasil monev tusi perangkat daerah Jumlah dokumen kebijakan bidang kelembagaan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan	0 ranperwal 0 dokumen 3 Dokumen 0 dokumen			
						4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik Jumlah kebijakan bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	0 dokumen 0 ranperwal 5 Laporan			
						4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen hasil monev RB Jumlah dokumen monev SPIP Sekretariat Daerah Jumlah dokumen pengembangan kinerja dan reformasi birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 3 Dokumen			
						4.01.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen monev pelayanan publik Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	0 dokumen 3 Dokumen			
						4.01.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kota Malang	1 Dokumen 0 dokumen			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah layanan keprotokolan	700 layanan			
						4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan			
						4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah dokumen kebijakan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	0 dokumen 4 Laporan			
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Tata Pemerintahan	15 Dokumen	4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Tata Pemerintahan	15 Dokumen	4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	5 Dokumen		
						4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen			
						4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah					
			4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 Dokumen 0 Dokumen			
						4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Kebijakan Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	0 Dokumen 4 Dokumen			
						4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	0 Dokumen 6 Dokumen			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah dokumen fasilitasi dan koordinasi hukum yang sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku	10 dokumen	4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah dokumen usulan program pembentukan Perda dari Pemerintah Kota Malang	5 dokumen			
						4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah dokumen hasil fasilitasi permasalahan hukum	1 dokumen			
						4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah dokumen laporan fasilitasi	2 dokumen			
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	43 Kasus			
							Jumlah peserta bimbingan teknis TUN	0 orang			
							Jumlah sidang penegakan hukum daerah	11 sidang			
							Jumlah sidang perkara di Badan Peradilan	150 sidang			
							Jumlah buku himpunan perda yang dicetak	0 buku			
							Jumlah peserta Kadarkum	300 orang			
							Jumlah peserta Penyampaian Informasi Perda	500 orang			
							Jumlah peserta Penyuluhan Hukum	500 orang			
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	24 Dokumen			
							Jumlah produk hukum yang digitalisasi	4 dokumen			
							Jumlah rekomendasi perubahan perda perwal	10 produk hukum			
			4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	20 Dokumen	4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri					
	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Peresentase kebijakan bidang perekonomian, infrastruktur dan SDA yang ditindaklanjuti	100 %	4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian	2 dokume	4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen monev kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	1 dokumen		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah dokumen pengembangan kebijakan bidang perekonomian	2 dokumen		
			4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	5 Laporan		4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				
			4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan	100 %		4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	200 Dokumen		
							4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	7 Dokumen		
							4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	700 Orang		
			4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	1 Jumlah Dokumen pemanataan evaluasi dan penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan Program SDA	1 dokumen 1 dokumen		4.01.03.2.04.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	1 dokumen		
4.02 SEKRETARIAT DPRD											
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	0100 %	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai kebutuhan	85 %	4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							4.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0 dokumen	Kota Malang	
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	90 %	4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	Kota Malang	
							4.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	0 kali		
								Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	0 dokumen	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		
						4.02.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan	0 dokumen		
								Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen		
			4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	90 %	4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Malang	
								jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	0 jenis		
						4.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah jenis peralatan rumah tangga	0 bagian		
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		
						4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik kantor	0 jenis	Kota Malang	
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		
						4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan	0 jenis	Kota Malang	
								Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		
						4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0 jenis	Kota Malang	
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		
						4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan	Kota Malang	
								Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	0 jenis		
			4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	70 %	4.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	0 jenis	Kota Malang	
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit		
			4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	90 %	4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air		Jumlah bulan pembayaran belanja telepon, air, listrik	0 bulan	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Pemerintahan Daerah			dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			
						4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 jenis 7 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Malang		
			4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	80 %	4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 kendaraan	Kota Malang		
						4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 jenis 5 Unit	Kota Malang		
						4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	2 Unit 0 jenis	Kota Malang		
			4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Presentase pelayanan administrasi yang tepat waktu	90 %	4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	45 Orang/Bulan 0 bulan			
						4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas dan atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	0 stel 3 Paket			
						4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah medical check up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	0 orang 45 Orang			
			4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD yang disediakan	22 paket	4.02.01.2.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah jenis kebutuhan rumah tangga DPRD Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	0 jenis 22 Paket			
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN	Persentase pelaksanaan pembahasan ranperda	100 %	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan	Jumlah pemenuhan kelengkapan administrasi	26 dokumen	4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program	2 Dokumen		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
	PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			Peraturan DPRD			Pembentukan Peraturan Daerah	Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Program Pembentukan Peraturan Daerah	0 keputusan		
							4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	jumlah dokumen rancangan peraturan daerah	6 Dokumen 0 keputusan		
							4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	jumlah dokumen naskah akademik	4 Dokumen 0 dokumen		
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Ketepatan jadwal pembahasan anggaran	5 dokumen	4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	1 Dokumen 0 dokumen		
							4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen 0 dokumen		
							4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD	jumlah dokumen APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	0 dokumen 1 Dokumen		
							4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan	jumlah dokumen APBD perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	0 dokumen 1 Dokumen		
							4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	jumlah dokumen pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen 0 dokumen		
				4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan yang tepat waktu	80 %	4.02.02.2.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	jumlah pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	10 Laporan 0 kali		
							4.02.02.2.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		10 Laporan		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	0 kali		
						4.02.02.2.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	10 Laporan		
								jumlah pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	0 kali		
						4.02.02.2.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	10 Laporan		
								jumlah pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	0 kali		
						4.02.02.2.03.08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Jumlah dokumen Laporan Pertanggungjawaban kepala Daerah	0 dokumen		
								Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen		
			4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase kapasitas DPRD	95 %	4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	213 Dokumen		
								Jumlah pendalaman tugas DPRD	0 kali		
						4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	31 Dokumen		
								jumlah publikasi dan dokumentasi Dewan	0 jenis		
						4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	9 Orang		
								jumlah penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	0 orang		
						4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		jumlah tenaga ahli fraksi	0 orang/bulan		
								Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang		
						4.02.02.2.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5 Dokumen		
								jumlah penyelenggaraan hubungan masyarakat	0 jenis		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD jumlah laporan kinerja DPRD	1 Dokumen 0 dokumen		
			4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah penghimpunan Aspirasi	136 dokumen		4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	jumlah dokumen laporan semester Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	0 dokumen 1 Dokumen		
							4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses jumlah pelaksanaan reses	135 Dokumen 0 kali		
			4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	persentase pelaksanaan administrasi pengawasan kode etik DPRD	100 %		4.02.02.2.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD jumlah penyusunan kode etik DPRD	0 Dokumen 0 dokumen		
			4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah pelaksanaan administrasi fasilitasi tugas DPRD	588 dokumen		4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	384 Dokumen 0 kali		
							4.02.02.2.08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah pelaksanaan badan musyawarah	0 Dokumen 0 kali		
							4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD jumlah fasilitasi tugas pimpinan DPRD	192 Dokumen 0 kali		
5.01 PERENCANAAN											
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penanggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100 %	5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	Kota Malang	
							5.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	700 Dokumen	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100 %	5.01.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	26 Dokumen		Kota Malang	
						5.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan		Kota Malang	
			5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100 %	5.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	48 Orang		Semua Kab/Kota Kota Malang	
			5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100 %	5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket		Kota Malang	
						5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	79 Paket		Kota Malang	
						5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket		Kota Malang	
						5.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen		Kota Malang	
						5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan		Kota Malang	
			5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	100 %	5.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		Kota Malang	
			5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100 %	5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan 250 Laporan		Kota Malang	
						5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan 1 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %	5.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	8000 liter	Kota Malang	
						5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit		Kota Malang	
						5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Kota Malang	
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPDP	100 %	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang sesuai ketentuan	3 dokumen	5.01.02.2.01.01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	Kota Malang	
						5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	225 orang	Kota Malang	
						5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	225 orang		
						5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPDP/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen		Kota Malang	
				5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah tahapan pemantauan/ pemutakhiran data dan informasi perencanaan	4 tahapan	5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen		
				5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat capaian kinerja output perangkat daerah dengan kriteria sangat tinggi	80 %	5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	112 Laporan	Kota Malang	
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI	Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan	100 %	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan	Persentase rekomendasi pengendalian dokumen perencanaan perangkat daerah	100 %	5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir	42 Dokumen		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pembangunan Manusia yang sesuai dengan tahapan dan tata cara.		Pembangunan Manusia	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Renstra dan Renja) yang ditindaklanjuti		Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
							5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	30 Laporan		
							5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	16 Laporan		
							5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12 Laporan		
							5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan		
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase rekomendasi pengendalian dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Renstra dan Renja) yang ditindaklanjuti	100 %	5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16 Dokumen		
							5.01.03.2.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	18 Laporan		
							5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan		
							5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan				

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan		
							5.01.03.2.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	12 Laporan		
							5.01.03.2.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan		
							5.01.03.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan		
			5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase kesesuaian muatan perencanaan (Renja PD) dengan RTRW	100 %		5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16 Dokumen		
							5.01.03.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6 Laporan		
							5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	8 Laporan		
							5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan		
							5.01.03.2.03.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	30 Laporan		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	6 Laporan			
						5.01.03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan			
5.02 KEUANGAN											
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kepuasan Internal 80 Angka Nilai survey kepuasan internal 80.8 - Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu 100 % Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 100 % Persentase sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100 %	80 Angka 80.8 - 100 % 100 % 100 %	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan 100 % Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan 100 %	100 % 100 %	5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen Jumlah dokumen Renja/RKT & Renstra 0 Dokumen	2 Dokumen 3 Dokumen 0 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Malang	
							5.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat, Jumlah sertifikasi, Jumlah ZI Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Dokumen 4 Laporan	Kota Malang	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100 %	5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 ASN 52 Orang/bulan 75 Orang/bulan	Kota Malang	
							5.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						5.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Dokumen 161 Laporan		Kota Malang	
			5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100 %	5.02.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	71 Unit 1 Dokumen 12 Dokumen		Kota Malang	
			5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	80.8 % 100 %	5.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	94 Orang 0 ASN		Semua Kab/Kota Kota Malang	
						5.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang		Kota Malang	
			5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100 %	5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Jenis 1 Paket		Kota Malang	
						5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	67 Jenis 3 Paket 6 Paket		Kota Malang	
						5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	1 Paket 2 Paket 9 Kali		Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan 15 Jenis Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket		Kota Malang	
							5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9 Jenis Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2571 Dokumen		Kota Malang	
							5.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu 12 Kali Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan		Kota Malang	
							5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 Laporan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120 Laporan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 24 Kali		Kota Malang	
			5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD 100 %			5.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit		Kota Malang	
							5.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor 15 Jenis Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 430 Unit		Kota Malang	
			5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti 100 %			5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik 5000 Surat		Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan 3 Laporan 12 Laporan		Kota Malang	
						5.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Malang	
						5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Luasan ruangan yang dibersihkan	1 Laporan 12 Laporan 850 m2		Semua Kab/Kota Kota Malang	
			5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %	5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di pelihara	38 Unit 64 Unit 0 Unit		Kota Malang	
						5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	98 Unit 9 Jenis		Kota Malang	
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	100 %	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	100 %	5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Kota Malang	
							5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen		Kota Malang	
						5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		Kota Malang	
						5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	6 Dokumen		Kota Malang	
						5.02.02.2.01.13 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	132 Orang		Kota Malang	
			5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase kesesuaian proses penerbitan SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %	5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen		Kota Malang	
						5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	516 Dokumen		Kota Malang	
						5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen		Kota Malang	
						5.02.02.2.02.06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 Dokumen		Kota Malang	
						5.02.02.2.02.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen		Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.02.2.02.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	190 Orang	Kota Malang	
			5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase L/K SKPD Yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100 %		5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	Kota Malang	
							5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kota Malang	
							5.02.02.2.03.07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4 Dokumen	Kota Malang	
							5.02.02.2.03.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Kota Malang	
			5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase terpenuhinya dana darurat dan mendesak	100 %		5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5 Laporan	Kota Malang	
			5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase ketersediaan data dalam Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	100 %		5.02.02.2.05.03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	132 Orang	Kota Malang	
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD	1.02 %	5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD Berupa Tanah Yang Telah Bersertifikat	60.12 %	5.02.03.2.01.04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Kota Malang	
							5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	Kota Malang	
							5.02.03.2.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah obyek aset dan barang milik daerah yang terinventarisasi	0 obyek		
						5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen papan himbauan/patok yang terpasang Jumlah dokumen pengakuan aset tanah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah sertifikat	0 papan 0 dokumen 3 Laporan 0 sertifikat		Kota Malang	
						5.02.03.2.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil penilaian BMD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	0 dokumen 10 Laporan		Kota Malang	
						5.02.03.2.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan yang tersusun Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	0 dokumen 2 Laporan		Kota Malang	
						5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	150 Dokumen		Kota Malang	
						5.02.03.2.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah entitas peserta rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	0 entitas 132 Laporan		Kota Malang	
						5.02.03.2.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan BMD Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	0 dokumen 2 Laporan		Kota Malang	
						5.02.03.2.01.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	132 Orang		Kota Malang	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kontribusi pajak daerah terhadap PAD persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Persentase penurunan piutang pajak daerah	84,16 % 17,23 % 26.21 %	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jenis Pajak Daerah Yang Dikelola 9 Jenis Pajak Daerah	5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pengembangan Daerah serta Dokumen Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	0 Dokumen			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen		
						5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah wajib pajak yang tersosialisasi	7 Laporan 80000 WP			
						5.02.04.2.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sistem Informasi Pengelolaan pajak Daerah yang Terintegrasi dan Terpelihara	4 Unit 4 Aplikasi			
						5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Jumlah pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah	12 Laporan 1200 WP			
						5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1. Jumlah Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah I; 2. Jumlah pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah II Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	321508 Berkas 12 Laporan			
						5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Jumlah penetapan wajib pajak daerah	12 Dokumen 60000 WP			
						5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Jumlah penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	12 Dokumen 40000 WP			
						5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Jumlah piutang yang tertagih	2300 Dokumen 59997860546.98 Rupiah			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						5.02.04.2.01.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	900 Dokumen			
						5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1200 Dokumen			
						5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan			
							Jumlah Pembinaan dan Pengawasan dan Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Dokumen			
5.03 KEPEGAWAIAN											
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	0 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	0 dokumen	Kota Malang	
				5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100 %	5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	0 orang	Kota Malang	
							5.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	450 Dokumen	Kota Malang	
							5.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	0 dokumen	Kota Malang	
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan		
								Jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan	450 dokumen		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		
			5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100 %	5.03.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah	0 unit	Kota Malang		
			5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100 %	5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	Kota Malang		
						5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor	0 buah	Kota Malang		
						5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Malang		
						5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Malang		
						5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	0 buah	Kota Malang		
						5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Malang		
						5.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0 buah	Kota Malang		
						5.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1800 Dokumen	Kota Malang		
						5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Kota Malang		
						5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	0 kali	Kota Malang		
			5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	100 %	5.03.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kota Malang		
						5.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan	0 unit	Kota Malang		
						5.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kota Malang		
			5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100 %	5.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4000 Laporan	Kota Malang		
						5.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar	0 dokumen	Kota Malang		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 bulan 12 Laporan		Kota Malang	
						5.03.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan sewa peralatan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 bulan 12 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Malang	
						5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah bulan pelayanan umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 bulan 12 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Malang	
			5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %	5.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	23 Unit 0 unit		Kota Malang	
						5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit 67 Unit 0 unit		Kota Malang	
						5.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi jumlah pemeliharaan gedung	1 Unit 0 gedung		Kota Malang	
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase terisinya jab struktural dan pelaksana	63 %	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah pengadaan dan pemberhentian pegawai	1411 orang	5.03.02.2.01.04 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah ASN yg diterima Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	0 orang 1 Laporan		
							5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Pensiun dan MPP	454 Dokumen 0 orang		
							5.03.02.2.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi Jumlah peserta fasilitasi profesi	42 Lembaga 1400 orang		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data informasi kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	9400 data 5 Dokumen			
			5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah mutasi kepegawaian	2100 orang	5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah kenaikan pangkat tepat waktu Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	0 orang 1100 Dokumen			
						5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Mutasi ASN	1000 Dokumen 0 orang			
			5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang dipetakan berdasarkan dengan kompetensinya Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1898 orang 35 % 15 %	5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya Jumlah Peserta Ujian KPPI dan Ujian Dinas	91 Orang 0 orang			
						5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center Jumlah peserta assessment	1 Dokumen 75 orang			
						5.03.02.2.03.07 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN Jumlah peserta evaluasi diklat	1 Laporan 76 orang			
						5.03.02.2.03.10 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN Jumlah peserta JF	4 Orang 0 orang			
						5.03.02.2.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah peserta sosialisasi Jabatan fungsional	200 orang			
			5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang dievaluasi Jumlah pelanggaran disiplin yg telah terselesaikan	6600 ASN 18 kasus	5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah asistensi penilaian kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0 orang 1 Dokumen			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						5.03.02.2.04.03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti evaluasi hasil penilaian kinerja Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0 orang 1 Laporan			
						5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN terfasilitasi disiplin dan tambahan penghasilan Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	0 orang 200 Orang			
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	83,35 %	5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	76 %	5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Jumlah peserta diklat	71 Orang 0 orang		
				5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Peserta Diklat PIM IV, PIM III, PIM II, prajabatan	68 orang	5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Peserta Diklat PIM IV, PIM III, PIM II, prajabatan	3 Laporan 63 orang		
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan	80 %	5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	2 dokumen	5.05.02.2.01.01 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	2 Laporan	Kota Malang	
				5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	1 dokumen	5.05.02.2.02.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	Kota Malang	
				5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	2 dokumen	5.05.02.2.03.02 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	2 Dokumen	Kota Malang	
							5.05.02.2.03.09 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1 dokumen	5.05.02.2.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	Kota Malang		
						5.05.02.2.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Laporan	Kota Malang		
6.01 INSPEKTORAT DAERAH											
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan PD tersusun tepat waktu	100 %	6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD tersusun tepat waktu	3 dokumen	6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Kota Malang	
			6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD tersusun tepat waktu	12 laporan	6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	Kota Malang		
						6.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Kota Malang		
			6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			6.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Kota Malang		
			6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian	12 laporan	6.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen			
						6.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	Semua Kab/Kota Kota Malang		
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang			
			6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum PD yang diselenggarakan	6 kegiatan	6.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Malang		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Malang	
							6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kota Malang	
							6.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 Dokumen	Kota Malang	
							6.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	50 Laporan	Kota Malang	
							6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Kota Malang	
			6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Kota Malang	
							6.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		
			6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan PD yang disediakan	3 layanan		6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Kota Malang	
							6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Kota Malang	
							6.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Malang	
			6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang dipelihara	13 unit		6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit 50 Unit		Kota Malang	
						6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit		Kota Malang	
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP Persentase SAKIP PD dengan Nilai A Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	8.5 % 100 % 100 %	6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah PD yang telah menerapkan Manajemen Risiko Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan daerah (mandatory) yang direviu	27 perangkat daerah 15 temuan 100 %	6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan		
							6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	29 Laporan		
							6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan		
							6.01.02.2.01.06 Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Bulan Pelaksanaan Kerjasama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	12 Bulan 1 Kesepakatan		
							6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen		
				6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah temuan hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	20 laporan	6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	6 Laporan		
							6.01.02.2.02.02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional	100 %	6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional	10 kegiatan	6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi		
							6.01.03.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	0 Rekomendasi		
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Jumlah PD yang memiliki akses mendapatkan layanan pendampingan dan asistensi	27 perangkat daerah	6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	28 perangkat daerah		
							6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	4 perangkat daerah		
							6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan		
							6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	28 perangkat daerah		
7.01 KECAMATAN											
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Perangkat daerah Nilai SAKIP persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktuperangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	80.04 - 80 Angka 100 % 100 %	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP NILAI SAKIP Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan Prosentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	80.53 angka 82 Angka 100 % 100 %	7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja / RKT Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Renja/RKT Jumlah dokumen Renja/RKT dan Renstra Jumlah dokumen Renja/RKT dan Renstra	0 dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen 4 Dokumen 5 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah Dokumen Renstra	0 dokumen		
						7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	0 Dokumen	Kota Malang	
							Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	4 Dokumen			
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen			
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen			
						7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Malang	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen			
							Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	0 dokumen			
						7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		"Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja"	0 dokumen	Kota Malang	
							Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	0 Dokumen			
							Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	7 Dokumen			
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan			
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen			
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan			
						7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi Jumlah dokumen hasil survei kepuasan Jumlah dokumen evaluasimasyarakat "Jumlah Dokumen Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Jumlah Dokumen Standar Pelayanan" Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen 0 Dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 Laporan 1 dokumen 2 Laporan 3 Laporan 4 Laporan		Kota Malang	
			7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP NILAI SAKIP Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu Prosentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu Prosentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang disusun tepat waktu	80.53 angka 82 Angka 100 % 100 % 100 %	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN Jumlah ASN Jumlah ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pegawai	0 ASN 0 orang 128 orang 0 Orang/bulan 133 Orang/bulan 134 Orang/bulan 145 Orang/bulan 145 Orang		Kota Malang	
						7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan 2 dokumen 2 Laporan		Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 dokumen			
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 13 Laporan			
						7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Kegiatan Sosialisasi 0 Kegiatan		Kota Malang	
								Jumlah laporan keuangan 0 dokumen			
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan			
			7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 80.53 angka Prosentase Dokumen perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang disusun tepat waktu 100 %		7.01.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Bulan 0 Bulan		Kota Malang	
								Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen			
								Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 12 Dokumen			
								Jumlah Orang Penjaga Malam 0 Orang			
								Jumlah pengamanan Barang Milik Daerah 2 Orang			
			7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	NILAI SAKIP 82 Angka Nilai Survey Kepuasan Internal 80 Angka Nilai Survey Kepuasan Internal 85 . Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian 100 %		7.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		jumlah kegiatan 1 kegiatan		Semua Kab/Kota Kota Malang	
								Jumlah kegiatan Pelatihan 1 Kegiatan			
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang			
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 50 Orang			
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 134 Orang			
								"Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya" 0 ASN			
								Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/ dikembangkan kapasitasnya 60 orang			
								Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya 0 ASN			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 80.53 angka NILAI SAKIP 82 Angka Nilai Survey Kepuasan Internal 80 Angka Nilai Survey Kepuasan Internal 85 . Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi 100 %		7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	"Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor" 0 jenis Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0 Jenis Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8 jenis Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10 Jenis Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket		Kota Malang		
						7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor 0 jenis Jumlah alat tulis kantor 46 Jenis Jumlah alat tulis kantor 50 jenis Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Paket Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 50 Paket		Kota Malang		
						7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor 0 jenis Jumlah fasilitasi kegiatan insidentil yang diselenggarakan kegiatan insidentil" 0 Bulan Jumlah makanan dan minuman 0 Kotak Jumlah makanan dan minuman 6 Jenis Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket		Kota Malang		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		
								Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidental	2 kegiatan		
						7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan	0 Jenis Barang Cetakan	Kota Malang	
								Jumlah barang cetakan dan penggandaan	4 jenis		
								Jumlah barang cetakan dan penggandaan	6 Jenis		
								Jumlah barang cetakan dan penggandaan"	0 jenis		
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket		
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket		
						7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0 Eksemplar	Kota Malang	
								Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis		
								Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Jenis		
								Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	0 jenis		
								Jumlah bulan	0 bulan		
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Jenis		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan	0 bulan	Kota Malang		
						7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Kota Malang		
						7.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	2 unit	Kota Malang		
						7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	2 Jenis			
						7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	6 Jenis	Kota Malang		
						7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	Kota Malang		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								"Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor terpelihara" 0 jenis			
								Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara 4 jenis			
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit			
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit			
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 9 Unit			
			7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP 80.53 angka NILAI SAKIP 82 Angka Nilai Survey Kepuasan Internal 85 . Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik 80 % Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti 100 %		7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik 0 Surat Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik 1000 surat Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik 1025 Surat Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik 1100 surat Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik" 0 surat	Kota Malang			
						7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik 12 bulan Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik 12 Bulan "Jumlah Bulan Pembayaran Belanja Telpon, Air dan Listrik" 0 bulan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan Jumlah tagihan belanja telpon, air dan listrik 0 Tagihan listrik Jumlah tagihan belanja telpon, air dan listrik 12 bulan listrik	Kota Malang			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan/perengkapan gedung kantor	6 jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan "Jumlah Petugas Kebersihan Jumlah Sopir jumlah Tenaga Pelaksana Operasional Kantor Luasan ruangan yang dibersihkan Luasan ruangan yang dibersihkan Luasan Ruang yang dibersihkan"	0 Laporan 12 Laporan 0 orang 0 orang 6 Orang 0 m2 2000 m2 0 gedung	Semua Kab/Kota Kota Malang	
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP NILAI SAKIP Persentase barang milik daerah yang terpelihara Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Prosentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	80.53 angka 82 Angka 100 % 80 % 80 %		7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	"Jumlah kendaraan dinas/operasional roda dua yang direhabilitasi Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat yang direhabilitasi Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah/volume BBM dan pelumas endaraan dinas/operasional roda dua dan roda empat"	0 buah 0 buah 12 Unit 0 buah	Kota Malang	
							7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan diproses perizinannya Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	0 Unit 5 Unit 11 unit 5 unit 5 Unit	Kota Malang	
							7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Jumlah Pemeliharaan peralatan Kantor Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit 5 Unit 0 Unit	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 34 Unit "Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara" 0 jenis Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara 9 Jenis Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara 9 Unit			
						7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 Gedung Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi 0 Unit Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara 1 gedung Luasan ruangan yang dibersihkan 3400 M2	Kota Malang			
						7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi" 0 paket Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit Luasan Gedung kantor yang dipelihara 0 m2	Kota Malang			
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM pelayanan 80.4 % IKM pelayanan 81,55 Angka IKM pelayanan 81,60 Angka IKM Pelayanan Perangkat Daerah 80,4 Angka IKM Pelayanan Perangkat Daerah 80.4 - IKM Perangkat daerah 80.04 . Indeks Kepuasan Masyarakat 82.5 0 Nilai SAKIP 80 Angka	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai SAKIP 80.53 angka NILAI SAKIP 82 Angka Nilai Survei Kepuasan Internal 80 Angka Nilai survey kepuasan internal 80 Angka Nilai Survey Kepuasan Internal 80 Angka Persentase penyelesaian layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan 100 % Prosentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat 100 %	7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Belanja Modal 6 Paket Dokumen 12 dokumen Jumlah bulan mendukung kegiatan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan 12 bulan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 dokumen Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen	Kota Malang				

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				waktu prosentase penyelesaian layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan	80 %			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dokumen		
								Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	80 Dokumen		
								Jumlah Kegiatan Mendukung Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan	12 bulan		
								jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	12 bulan		
								jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	23 kegiatan		
								Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	0 layanan		
								Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	0 Pelayanan		
								Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	12 bulan		
								Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi Kelurahan	12 Bulan		
								Jumlah kegiatan mendukung peningkatan Kualitas Pelayanan administrasi Kelurahan	17 kegiatan		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah Kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan	12 bulan			
							Jumlah Kegiatan Mendukung Peningkatan Kualitas pelayanan Administrasi Kelurahan	12 Bulan			
							Jumlah Kegiatan Mendukung Peningkatan Kuwalitas Pelayanan Administrasi Kelurahan	12 Bulan			
							Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kwalitas pelayanan Administrasi Kelurahan	12 bulan			
							Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan PATEN	0 Kegiatan			
							Jumlah pelimpahan kewenangan	0 kewenangan			
							Jumlah Pelimpahan kewenangan	28 kewenangan			
							jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan	27 Kewenangan			
							Jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan	14 Kewenangan			
							Jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan	27 kewenangan			
							Jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan	27 Kewenangan			
							jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan	27 kewenangan			
							Jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan	0 layanan			
							Jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan	0 Layanan			
							Jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan	0 Layanan			
							Jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan	18 pelayanan			
							Jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan	24 Layanan			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan 27 kewenangan			
								Jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan 27 kewenangan			
								Jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan 27 layanan			
								Jumlah penyelenggaraan Layanan berdasarkan Pelimpahan Kewenangan 0 Kewenangan			
								Jumlah Penyelenggaraan Layanan Berdasarkan Pelimpahan Kewenangan 0 kewenangan			
								Jumlah Penyelenggaraan Layanan Berdasarkan Pelimpahan Kewenangan 0 Kewenangan			
								Jumlah Penyelenggaraan Layanan Berdasarkan Pelimpahan Kewenangan 0 Layanan			
								Jumlah Penyelenggaraan Layanan Berdasarkan Pelimpahan Kewenangan 27 Kewenangan			
								terfasilitasi operasional kegiatan 12 bulan			
			7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	IKM Perangkat daerah IKM Perangkat Daerah Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Jumlah dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3 dokumen 80.53 angka 2 Dokumen 3 Dokumen 3 dokumen	7.01.02.2.02.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Buku Monografi Buku Profil Kelurahan Dokumen Dokumen Monografi dokumen profil dokumen profil Jumlah Dokuman Monografi & Profil Kelurahan Jumlah Dokumen Data Monografi jumlah dokumen data monografi kelurahan jumlah dokumen data monografi kelurahan Jumlah dokumen data monografi Kelurahan Jumlah Dokumen Data Monografi Kelurahan Sebagai Arah Pembangunan Jumlah Dokumen Data Profil	2 Buku 1 Buku 3 Dokumen 2 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 1 laporan 2 dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen	Kota Malang		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
				Jumlah dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4 dokumen		"Jumlah dokumen monografi	2 Dokumen			
				Nilai SAKIP	80.53 angka		Jumlah dokumen monografi	0 buah			
				NILAI SAKIP	82 Angka		Jumlah dokumen monografi	0 dokumen			
				Nilai Survei Kepuasan Internal	80 Angka		Jumlah dokumen monografi	0 Dokumen			
				Nilai survey kepuasan internal	80 Angka		Jumlah dokumen monografi	2 dokumen			
				Nilai Survey Kepuasan internal	80 Angka		Jumlah dokumen monografi	0 dokumen			
				Nilai Survey Kepuasan Internal	80 Angka		Jumlah dokumen monografi	2 dokumen			
							"Jumlah dokumen monografi Jumlah Dokumen Profil"	0 dokumen			
							Jumlah dokumen monografi kecamatan	2 Dokumen			
							Jumlah Dokumen Monografi Kecamatan	0 dokumen			
							Jumlah Dokumen Monografi Kelurahan	0 Dokumen			
							Jumlah Dokumen Monografi Kelurahan	2 Dokumen			
							Jumlah Dokumen Monografil Kelurahan	0 Dokumen			
							Jumlah DokumenPemutakhiran Profil Kelurahan	0 Dokumen			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	0 dokumen			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 dokumen			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	0 Dokumen			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 dokumen			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4 dokumen			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4 Dokumen			
							jumlah dokumen profil	0 dokumen			
							Jumlah dokumen profil	0 dokumen			
							Jumlah dokumen profil	0 Dokumen			
							Jumlah dokumen profil	1 dokumen			
							Jumlah dokumen profil	1 Dokumen			
							Jumlah Dokumen Profil	0 dokumen			
							Jumlah Dokumen Profil	0 Dokumen			
							Jumlah Dokumen Profil	0 Dokumen			
							Jumlah Dokumen Profil	1 dokumen			
							Jumlah Dokumen Profil	1 Dokumen			
							Jumlah Dokumen Profil	0 dokumen			
							Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Dokumen			
							Jumlah Dokumen Profil Kecamatan	0 dokumen			
							jumlah dokumen profil kelurahan	1 dokumen			
							jumlah dokumen profil kelurahan	1 laporan			
							Jumlah dokumen profil kelurahan	0 buah			
							Jumlah dokumen profil kelurahan	1 dokumen			
							Jumlah dokumen profil Kelurahan	0 dokumen			
							Jumlah dokumen profil Kelurahan	1 Dokumen			
							Jumlah Dokumen Profil Kelurahan	0 dokumen			
							Jumlah Dokumen Profil Kelurahan	0 Dokumen			
							Jumlah Dokumen Profil Kelurahan	1 Dokumen			
							Jumlah Dokumen Provil Kelurahan	0 Dokumen			
							Jumlah dokumen updating sistem informasi	1 Dokumen			
							Jumlah dokumen updating sistem informasi"	1 Dokumen			
							Jumlah pendata dan penginput Profil RW	10 orang			
								24 laporan			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Pembangunan Masyarakat (IP Mas) Kecamatan	4.2 Angka	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Indeks kepuasan layanan prasaarana sarana publik	82 Angka	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	1 dokumen	Kota Malang	
		persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	4.34 %		Indeks kepuasan layanan prasaarana sarana publik	85 Angka		Jumlah Dokumen Hasil Musrenbangkel	1 Dokumen		
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	96 %		Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	3.85 angka		jumlah dokumen hasil pelaksanaan musrenbang	1 dokumen		
		persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kewilayahan	34 %		Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0.83 angka		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan musrenbang	1 Dokumen		
		"Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan"	34 %		Persentase peningkatan lembaga ekonomi dan lembaga kemasyarakatan yang aktif	90 %		Jumlah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga		
		Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	40 %		Persentase unsur kemasyarakatan yang terfasilitasi	100 %		Jumlah Kegiatan (Rembug Warga, Musrenbangkel)	0 Kegiatan		
		Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kewilayahan	34 %		Prosentase Lembaga Kemasyarakatan dan Ormas di Wilayah Kec dan Kel yang aktif	100 %		Jumlah Laporan Hasil Musrenbangkel	1 Dokumen		
		Persentase usulan masyarakat untuk sarana dan prasarana di wilayah yang diakomodir	65 %		Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	90 %		Jumlah Laporan Kegiatan	0 Laporan		
		"Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir"	43 %		Prosentase Usulan Hasil Musrenbang Kel yg menjadi prioritas dalam musrenbang kec. Yang diakomodir	9 Unsur		"Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan"	17 LK		
		"Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir"	96 %		Prosentase Usulan Hasil Musrenbang Kel yg menjadi prioritas dalam musrenbang kec. Yang diakomodir	100 %		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 lembaga		
		Prosentase Lembaga Kemasyarakatan dan Ormas di Wilayah Kec dan Kel yang aktif	100 %		rosentase Lembaga Kemasyarakatan dan Ormas di Wilayah Kec dan Kel yang aktif	100 %		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 lembaga		
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 lembaga		
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga		
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16 LK		
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 LK			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 LK			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 LK			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 LK			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 LK			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 LK			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 LK			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18 LK			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	19 LK			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20 LK			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	22 lembaga			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	22 LK			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	27 LK			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	84 LK			
							Jumlah peserta Musrenbang Kelurahan yang aktif dalam Musrenbang	0 orang			
							Jumlah unsur kelembagaan yang aktif dalam musrenbang	6 Unsur			
							jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam musrenbang	0 lembaga			
							jumlah Unsur Kemasyarakatan yang Aktif dalam Musrenbang	0 Lembaga			
							Jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam musrenbang	6 unsur			
							Jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam Musrenbang	0 Lembaga			
							Jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam Musrenbang	0 unsur			
							Jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam Musrenbang	0 Unsur			
							Jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam Musrenbang	0 Unsur			
							Jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam Musrenbang	6 unsur			
							Jumlah Unsur kemasyarakatan yang aktif dalam musrenbang	6 unsur			
							Jumlah Unsur Kemasyarakatan yang aktif dalam Musrenbang	0 Lembaga			
							Jumlah Unsur Kemasyarakatan yang Aktif dalam Musrenbang	0 lembaga			
							Jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam Musrenbangkel	0 Unsur			
							Jumlah unsur lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam Musrenbang	0 unsur			
							Jumlah Unsur Lembaga yang Aktif Dalam Musrenbang sesuai SE no 66 Thn 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Musrenbang 2022	0 unsur lembaga			
							Jumlah unsur masyarakat yang aktif dalam musrenbang	0 Lembaga			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah unsur peserta Musrenbang Kelurahan	0 unsur		
								Jumlah Unsur peserta Musrenbang Kelurahan	0 unsur		
						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah barang yang diterima masyarakat	7 paket		Kota Malang	
							jumlah infrastruktur terfasilitasi	7 RW			
							Jumlah kampung tematik	5 lokasi			
							jumlah kegiatan peningkatan sarana dan prasarana lingkungan kelurahan	10 paket			
							Jumlah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan di Kelurahan	20 Paket			
							jumlah kegiatan peningkatan sarana dan prasarana lingkungan kelurahan	12 paket			
							Jumlah kegiatan peningkatan sarana dan prasarana lingkungan kelurahan	10 Paket			
							Jumlah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana yang terfasilitasi di lingkungan kelurahan	20 RW			
							Jumlah kegiatan peningkatan Sarana dan Prasaran lingkungan kelurahan	15 RW			
							Jumlah peningkatan sarana dan prasarana	25 paket			
							Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana	12 Paket			
							Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan	12 Paket			
							Jumlah Prasarana dan Sarana Publik Lingkungan Kelurahan Yang Terpelihara	0 lokasi			
							Jumlah Prasarana dan Sarana Publik Lingkungan Kelurahan Yang Terpelihara	0 Lokasi			
							Jumlah Prasarana dan Sarana Publik Lingkungan Kelurahan Yang Terpelihara	0 paket			
							Jumlah Sarana dan Prasarana	0 Lokasi			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terakomodir	63 Paket			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terakomodir	104 Unit			
							"Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun"	14 Unit			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 paket			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 paket			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19 Unit			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21 Unit			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	26 Unit			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28 Unit			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	34 Unit		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	40 Unit		
								Jumlah sarana dan prasarana publik lingkungan kelurahan yang terpelihara	0 Lokasi		
								Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	6 Kegiatan		
								Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun	0 kegiatan		
								Jumlah sarana dan Prasarana yang di Bangun	0 paket		
								Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	0 paket		
								Jumlah Sarana dan Prasarana yang di bangun	0 Lokasi		
								Jumlah sarana dan prasarana yang sudah dibangun	0 kegiatan		
								Jumlah sarana dan prasarana yang sudah dibangun	0 paket		
								Jumlah sarana dan prasarana yang sudah dibangun	0 Paket		
								Jumlah sarana dan prasarana yang sudah dibangun	0 Paket		
								Jumlah sarana dan prasarana yang sudah dibangun	0 paket pekerjaan		
								Jumlah sarana dan prasarana yang sudah dibangun	0 Titik		
								Jumlah sarana dan prasarana yang sudah dibangun	8 kegiatan		
								Jumlah sarana dan prasarana yang sudah dibangun	12 kegiatan		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Yang SUDah Dibangun	0 Kegiatan		
								Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	7 paket pekerjaan		
						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Guru Ngaji - Guru sekolah minggu	0 Orang	Kota Malang	
								Jumlah Guru Ngaji	0 OB		
								Jumlah Guru Ngaji	191 orang		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu	0 Orang			
							Jumlah guru ngaji dan guru sekolah minggu	40 orang			
							Jumlah Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu yang terfasilitasi	152 orang			
							jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	44 orang			
							jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	68 orang			
							jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	816 orang/bulan minggu			
							Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	0 orang			
							Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	0 Orang			
							Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	17 orang			
							Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	46 Orang			
							Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	88 Orang			
							Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	106 orang			
							Jumlah guru ngaji dan sekolah Minggu	41 orang			
							Jumlah Guru ngaji dan sekolah minggu	0 orang			
							Jumlah Guru ngaji dan sekolah minggu	115 orang			
							Jumlah Guru Ngaji dan Sekolah Minggu	0 orang			
							Jumlah Guru Ngaji dan Sekolah Minggu	0 Orang/Bulan Minggu			
							Jumlah Guru Ngaji dan Sekolah Minggu	80 Orang			
							Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu dan dibina	34 Orang			
							Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu terfasilitasi	112 orang			
							Jumlah Guru Ngaji dan Sekolah Minggu terfasilitasi	97 orang			
							Jumlah Guru Ngaji dan Sekolah Minggu Terfasilitasi	0 Orang			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah guru ngaji terfasilitasi	107 orang			
							Jumlah guru Ngaji terfasilitasi	38 orang			
							Jumlah Guru Sekolah Minggu	0 OB			
							Jumlah kegiatan kegiatan kemasyarakatan	3 kali			
							Jumlah Kegiatan Kelompok Masyarakat	2 Kegiatan			
							Jumlah Kegiatan Kemampuan dan Ketrampilan yang terfasilitasi	5 kegiatan			
							Jumlah Kegiatan Masyarakat yang Terfasilitasi	2 Kegiatan			
							Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Terlaksana	0 kegiatan			
							Jumlah kegiatan sosialisasi kemasyarakatan di wilayah/tingkat kelurahan yang terfasilitasi	12 bulan			
							Jumlah Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	0 Kegiatan			
							jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan di wilayah/tingkat kelurahan yang terfasilitasi	5 kegiatan			
							jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan di wilayah/tingkat kelurahan yang terfasilitasi	12 bulan			
							Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan di wilayah/tingkat kelurahan yang terfasilitasi	12 Bulan			
							Jumlah Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah/Tingkat Kelurahan Yang TERfasilitasi	0 Kegiatan			
							Jumlah Kegiatan Sosial kemasyarakatan yang difasilitasi	0 Kegiatan			
							Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah difasilitasi	0 Kegiatan			
							Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah difasilitasi	0 kegiatan			
							Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah difasilitasi	0 kegiatan			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah difasilitasi	0 Kegiatan			
							Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah difasilitasi	2 Kegiatan			
							Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah difasilitasi	5 Kegiatan			
							Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah difasilitasi	0 kegiatan			
							Jumlah Kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah difasilitasi	0 kegiatan			
							Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah difasilitasi 2. Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	0 Kegiatan			
							Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang terfasilitasi	0 kegiatan			
							Jumlah Kegiatan Sosial Kemasyarakatan yang difasilitasi	0 Kegiatan			
							Jumlah Kegiatan Sosial Masyarakat Kelurahan yang Terfasilitasi	12 Bulan			
							Jumlah kegiatan sosial masyarakat yang terfasilitasi	2 kegiatan			
							Jumlah kegiatan sosial/tingkat kelurahan yang terfasilitasi	12 bulan			
							Jumlah Kegiatan Sosial/tingkat Kelurahan yang terfasilitasi	12 bulan			
							Jumlah Kegiatan Sosial / Tingkat Kelurahan yang terfasilitasi	12 Bulan			
							Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	0 kegiatan			
							Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	0 Kegiatan			
							Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	0 Kelompok			
							Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	0 Kelompok			
							Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	0 lembaga			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	8 Kelompok			
							Jumlah Kelompok Masyarakat yang di Tingkatkan Kapasitasnya	0 Lembaga			
							jumlah modin dan perawat jenazah	8 orang			
							Jumlah Modin	73 orang			
							Jumlah modin dan erwat jenazah terfasilitasi	22 orang			
							Jumlah modin dan perawat jenazah	19 orang			
							Jumlah modin dan perawat jenazah	21 orang			
							Jumlah modin dan perawat jenazah	21 Orang			
							Jumlah Modin dan Perawat Jenazah	55 orang			
							jumlah modin dan perawat jenazah	8 orang			
							Jumlah modin dan perawat jenazah	0 orang			
							Jumlah modin dan perawat jenazah	0 Orang			
							Jumlah modin dan perawat jenazah	14 orang			
							Jumlah modin dan perawat jenazah	32 Orang			
							Jumlah modin dan perawat jenazah	148 orang			
							Jumlah Modin dan perawat jenazah	10 orang			
							Jumlah Modin dan Perawat Jenazah	0 Orang			
							Jumlah Modin dan Perawat Jenazah	0 Orang/Bulan			
							Jumlah Modin dan Perawat Jenazah	20 Orang			
							jumlah modin dan perawat jenazah dan dibina	36 orang			
							Jumlah modin dan perawat jenazah terfasilitasi	14 orang			
							Jumlah Modin dan Perawat Jenazah Terfasilitasi	0 Orang			
							jumlah modin perawat jenazah	192 orang/bulan			
							Jumlah Modin perawat jenazah	33 orang			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah Modin & Perawat Jenazah	0 OB			
							jumlah Modin perawat Jenazah Terfasilitasi	14 orang			
							Jumlah Modin Perawat Jenazah yang terfasilitasi	36 orang			
							Jumlah Pemberdayaan	4 kegiatan			
							Jumlah Pembinaan Kesmas (Guru Ngaji, Modin dan Mabot)	3 kegiatan			
							jumlah pembinaan yang difasilitasi	5 kegiatan			
							Jumlah Peningkatan & Ketrampilan masyarakat yang terfasilitasi	1 kegiatan			
							Jumlah Penjaga Makam	0 OB			
							Jumlah penjaga makam dan penjaga tempat ibadah	14 orang			
							Jumlah penjaga makam dan tempat ibadah	0 orang			
							Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	25 orang			
							Jumlah Penjaga Tempat Ibadah	20 orang			
							Jumlah Penjaga Tempat Ibadah	0 OB			
							Jumlah penjaga tempat ibadah dan makam	46 orang			
							Jumlah Penjaga Tempat Ibadah dan Makam	0 Orang/Bulan			
							Jumlah Penjaga Tempat Ibadah dan Makam	30 Orang			
							Jumlah penjaga tempat ibadah dan makam terfasilitasi	27 orang			
							jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	21 orang			
							jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	336 orang/bulan			
							jumlah Penjaga tempat Ibadah dan penjaga makam	20 orang			
							Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	0 orang			
							Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	0 Orang			
							Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	8 Orang			
							Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	20 orang			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	37 Orang			
							Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	50 orang			
							Jumlah Penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	16 orang			
							Jumlah Penjaga tempat ibadah dan Penjaga makam	39 orang			
							Jumlah Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam	0 Orang			
							Jumlah Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Terfasilitasi	0 Orang			
							Jumlah Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam yang terfasilitasi	46 orang			
							Jumlah Penjaga Tempat Ibadah/Makam	70 orang			
							Jumlah penjaga tempat ibadah terfasilitasi	26 orang			
							jumlah penjaga tempat ibadah yang difasilitasi dan dibina	15 orang			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/ ormas			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas/ ormas			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 Pokmas / Ormas Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 8 Pokmas / Ormas Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 9 Pokmas / Ormas Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 12 Pokmas / Ormas Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 13 Pokmas / Ormas Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 17 Pokmas / Ormas Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 86 Pokmas / Ormas Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Kegiatan Modin perawat jenazah 0 Orang Modin-Perawat Jenazah 0 orang Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah difasilitasi 1 Kegiatan peningkatan kualitas kegiatan lembaga keagamaan 0 kegiatan Penjaga tempat ibadah penjaga makam 0 Orang Penjaga Tempat Ibadah-Penjaga Makam, 0 orang			
						7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan	Jumlah bulan Monitoring Satgas Banjir 0 Bulan "Jumlah dokumen kondisi prasarana dan sarana kewilayahan 1 Dokumen Jumlah dokumen Kondisi Prasarana dan Sarana Kewilayahan 0 Dokumen	Kota Malang			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah dokumen Kondisi Prasarana dan Sarana Kewilayahan	1 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Kondisi Sarana dan Prasarana Kewilayahan	0 dokumen		
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan		
								Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	0 Laporan		
								Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	3 Laporan		
								Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan		
								Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	132 Laporan		
								Jumlah Monev Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan	1 Kegiatan		
								Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan	0 Kegiatan		
								Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan	12 Kelurahan		
								Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana di Wilayah Kecamatan	0 Kelurahan		
			7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	82 Angka	7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	jumlah 13 RW,	0 orang		Kota Malang	
				Indeks kepuasan layanan prasaarana sarana publik	85 Angka		jumlah 141 RT,	0 orang			
				Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0.83 angka		Jumlah Kegiatan	0 kegiatan			
				Persentase peningkatan lembaga ekonomi dan lembaga kemasyarakatan yang aktif	90 %		Jumlah Kegiatan	0 Pokja Kegiatan			
				Persentase peningkatan lembaga ekonomi dan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100 %		Jumlah Kegiatan Kelembagaan	0 kegiatan			
				Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	90 %		Jumlah kegiatan kelembagaan di wilayah/ tingkat kelurahan yang terfasilitasi	12 Kegiatan			
							Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan di wilayah/tingkat kelurahan yang terfasilitasi	12 bulan			
							jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	15 kegiatan			
							Jumlah kegiatan pelatihan/sosialisasi	15 kegiatan			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga	0 Kegiatan			
							Jumlah kegiatan PKK	2 Kegiatan			
							Jumlah kegiatan PKK	4 kegiatan			
							Jumlah Kegiatan PKK	0 Kegiatan			
							Jumlah Kegiatan PKK terfasilitasi	5 kegiatan			
							Jumlah Kegiatan PKK terfasilitasi	12 Bulan			
							Jumlah kegiatan PKK yang terfasilitasi	7 kali			
							Jumlah Kegiatan pokja	0 Kegiatan			
							jumlah kegiatan sosialisasi PKK	4 kali			
							Jumlah kegiatan sosialisasi PKK	4 kegiatan			
							Jumlah kegiatan sosialisasi PKK	12 kali			
							Jumlah Kegiatan Sosial / Tingkat Kelurahan yang terfasilitasi	12 Bulan			
							Jumlah Keg. Lembaga Masyarakat yang terfasilitasi	11 Kegiatan			
							Jumlah Lemabaga Masyarakat yang aktif	0 LK			
							Jumlah Lembaga Masyarakat ,	0 Lembaga			
							Jumlah lembaga masyarakat diwilayah Kecamatan yang dibina dan difasilitasi	0 Kegiatan			
							"Jumlah lembaga masyarakat di wilayah Kecamatan yang dibina dan difasilitasi Jumlah PKK Kecamatan dan Kelurahan yang aktif"	5 lembaga			
							Jumlah lembaga masyarakat di wilayah kelurahan yang dibina dan difasilitasi	0 lembaga			
							Jumlah lembaga masyarakat diwilayah kelurahan yang dibina dan difasilitasi	0 Lembaga			
							Jumlah lembaga masyarakat di wilayah Kelurahan yang dibina dan difasilitasi	0 lembaga			
							Jumlah lembaga masyarakat di wilayah Kelurahan yang dibina dan difasilitasi	6 lembaga			
							Jumlah lembaga masyarakat diwilayah Kelurahan yang dibina	0 Lembaga			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
								dan difasilitasi				
								Jumlah lembaga Kemasyarakatan di wilayah Kelurahan yang dibina dan difasilitasi	0 lembaga			
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di wilayah Kelurahan yang dibina dan difasilitasi	0 lembaga			
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di wilayah Kelurahan yang dibina dan difasilitasi	0 Lembaga			
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan yang di bina dan di Fasilitas	0 Lembaga			
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Yang Dibina dan Difasilitasi	0 Lembaga			
								Jumlah Lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina dan difasilitasi	0 Lembaga			
								Jumlah lembaga kemasyarakatan terfasilitasi	12 lembaga			
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	0 kegiatan			
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0 Lembaga			
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 LK			
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 LK			
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 LK			
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga			
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 LK			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan	6 LK			
							Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan	7 LK			
							Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan	8 LK			
							Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan	9 Lembaga			
							Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan	9 LK			
							Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan	10 LK			
							Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan	12 lembaga			
							Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan	12 LK			
							Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan	84 LK			
							jumlah lembaga masyarakat yang terfasilitasi	10 lembaga			
							jumlah lembaga masyarakat yang terfasilitasi	12 bulan			
							Jumlah lembaga masyarakat yang terfasilitasi	0 lembaga			
							Jumlah lembaga masyarakat yang terfasilitasi	0 lembaga			
							Jumlah lembaga masyarakat yang terfasilitasi	0 Lembaga			
							Jumlah lembaga masyarakat yang terfasilitasi	0 Lembaga			
							Jumlah lembaga masyarakat yang terfasilitasi	7 Lembaga			
							Jumlah lembaga masyarakat yang terfasilitasi	8 Lembaga			
							Jumlah lembaga masyarakat yang terfasilitasi	10 lembaga			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi	8 Lembaga			
							Jumlah Lembaga terfasilitasi	0 lembaga			
							Jumlah Lembaga terfasilitasi	9 Lembaga			
							Jumlah Lembaga terfasilitasi	12 kegiatan			
							Jumlah Lembaga Terfasilitasi	8 Lembaga			
							JUmlahnPKK RT/RW yang Aktif	0 PKK RT/RW			
							Jumlah pembinaan/sosialisasi	5 kegiatan			
							Jumlah PKK Kecamatan dan Kelurahan yang aktif	0 Pokja			
							Jumlah PKK Kecamatan dan Kelurahan yang aktif"	12 pkk			
							Jumlah PKK Rt/Rw yang Aktif	0 orang			
							Jumlah PKK RT/RW yang aktif	0 PKK			
							Jumlah PKK RT/RW yang Aktif	0 Kelompok			
							Jumlah PKK RT/RW yang Aktif	0 Kelompok			
							Jumlah PKK RT/RW yang Aktif	0 PKK			
							Jumlah PKK RT yang aktif	0 orang			
							Jumlah PKK RW/Rt yang aktif	0 Kelompok			
							Jumlah PKK RW yang aktif	0 orang			
							Jumlah RT	0 OB			
							Jumlah RT	0 Orang			
							Jumlah RT	158 RT			
							Jumlah Rt dan Rw	0 orang			
							Jumlah RT dan RW	0 orang			
							Jumlah RT dan RW	0 Orang/Bulan			
							Jumlah RT dan RW	0 RT/RW			
							Jumlah RT dan RW terfasilitasi	58 orang			
							Jumlah RT dan RW Terfasilitasi	81 Orang			
							Jumlah RT dan RW yang terfasilitasi	67 Orang			
							Jumlah RT/RW	0 orang			
							Jumlah RT/RW	0 Orang			
							Jumlah RT RW terfasilitasi	12 bulan			
							Jumlah RT RW terfasilitasi	62 orang			
							Jumlah RT RW terfasilitasi	91 Orang			
							Jumlah RT. - RW. terfasilitasi	141 orang			
							Jumlah RT/RW Terfasilitasi	0 Orang			
							jumlah rt rw yang terfasilitasi	504 orang/bulan			
							Jumlah RT/RW yang terfasilitasi	0 RT/RW			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah RT/RW yang terfasilitasi	119 orang		
								Jumlah RT/RW yang Terfasilitasi	0 orang/bulan		
								Jumlah RT/RW yang Terfasilitasi	0 RT/RW		
								Jumlah RT/RW yang Terfasilitasi	0 RT/RW		
								Jumlah RT/RW yang Terfasilitasi	0 RT/ RW		
								Jumlah RT terasilitasi	0 orang		
								Jumlah RT terfasilitasi	40 RT		
								Jumlah RT Terfasilitasi	0 RT		
								Jumlah RT Terfasilitasi	49 RT		
								Jumlah RT yang aktif	0 Orang		
								Jumlah RW	0 Orang		
								Jumlah RW	24 RW		
								Jumlah RW	0 OB		
								Jumlah RW terfasilitasi	0 orang		
								Jumlah RW terfasilitasi	7 RW		
								Jumlah RW Terfasilitasi	0 RW		
								Jumlah RW Terfasilitasi	8 RW		
								Jumlah RW yang aktif	0 Orang		
								PKK RT 47 dan PKK RW 7 yang aktif	0 Orang		
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	100 %	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan wilayah yang termonitoring	100 %	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Honorarium Linmas	65 OB	Kota Malang	
		Indeks Pembangunan Masyarakat (IP Mas) Kecamatan	4.2 Angka		Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)	29 RT		Jumlah anggota linmas	648 orang		
		persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	94 %		Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)	36 RT		Jumlah Anggota Linmas terfasilitasi	0 orang		
		Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	100 %		Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)	37 RT		Jumlah Anggota Linmas Terasilitasi	0 Orang		
		Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	90 %		Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)	46 RT		Jumlah anggota Linmas yang tefasilitasi	0 orang		
		Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	94 %		Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)	47 RT		Jumlah anggota Satlinmas	0 orang		
		Prosentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum yang dapat diselesaikan	94 %		Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)	49 RT		Jumlah Anggota Satlinmas Terfasilitasi	0 Orang		
		Rasio Linmas per RT	1 .		Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)	50 RT		Jumlah Anggota Satlinmas Terfasilitasi	48 orang		
					Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)	53 RT		Jumlah Kegiatan	0 kegiatan		
					Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)	57 RT		Jumlah Kegiatan Pelatihan peningkatan kapasitas linmas	0 kali		
					Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)	58 RT		Jumlah Kegiatan Penguatan Linmas	0 kegiatan		
					Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)			Jumlah Kegiatan Penguatan Linmas	0 orang		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)	63 RT		Jumlah Kegiatan Sosialisasi	0 kegiatan			
				Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)	64 RT		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 laporan			
				Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)	67 RT		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			
				Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)	77 RT		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan			
				Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)	78 RT		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan/bulan			
				Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)	94 RT		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan			
				Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)	96 RT		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan			
				Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)	100 %		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			
				Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)	120 RT		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13 Laporan			
				Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)	141 RT		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			
				Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)	678 RT		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			
				Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)	930 RT		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			
				Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	82 Angka		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			
				Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0.83 angka		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			
							jumlah laporan patroli-monitoring wilayah, kegiatan (sosialisasi, dll)	12 laporan			
							Jumlah laporan patroli-monitoring wilayah, kegiatan (sosialisasi, dll)	12 Bulan			
							Jumlah laporan patroli-monitoring wilayah, kegiatan (sosialisasi, dll)	12 Laporan			
							Jumlah Laporan patroli-monitoring wilayah, kegiatan (sosialisasi, dll)	12 Laporan			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah Linmas	0 Orang			
							Jumlah Linmas	0 orang			
							Jumlah Linmas	0 Orang			
							Jumlah Linmas	54 Orang			
							Jumlah Linmas terfasilitasi	0 orang			
							Jumlah linmas yang aktif	0 orang			
							Jumlah Linmas yang aktif	0 orang			
							Jumlah Linmas Yang Aktif	0 Orang/Bulan			
							Jumlah monitoring/patroli /koordinasi selama 12 bulan	0 Kali			
							Jumlah patroli	0 patroli			
							Jumlah Patroli dan Monitoring	0 Patroli			
							Jumlah Patroli dan Monitoring	48 patroli			
							jumlah patroli dan monitoring wilayah	0 patroli			
							Jumlah patroli dan monitoring wilayah	0 kali			
							Jumlah patroli dan monitoring wilayah	0 Monitoring			
							Jumlah patroli dan monitoring wilayah	0 patroli			
							Jumlah patroli dan monitoring wilayah	0 Patroli			
							Jumlah patroli dan monitoring wilayah	48 Patroli			
							Jumlah patroli dan monitoring wilayah	144 Patroli / Monitoring			
							Jumlah Patroli dan Monitoring Wilayah	0 Kali			
							Jumlah Patroli dan Monitoring Wilayah	0 patroli			
							Jumlah Patroli dan Monitoring Wilayah	0 Patroli			
							Jumlah Patroli dan Monitoring Wilayah	48 kali			
							Jumlah Patroli Monitoring wilayah	0 kali			
							Kegiatan Linmas	1 kegiatan			
							Linmas	0 Orang			
							Patroli Babinsa, Bhabinkamtibmas	144 kali			
							patroli wilayah	0 kegiatan			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam Indeks Pembangunan Masyarakat (IP Mas) Kecamatan	100 % 100 % 96 % 4.2 Angka	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan wilayah yang termonitoring Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Jumlah koordinasi Jumlah koordinasi	100 % 82 Angka 0.83 angka 5 kali 5 Kegiatan	7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	"Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan" Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Linmas / RT Jumlah unsur wilayah yang mendapatkan pembinaan oleh Forkopimcam (RT, RW, Linmas) Jumlah unsur wilayah yang mendapatkan pembinaan oleh Forkopimcam (RT, RW, Linmas) Jumlah Unsur Wilayah yang Mendapatkan Pembinaan oleh Forkopimcam (RT. RW.Linmas) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 12 Dokumen 2 Linmas 0 Unsur 3 unsur 0 lembaga 10 Unsur	Kota Malang	
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai kebutuhan	100 %	8.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							8.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Dokumen	Kota Malang	
				8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100 %	8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 pegawai 28 Orang/bulan	Kota Malang	
				8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100 %	8.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen pelaporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Dokumen 10 Laporan	Kota Malang	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100 %	8.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0 Eksemplar	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	104 Dokumen		
						8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152 Laporan		Kota Malang
			8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	100 %	8.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Peralatan Gedung Kantor	0 Unit		Kota Malang
			8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100 %	8.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan		Kota Malang
						8.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah bulan pembayaran belanja telepon, air dan listrik	0 Bulan		Kota Malang
						8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Malang
			8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %	8.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		Kota Malang
						8.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit		Kota Malang
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		
								Jumlah luasan ruangan yang dibersihkan	0 m2		
								Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	0 Unit		
								Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara	0 Jenis		
	8.01.02 PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	13 %	8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta	900 orang	8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	900 Orang		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Sejarah Kebangsaan jumlah peserta pertemuan	0 orang		
	8.01.03 PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat	60 %	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	jumlah parpol	10 parpol	8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah parpol penerima hibah	10 Orang 0 Parpol		
							8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah pelaku sosialisasi	150 Orang 0 Orang		
	8.01.04 PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase peran serta ormas dalam pembangunan	35 %	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	jumlah ormas yg terdata	120 ormas	8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Ormas yang terdata	120 Orang 0 Orang		
	8.01.05 PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan kondisi Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	75 %	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	jumlah peserta	1815 orang	8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah peserta	1815 Orang 0 Orang		
	8.01.06 PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan dan Keamanan	75 %	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	jumlah peserta	2272 orang	8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar	2272 Orang		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah personil pemantau, personil wasdin, personil FKDM, personil KPRM, personil TIMDU Konflik Sosial, Personil FORKOPIMDAasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0 Orang		
							Jumlah peserta rakor, sosialisasi, pembekalan, fgd	0 orang			

LAMPIRAN II

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	656.374.034.428	
1.01.2.22.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	656.374.034.428	
1.01.2.22.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	545.753.757.590	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	440.624.775.562	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000.000	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	132.413.488	
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	94.700.000	
1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.200.000	
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.200.000	
1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.200.000	
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	84.200.000	
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	167.086.512	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	430.587.172.573	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	430.375.069.085	
1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	168.953.488	
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.400.000	
1.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	14.400.000	
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14.350.000	
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	192.214.612	
1.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	84.798.250	
1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	107.416.362	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	227.875.000	
1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	85.000.000	
1.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	50.625.000	
1.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	92.250.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.105.997.794	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	164.117.498	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	205.000.000	
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.000.000	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	205.000.000	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	239.652.175	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	32.159.375	
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	154.154.875	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.070.913.871	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	906.796.373	
1.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	652.700.000	
1.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	107.625.000	
1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	146.471.373	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.286.833.148	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	128.002.000	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	640.625.000	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.518.206.148	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.817.886.062	
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.601.712	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.486.250.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	102.776.900	
1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	167.257.450	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	104.521.881.484	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	46.410.037.572	
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	5.586.360.000	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	2.944.923.000	
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.880.615.500	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	388.700.000	
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	440.000.000	
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	130.000.000	
1.01.02.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	199.705.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	28.597.381.272	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	150.000.000	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	130.000.000	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2.937.352.800	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	10.000.000	
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	15.000.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	21.381.051.800	
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	3.227.080.000	
1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	392.470.000	
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	703.435.000	
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	471.300.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	7.500.000	
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	130.000.000	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	14.547.500.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	200.000.000	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	185.000.000	
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.479.266.800	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	22.500.000	
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	15.000.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	32.724.592.112	
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	250.000.000	
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	150.000.000	
1.01.02.2.03.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	100.000.000	
1.01.02.2.03.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	100.000.000	
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	185.000.000	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	84.286.512	
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	16.700.105.600	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	40.000.000	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	15.115.200.000	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.006.200.000	
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	100.000.000	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	50.000.000	
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	150.000.000	
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.706.200.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	25.000.000	
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	25.000.000	
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	25.000.000	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	582.100.544	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	582.100.544	
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	510.769.872	
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	71.330.672	
1.01.2.22.0.00.02.0001	SMP NEGERI 01 MALANG	1.311.225.600	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.311.225.600	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.311.225.600	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	492.825.600	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	818.400.000	
1.01.2.22.0.00.02.0002	SMP NEGERI 02 MALANG	1.862.856.800	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.862.856.800	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.862.856.800	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	700.156.800	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.162.700.000	
1.01.2.22.0.00.02.0003	SMP NEGERI 03 MALANG	1.510.376.800	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.510.376.800	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.510.376.800	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	567.676.800	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	942.700.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.2.22.0.00.02.0004	SMP NEGERI 04 MALANG	1.515.664.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.515.664.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.515.664.000	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	569.664.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	946.000.000	
1.01.2.22.0.00.02.0005	SMP NEGERI 05 MALANG	1.545.624.800	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.545.624.800	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.545.624.800	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	580.924.800	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	964.700.000	
1.01.2.22.0.00.02.0006	SMP NEGERI 06 MALANG	1.321.801.400	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.321.801.400	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.321.801.400	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	496.801.400	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	825.000.000	
1.01.2.22.0.00.02.0007	SMP NEGERI 07 MALANG	1.529.763.340	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.529.763.340	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.529.763.340	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	574.963.340	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	954.800.000	
1.01.2.22.0.00.02.0008	SMP NEGERI 08 MALANG	1.339.424.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.339.424.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.339.424.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	503.424.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	836.000.000	
1.01.2.22.0.00.02.0009	SMP NEGERI 09 MALANG	1.277.740.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.277.740.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.277.740.000	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	480.240.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	797.500.000	
1.01.2.22.0.00.02.0010	SMP NEGERI 10 MALANG	1.533.288.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.533.288.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.533.288.000	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	576.288.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	957.000.000	
1.01.2.22.0.00.02.0011	SMP NEGERI 11 MALANG	1.425.753.500	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.425.753.500	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.425.753.500	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	535.853.500	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	889.900.000	
1.01.2.22.0.00.02.0012	SMP NEGERI 12 MALANG	1.300.651.200	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.300.651.200	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.300.651.200	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	488.851.200	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	811.800.000	
1.01.2.22.0.00.02.0013	SMP NEGERI 13 MALANG	1.468.079.200	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.468.079.200	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.468.079.200	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	551.779.200	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	916.300.000	
1.01.2.22.0.00.02.0014	SMP NEGERI 14 MALANG	1.346.473.600	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.346.473.600	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.346.473.600	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	506.073.600	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	840.400.000	
1.01.2.22.0.00.02.0015	SMP NEGERI 15 MALANG	1.739.488.300	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.739.488.300	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.739.488.300	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	653.788.300	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.085.700.000	
1.01.2.22.0.00.02.0016	SMP NEGERI 16 MALANG	1.337.661.600	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.337.661.600	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.337.661.600	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	502.761.600	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	834.900.000	
1.01.2.22.0.00.02.0017	SMP NEGERI 17 MALANG	1.452.217.600	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.452.217.600	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.452.217.600	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	545.817.600	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	906.400.000	
1.01.2.22.0.00.02.0018	SMP NEGERI 18 MALANG	1.459.267.200	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.459.267.200	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.459.267.200	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	548.467.200	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	910.800.000	
1.01.2.22.0.00.02.0019	SMP NEGERI 19 MALANG	1.570.298.400	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.570.298.400	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.570.298.400	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	590.198.400	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	980.100.000	
1.01.2.22.0.00.02.0020	SMP NEGERI 20 MALANG	1.543.660.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.543.660.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.543.660.000	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	582.260.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	961.400.000	
1.01.2.22.0.00.02.0021	SMP NEGERI 21 MALANG	1.711.290.400	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.711.290.400	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.711.290.400	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	643.190.400	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.068.100.000	
1.01.2.22.0.00.02.0022	SMP NEGERI 22 MALANG	1.090.925.600	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.090.925.600	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.090.925.600	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	410.025.600	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	680.900.000	
1.01.2.22.0.00.02.0023	SMP NEGERI 23 MALANG	1.117.361.600	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.117.361.600	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.117.361.600	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	419.961.600	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	697.400.000	
1.01.2.22.0.00.02.0024	SMP NEGERI 24 MALANG	1.166.720.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.166.720.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.166.720.000	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	438.520.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	728.200.000	
1.01.2.22.0.00.02.0025	SMP NEGERI 25 MALANG	659.137.600	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	659.137.600	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	659.137.600	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	247.737.600	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	411.400.000	
1.01.2.22.0.00.02.0026	SMP NEGERI 26 MALANG	1.018.667.200	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.018.667.200	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.018.667.200	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	382.867.200	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	635.800.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.2.22.0.00.02.0027	SMP NEGERI 27 MALANG	717.296.800	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	717.296.800	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	717.296.800	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	269.596.800	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	447.700.000	
1.01.2.22.0.00.02.0028	SD NEGERI KLOJEN	660.960.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	660.960.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	660.960.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	247.860.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	413.100.000	
1.01.2.22.0.00.02.0029	SD NEGERI ARJOSARI 01	463.680.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	463.680.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	463.680.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	173.880.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	289.800.000	
1.01.2.22.0.00.02.0030	SD NEGERI ARJOSARI 02	243.359.900	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	243.359.900	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	243.359.900	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	91.259.900	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	152.100.000	
1.01.2.22.0.00.02.0031	SD NEGERI ARJOSARI 03	239.040.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	239.040.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	239.040.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	89.640.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	149.400.000	
1.01.2.22.0.00.02.0032	SD NEGERI ARJOWINANGUN 01	290.880.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	290.880.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	290.880.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	109.080.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	181.800.000	
1.01.2.22.0.00.02.0033	SD NEGERI ARJOWINANGUN 02	547.200.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	547.200.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	547.200.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	205.200.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	342.000.000	
1.01.2.22.0.00.02.0034	SD NEGERI BAKALAN KRAJAN 01	721.440.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	721.440.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	721.440.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	270.540.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	450.900.000	
1.01.2.22.0.00.02.0035	SD NEGERI BAKALAN KRAJAN 02	511.200.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	511.200.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	511.200.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	191.700.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	319.500.000	
1.01.2.22.0.00.02.0036	SD NEGERI BALEARJOSARI 01	429.120.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	429.120.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	429.120.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	160.920.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	268.200.000	
1.01.2.22.0.00.02.0037	SD NEGERI BALEARJOSARI 02	190.080.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	190.080.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	190.080.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	71.280.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	118.800.000	
1.01.2.22.0.00.02.0038	SD NEGERI BANDULAN 01	250.200.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	250.200.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	250.200.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	93.600.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	156.600.000	
1.01.2.22.0.00.02.0039	SD NEGERI BANDULAN 02	398.880.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	398.880.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	398.880.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	149.580.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	249.300.000	
1.01.2.22.0.00.02.0040	SD NEGERI BANDULAN 03	331.200.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	331.200.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	331.200.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	124.200.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	207.000.000	
1.01.2.22.0.00.02.0041	SD NEGERI BANDULAN 04	273.600.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	273.600.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	273.600.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	102.600.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	171.000.000	
1.01.2.22.0.00.02.0042	SD NEGERI BANDULAN 05	256.320.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	256.320.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	256.320.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	96.120.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	160.200.000	
1.01.2.22.0.00.02.0043	SD NEGERI BANDUNGREJOSARI 01	731.520.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	731.520.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	731.520.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	274.320.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	457.200.000	
1.01.2.22.0.00.02.0044	SD NEGERI BANDUNGREJOSARI 02	491.040.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	491.040.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	491.040.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	184.140.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	306.900.000	
1.01.2.22.0.00.02.0045	SD NEGERI BANDUNGREJOSARI 03	483.840.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	483.840.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	483.840.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	181.440.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	302.400.000	
1.01.2.22.0.00.02.0046	SD NEGERI BANDUNGREJOSARI 04 (EX.9)	302.400.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	302.400.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	302.400.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	113.400.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	189.000.000	
1.01.2.22.0.00.02.0047	SD NEGERI BARENG 01	408.960.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	408.960.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	408.960.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	153.360.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	255.600.000	
1.01.2.22.0.00.02.0048	SD NEGERI BARENG 02	548.640.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	548.640.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	548.640.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	205.740.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	342.900.000	
1.01.2.22.0.00.02.0049	SD NEGERI BARENG 03	705.600.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	705.600.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	705.600.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	264.600.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	441.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.2.22.0.00.02.0050	SD NEGERI BARENG 04	171.900.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	171.900.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	171.900.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	64.800.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	107.100.000	
1.01.2.22.0.00.02.0051	SD NEGERI BARENG 05	150.300.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	150.300.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	150.300.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	64.800.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	85.500.000	
1.01.2.22.0.00.02.0052	SD NEGERI BLIMBING 01	486.720.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	486.720.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	486.720.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	182.520.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	304.200.000	
1.01.2.22.0.00.02.0053	SD NEGERI BLIMBING 02	205.920.200	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	205.920.200	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	205.920.200	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	77.220.200	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	128.700.000	
1.01.2.22.0.00.02.0054	SD NEGERI BLIMBING 03	498.240.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	498.240.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	498.240.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	186.840.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	311.400.000	
1.01.2.22.0.00.02.0055	SD NEGERI BLIMBING 04	440.640.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	440.640.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	440.640.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	165.240.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	275.400.000	
1.01.2.22.0.00.02.0056	SD NEGERI BLIMBING 05	237.599.150	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	237.599.150	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	237.599.150	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	89.099.150	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	148.500.000	
1.01.2.22.0.00.02.0057	SD NEGERI BUMIAYU 01	344.160.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	344.160.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	344.160.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	129.060.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	215.100.000	
1.01.2.22.0.00.02.0058	SD NEGERI BUMIAYU 02	357.120.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	357.120.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	357.120.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	133.920.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	223.200.000	
1.01.2.22.0.00.02.0059	SD NEGERI BUMIAYU 03	410.400.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	410.400.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	410.400.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	153.900.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	256.500.000	
1.01.2.22.0.00.02.0060	SD NEGERI BUMIAYU 04	253.440.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	253.440.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	253.440.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	95.040.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	158.400.000	
1.01.2.22.0.00.02.0061	SD NEGERI BUNULREJO 01	632.160.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	632.160.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	632.160.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	237.060.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	395.100.000	
1.01.2.22.0.00.02.0062	SD NEGERI BUNULREJO 02	724.320.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	724.320.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	724.320.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	271.620.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	452.700.000	
1.01.2.22.0.00.02.0063	SD NEGERI BUNULREJO 03	279.360.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	279.360.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	279.360.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	104.760.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	174.600.000	
1.01.2.22.0.00.02.0064	SD NEGERI BUNULREJO 04	455.400.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	455.400.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	455.400.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	170.100.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	285.300.000	
1.01.2.22.0.00.02.0065	SD NEGERI BUNULREJO 05	236.160.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	236.160.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	236.160.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	88.560.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	147.600.000	
1.01.2.22.0.00.02.0066	SD NEGERI BUNULREJO 06	509.006.800	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	509.006.800	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	509.006.800	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	258.095.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	250.911.800	
1.01.2.22.0.00.02.0067	SD NEGERI BURING	853.920.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	853.920.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	853.920.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	320.220.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	533.700.000	
1.01.2.22.0.00.02.0068	SD NEGERI CEMOROKANDANG 01	249.120.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	249.120.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	249.120.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	93.420.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	155.700.000	
1.01.2.22.0.00.02.0069	SD NEGERI CEMOROKANDANG 02	264.960.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	264.960.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	264.960.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	99.360.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	165.600.000	
1.01.2.22.0.00.02.0070	SD NEGERI CEMOROKANDANG 03	119.700.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	119.700.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	119.700.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	64.800.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	54.900.000	
1.01.2.22.0.00.02.0071	SD NEGERI CEMOROKANDANG 04	257.760.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	257.760.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	257.760.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	96.660.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	161.100.000	
1.01.2.22.0.00.02.0072	SD NEGERI CIPTOMULYO 01	678.240.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	678.240.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	678.240.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	254.340.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	423.900.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.2.22.0.00.02.0073	SD NEGERI CIPTOMULYO 02	322.560.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	322.560.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	322.560.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	120.960.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	201.600.000	
1.01.2.22.0.00.02.0074	SD NEGERI CIPTOMULYO 03	279.360.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	279.360.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	279.360.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	104.760.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	174.600.000	
1.01.2.22.0.00.02.0075	SD NEGERI DINOYO 01	277.920.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	277.920.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	277.920.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	104.220.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	173.700.000	
1.01.2.22.0.00.02.0076	SD NEGERI DINOYO 02	727.200.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	727.200.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	727.200.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	272.700.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	454.500.000	
1.01.2.22.0.00.02.0077	SD NEGERI DINOYO 03	224.640.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	224.640.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	224.640.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	84.240.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	140.400.000	
1.01.2.22.0.00.02.0078	SD NEGERI DINOYO 04	237.600.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	237.600.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	237.600.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	89.100.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	148.500.000	
1.01.2.22.0.00.02.0079	SD NEGERI GADANG 01	708.480.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	708.480.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	708.480.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	265.680.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	442.800.000	
1.01.2.22.0.00.02.0080	SD NEGERI GADANG 02	214.559.988	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	214.559.988	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	214.559.988	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	80.459.988	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	134.100.000	
1.01.2.22.0.00.02.0081	SD NEGERI GADANG 03	352.800.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	352.800.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	352.800.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	132.300.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	220.500.000	
1.01.2.22.0.00.02.0082	SD NEGERI GADANG 04	478.080.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	478.080.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	478.080.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	179.280.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	298.800.000	
1.01.2.22.0.00.02.0083	SD NEGERI GADING KASRI	213.120.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	213.120.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	213.120.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	79.920.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	133.200.000	
1.01.2.22.0.00.02.0084	SD NEGERI JATIMULYO 01	214.560.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	214.560.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	214.560.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	80.460.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	134.100.000	
1.01.2.22.0.00.02.0085	SD NEGERI JATIMULYO 02	243.360.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	243.360.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	243.360.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	91.260.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	152.100.000	
1.01.2.22.0.00.02.0086	SD NEGERI JATIMULYO 03	237.600.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	237.600.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	237.600.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	89.100.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	148.500.000	
1.01.2.22.0.00.02.0087	SD NEGERI JATIMULYO 04	187.033.200	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	187.033.200	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	187.033.200	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	96.464.200	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	90.569.000	
1.01.2.22.0.00.02.0088	SD NEGERI JATIMULYO 05	171.900.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	171.900.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	171.900.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	64.800.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	107.100.000	
1.01.2.22.0.00.02.0089	SD NEGERI JODIPAN	709.920.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	709.920.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	709.920.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	266.220.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	443.700.000	
1.01.2.22.0.00.02.0090	SD NEGERI KARANGBESUKI 01	243.360.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	243.360.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	243.360.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	91.260.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	152.100.000	
1.01.2.22.0.00.02.0091	SD NEGERI KARANGBESUKI 02	250.560.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	250.560.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	250.560.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	93.960.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	156.600.000	
1.01.2.22.0.00.02.0092	SD NEGERI KARANGBESUKI 03	292.320.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	292.320.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	292.320.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	109.620.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	182.700.000	
1.01.2.22.0.00.02.0093	SD NEGERI KARANGBESUKI 04	227.520.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	227.520.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	227.520.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	85.320.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	142.200.000	
1.01.2.22.0.00.02.0094	SD NEGERI KASIN	727.200.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	727.200.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	727.200.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	272.700.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	454.500.000	
1.01.2.22.0.00.02.0095	SD NEGERI KAUMAN 01	963.000.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	963.000.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	963.000.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	481.500.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	481.500.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.2.22.0.00.02.0096	SD NEGERI KAUMAN 02	421.920.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	421.920.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	421.920.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	158.220.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	263.700.000	
1.01.2.22.0.00.02.0097	SD NEGERI KAUMAN 03	312.480.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	312.480.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	312.480.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	117.180.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	195.300.000	
1.01.2.22.0.00.02.0098	SD NEGERI KEBONSARI 01	253.440.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	253.440.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	253.440.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	95.040.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	158.400.000	
1.01.2.22.0.00.02.0099	SD NEGERI KEBONSARI 02	699.840.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	699.840.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	699.840.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	262.440.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	437.400.000	
1.01.2.22.0.00.02.0100	SD NEGERI KEBONSARI 03	390.240.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	390.240.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	390.240.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	146.340.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	243.900.000	
1.01.2.22.0.00.02.0101	SD NEGERI KEBONSARI 04	259.200.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	259.200.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	259.200.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	97.200.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	162.000.000	
1.01.2.22.0.00.02.0102	SD NEGERI KEDUNGKANDANG 01	381.600.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	381.600.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	381.600.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	143.100.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	238.500.000	
1.01.2.22.0.00.02.0103	SD NEGERI KEDUNGKANDANG 02	483.840.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	483.840.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	483.840.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	181.440.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	302.400.000	
1.01.2.22.0.00.02.0104	SD NEGERI KESATRIAN 01	872.640.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	872.640.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	872.640.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	327.240.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	545.400.000	
1.01.2.22.0.00.02.0105	SD NEGERI KESATRIAN 02	226.080.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	226.080.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	226.080.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	84.780.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	141.300.000	
1.01.2.22.0.00.02.0106	SD NEGERI KETAWANGGEDE	534.638.900	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	534.638.900	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	534.638.900	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	208.980.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	325.658.900	
1.01.2.22.0.00.02.0107	SD NEGERI KIDULDALEM 01	187.200.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	187.200.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	187.200.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	70.200.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	117.000.000	
1.01.2.22.0.00.02.0108	SD NEGERI KIDULDALEM 02	230.400.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	230.400.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	230.400.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	86.400.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	144.000.000	
1.01.2.22.0.00.02.0109	SD NEGERI KOTALAMA 01	722.880.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	722.880.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	722.880.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	271.080.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	451.800.000	
1.01.2.22.0.00.02.0110	SD NEGERI KOTALAMA 02	480.960.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	480.960.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	480.960.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	180.360.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	300.600.000	
1.01.2.22.0.00.02.0111	SD NEGERI KOTALAMA 03	364.320.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	364.320.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	364.320.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	136.620.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	227.700.000	
1.01.2.22.0.00.02.0112	SD NEGERI KOTALAMA 04	241.920.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	241.920.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	241.920.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	90.720.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	151.200.000	
1.01.2.22.0.00.02.0113	SD NEGERI KOTALAMA 05	449.280.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	449.280.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	449.280.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	168.480.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	280.800.000	
1.01.2.22.0.00.02.0114	SD NEGERI KOTALAMA 06	239.040.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	239.040.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	239.040.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	89.640.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	149.400.000	
1.01.2.22.0.00.02.0115	SD NEGERI LESANPURO 01	266.400.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	266.400.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	266.400.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	99.900.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	166.500.000	
1.01.2.22.0.00.02.0116	SD NEGERI LESANPURO 02	244.800.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	244.800.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	244.800.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	91.800.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	153.000.000	
1.01.2.22.0.00.02.0117	SD NEGERI LESANPURO 03	493.920.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	493.920.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	493.920.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	185.220.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	308.700.000	
1.01.2.22.0.00.02.0118	SD NEGERI LESANPURO 04	640.800.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	640.800.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	640.800.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	240.300.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	400.500.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.2.22.0.00.02.0119	SD NEGERI LOWOKWARU 01	305.280.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	305.280.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	305.280.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	114.480.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	190.800.000	
1.01.2.22.0.00.02.0120	SD NEGERI LOWOKWARU 02	810.720.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	810.720.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	810.720.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	304.020.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	506.700.000	
1.01.2.22.0.00.02.0121	SD NEGERI LOWOKWARU 03	717.120.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	717.120.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	717.120.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	268.920.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	448.200.000	
1.01.2.22.0.00.02.0122	SD NEGERI LOWOKWARU 04	443.520.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	443.520.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	443.520.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	166.320.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	277.200.000	
1.01.2.22.0.00.02.0123	SD NEGERI LOWOKWARU 05	236.160.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	236.160.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	236.160.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	88.560.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	147.600.000	
1.01.2.22.0.00.02.0124	SD NEGERI MADYOPURO 01	468.000.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	468.000.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	468.000.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	175.500.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	292.500.000	
1.01.2.22.0.00.02.0125	SD NEGERI MADYOPURO 02	293.760.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	293.760.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	293.760.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	110.160.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	183.600.000	
1.01.2.22.0.00.02.0126	SD NEGERI MADYOPURO 03	354.240.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	354.240.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	354.240.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	132.840.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	221.400.000	
1.01.2.22.0.00.02.0127	SD NEGERI MADYOPURO 04	489.600.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	489.600.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	489.600.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	183.600.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	306.000.000	
1.01.2.22.0.00.02.0128	SD NEGERI MADYOPURO 05	491.040.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	491.040.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	491.040.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	184.140.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	306.900.000	
1.01.2.22.0.00.02.0129	SD NEGERI MADYOPURO 06	221.760.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	221.760.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	221.760.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	83.160.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	138.600.000	
1.01.2.22.0.00.02.0130	SD NEGERI MERGOSONO 01	498.240.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	498.240.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	498.240.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	186.840.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	311.400.000	
1.01.2.22.0.00.02.0131	SD NEGERI MERGOSONO 02	430.560.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	430.560.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	430.560.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	161.460.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	269.100.000	
1.01.2.22.0.00.02.0132	SD NEGERI MERGOSONO 03	237.600.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	237.600.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	237.600.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	89.100.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	148.500.000	
1.01.2.22.0.00.02.0133	SD NEGERI MERGOSONO 04	236.160.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	236.160.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	236.160.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	88.560.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	147.600.000	
1.01.2.22.0.00.02.0134	SD NEGERI MERGOSONO 05	191.520.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	191.520.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	191.520.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	71.820.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	119.700.000	
1.01.2.22.0.00.02.0135	SD NEGERI MERJOSARI 01	286.598.200	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	286.598.200	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	286.598.200	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	147.653.300	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	138.944.900	
1.01.2.22.0.00.02.0136	SD NEGERI MERJOSARI 02	291.838.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	291.838.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	291.838.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	150.347.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	141.491.000	
1.01.2.22.0.00.02.0137	SD NEGERI MERJOSARI 03	239.040.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	239.040.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	239.040.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	89.640.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	149.400.000	
1.01.2.22.0.00.02.0138	SD NEGERI MERJOSARI 04	237.600.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	237.600.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	237.600.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	89.100.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	148.500.000	
1.01.2.22.0.00.02.0139	SD NEGERI MERJOSARI 05	266.400.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	266.400.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	266.400.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	99.900.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	166.500.000	
1.01.2.22.0.00.02.0140	SD NEGERI MODEL KOTA MALANG	1.452.600.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.452.600.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.452.600.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	726.300.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	726.300.000	
1.01.2.22.0.00.02.0141	SD NEGERI MOJOLANGU 01	175.680.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	175.680.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	175.680.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	65.880.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	109.800.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.2.22.0.00.02.0142	SD NEGERI MOJOLANGU 02	216.000.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	216.000.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	216.000.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	81.000.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	135.000.000	
1.01.2.22.0.00.02.0143	SD NEGERI MOJOLANGU 03	237.600.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	237.600.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	237.600.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	89.100.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	148.500.000	
1.01.2.22.0.00.02.0144	SD NEGERI MOJOLANGU 04	198.720.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	198.720.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	198.720.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	74.520.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	124.200.000	
1.01.2.22.0.00.02.0145	SD NEGERI MOJOLANGU 05	207.360.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	207.360.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	207.360.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	77.760.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	129.600.000	
1.01.2.22.0.00.02.0146	SD NEGERI MULYOREJO 01	393.120.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	393.120.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	393.120.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	147.420.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	245.700.000	
1.01.2.22.0.00.02.0147	SD NEGERI MULYOREJO 02	479.520.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	479.520.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	479.520.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	179.820.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	299.700.000	
1.01.2.22.0.00.02.0148	SD NEGERI MULYOREJO 03	555.840.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	555.840.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	555.840.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	208.440.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	347.400.000	
1.01.2.22.0.00.02.0149	SD NEGERI ORO-ORO DOWO	170.100.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	170.100.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	170.100.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	64.800.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	105.300.000	
1.01.2.22.0.00.02.0150	SD NEGERI PANDANWANGI 01	669.600.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	669.600.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	669.600.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	251.100.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	418.500.000	
1.01.2.22.0.00.02.0151	SD NEGERI PANDANWANGI 02	233.280.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	233.280.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	233.280.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	87.480.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	145.800.000	
1.01.2.22.0.00.02.0152	SD NEGERI PANDANWANGI 03	658.080.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	658.080.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	658.080.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	246.780.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	411.300.000	
1.01.2.22.0.00.02.0153	SD NEGERI PANDANWANGI 04	236.160.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	236.160.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	236.160.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	88.560.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	147.600.000	
1.01.2.22.0.00.02.0154	SD NEGERI PANDANWANGI 05	239.040.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	239.040.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	239.040.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	89.640.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	149.400.000	
1.01.2.22.0.00.02.0155	SD NEGERI PENANGGUNGAN	449.280.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	449.280.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	449.280.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	168.480.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	280.800.000	
1.01.2.22.0.00.02.0156	SD NEGERI PERCOBAAN 01	527.040.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	527.040.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	527.040.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	197.640.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	329.400.000	
1.01.2.22.0.00.02.0157	SD NEGERI PERCOBAAN 02	951.840.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	951.840.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	951.840.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	356.940.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	594.900.000	
1.01.2.22.0.00.02.0158	SD NEGERI PISANGCANDI 02	282.240.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	282.240.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	282.240.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	105.840.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	176.400.000	
1.01.2.22.0.00.02.0159	SD NEGERI PISANGCANDI 03	148.500.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	148.500.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	148.500.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	64.800.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	83.700.000	
1.01.2.22.0.00.02.0160	SD NEGERI PISANGCANDI 04	190.080.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	190.080.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	190.080.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	71.280.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	118.800.000	
1.01.2.22.0.00.02.0161	SD NEGERI PISANGCANDI 01	316.800.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	316.800.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	316.800.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	118.800.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	198.000.000	
1.01.2.22.0.00.02.0162	SD NEGERI POLEHAN 01	228.960.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	228.960.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	228.960.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	85.860.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	143.100.000	
1.01.2.22.0.00.02.0163	SD NEGERI POLEHAN 02	509.760.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	509.760.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	509.760.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	191.160.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	318.600.000	
1.01.2.22.0.00.02.0164	SD NEGERI POLEHAN 03	619.200.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	619.200.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	619.200.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	232.200.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	387.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.2.22.0.00.02.0165	SD NEGERI POLEHAN 04	246.240.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	246.240.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	246.240.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	92.340.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	153.900.000	
1.01.2.22.0.00.02.0166	SD NEGERI POLEHAN 05	198.720.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	198.720.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	198.720.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	74.520.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	124.200.000	
1.01.2.22.0.00.02.0167	SD NEGERI POLOWIJEN 01	207.360.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	207.360.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	207.360.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	77.760.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	129.600.000	
1.01.2.22.0.00.02.0168	SD NEGERI POLOWIJEN 02	223.200.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	223.200.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	223.200.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	83.700.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	139.500.000	
1.01.2.22.0.00.02.0169	SD NEGERI POLOWIJEN 03	234.720.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	234.720.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	234.720.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	88.020.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	146.700.000	
1.01.2.22.0.00.02.0170	SD NEGERI PURWANTORO 01	717.120.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	717.120.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	717.120.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	268.920.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	448.200.000	
1.01.2.22.0.00.02.0171	SD NEGERI PURWANTORO 02	433.440.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	433.440.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	433.440.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	162.540.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	270.900.000	
1.01.2.22.0.00.02.0172	SD NEGERI PURWANTORO 03	213.120.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	213.120.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	213.120.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	79.920.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	133.200.000	
1.01.2.22.0.00.02.0173	SD NEGERI PURWANTORO 04	216.000.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	216.000.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	216.000.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	81.000.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	135.000.000	
1.01.2.22.0.00.02.0174	SD NEGERI PURWANTORO 05	132.300.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	132.300.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	132.300.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	64.800.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	67.500.000	
1.01.2.22.0.00.02.0175	SD NEGERI PURWANTORO 06	208.800.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	208.800.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	208.800.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	78.300.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	130.500.000	
1.01.2.22.0.00.02.0176	SD NEGERI PURWANTORO 07	149.400.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	149.400.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	149.400.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	64.800.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	84.600.000	
1.01.2.22.0.00.02.0177	SD NEGERI PURWANTORO 08	400.320.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	400.320.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	400.320.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	150.120.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	250.200.000	
1.01.2.22.0.00.02.0178	SD NEGERI PURWODADI 01	465.120.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	465.120.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	465.120.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	174.420.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	290.700.000	
1.01.2.22.0.00.02.0179	SD NEGERI PURWODADI 02	237.600.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	237.600.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	237.600.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	89.100.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	148.500.000	
1.01.2.22.0.00.02.0180	SD NEGERI PURWODADI 03	192.960.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	192.960.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	192.960.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	72.360.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	120.600.000	
1.01.2.22.0.00.02.0181	SD NEGERI PURWODADI 04	217.440.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	217.440.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	217.440.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	81.540.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	135.900.000	
1.01.2.22.0.00.02.0182	SD NEGERI RAMPAL CELAKET 01	421.920.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	421.920.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	421.920.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	158.220.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	263.700.000	
1.01.2.22.0.00.02.0183	SD NEGERI RAMPAL CELAKET 02	380.160.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	380.160.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	380.160.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	142.560.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	237.600.000	
1.01.2.22.0.00.02.0184	SD NEGERI SAWOJAJAR 01	702.720.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	702.720.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	702.720.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	263.520.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	439.200.000	
1.01.2.22.0.00.02.0185	SD NEGERI SAWOJAJAR 02	244.800.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	244.800.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	244.800.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	91.800.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	153.000.000	
1.01.2.22.0.00.02.0186	SD NEGERI SAWOJAJAR 03	246.240.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	246.240.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	246.240.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	92.340.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	153.900.000	
1.01.2.22.0.00.02.0187	SD NEGERI SAWOJAJAR 04	233.280.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	233.280.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	233.280.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	87.480.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	145.800.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.2.22.0.00.02.0188	SD NEGERI SAWOJAJAR 05	476.640.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	476.640.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	476.640.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	178.740.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	297.900.000	
1.01.2.22.0.00.02.0189	SD NEGERI SAWOJAJAR 06	531.360.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	531.360.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	531.360.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	199.260.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	332.100.000	
1.01.2.22.0.00.02.0190	SD NEGERI SUKOHARJO 01	433.400.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	433.400.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	433.400.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	162.500.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	270.900.000	
1.01.2.22.0.00.02.0191	SD NEGERI SUKOHARJO 02	223.200.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	223.200.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	223.200.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	83.700.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	139.500.000	
1.01.2.22.0.00.02.0192	SD NEGERI SUKUN 01	691.200.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	691.200.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	691.200.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	259.200.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	432.000.000	
1.01.2.22.0.00.02.0193	SD NEGERI SUKUN 02	483.840.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	483.840.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	483.840.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	181.440.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	302.400.000	
1.01.2.22.0.00.02.0194	SD NEGERI SUKUN 03	491.039.500	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	491.039.500	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	491.039.500	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	184.139.500	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	306.900.000	
1.01.2.22.0.00.02.0195	SD NEGERI SUMBERSARI 01	313.920.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	313.920.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	313.920.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	117.720.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	196.200.000	
1.01.2.22.0.00.02.0196	SD NEGERI SUMBERSARI 02	191.520.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	191.520.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	191.520.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	71.820.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	119.700.000	
1.01.2.22.0.00.02.0197	SD NEGERI SUMBERSARI 03	228.960.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	228.960.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	228.960.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	85.860.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	143.100.000	
1.01.2.22.0.00.02.0198	SD NEGERI TANJUNGREJO 01	240.480.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	240.480.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	240.480.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	90.180.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	150.300.000	
1.01.2.22.0.00.02.0199	SD NEGERI TANJUNGREJO 02	554.400.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	554.400.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	554.400.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	207.900.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	346.500.000	
1.01.2.22.0.00.02.0200	SD NEGERI TANJUNGREJO 03 (EX IV)	240.480.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	240.480.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	240.480.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	90.180.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	150.300.000	
1.01.2.22.0.00.02.0201	SD NEGERI TANJUNGREJO 04	236.160.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	236.160.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	236.160.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	88.560.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	147.600.000	
1.01.2.22.0.00.02.0202	SD NEGERI TANJUNGREJO 05	322.560.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	322.560.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	322.560.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	120.960.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	201.600.000	
1.01.2.22.0.00.02.0203	SD NEGERI TASIKMADU 01	407.520.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	407.520.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	407.520.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	152.820.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	254.700.000	
1.01.2.22.0.00.02.0204	SD NEGERI TASIKMADU 02	462.240.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	462.240.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	462.240.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	173.340.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	288.900.000	
1.01.2.22.0.00.02.0205	SD NEGERI TLOGOMAS 01	226.080.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	226.080.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	226.080.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	84.780.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	141.300.000	
1.01.2.22.0.00.02.0206	SD NEGERI TLOGOMAS 02	640.800.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	640.800.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	640.800.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	240.300.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	400.500.000	
1.01.2.22.0.00.02.0207	SD NEGERI TLOGOWARU 01	276.480.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	276.480.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	276.480.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	103.680.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	172.800.000	
1.01.2.22.0.00.02.0208	SD NEGERI TLOGOWARU 02	180.000.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	180.000.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	180.000.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	67.500.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	112.500.000	
1.01.2.22.0.00.02.0209	SD NEGERI TULUSREJO 01	194.400.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	194.400.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	194.400.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	72.900.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	121.500.000	
1.01.2.22.0.00.02.0210	SD NEGERI TULUSREJO 02	208.800.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	208.800.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	208.800.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	78.300.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	130.500.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.2.22.0.00.02.0211	SD NEGERI TULUSREJO 03	253.440.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	253.440.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	253.440.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	95.040.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	158.400.000	
1.01.2.22.0.00.02.0212	SD NEGERI TULUSREJO 04	137.698.700	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	137.698.700	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	137.698.700	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	64.798.700	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	72.900.000	
1.01.2.22.0.00.02.0213	SD NEGERI TUNGGULWULUNG 01	257.760.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	257.760.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	257.760.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	96.660.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	161.100.000	
1.01.2.22.0.00.02.0214	SD NEGERI TUNGGULWULUNG 02	250.560.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	250.560.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	250.560.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	93.960.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	156.600.000	
1.01.2.22.0.00.02.0215	SD NEGERI TUNGGULWULUNG 03	234.720.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	234.720.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	234.720.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	88.020.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	146.700.000	
1.01.2.22.0.00.02.0216	SD NEGERI TUNJUNGSEKAR 01	714.240.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	714.240.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	714.240.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	267.840.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	446.400.000	
1.01.2.22.0.00.02.0217	SD NEGERI TUNJUNGSEKAR 02	213.120.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	213.120.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	213.120.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	79.920.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	133.200.000	
1.01.2.22.0.00.02.0218	SD NEGERI TUNJUNGSEKAR 03	384.480.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	384.480.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	384.480.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	144.180.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	240.300.000	
1.01.2.22.0.00.02.0219	SD NEGERI TUNJUNGSEKAR 04	168.300.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	168.300.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	168.300.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	64.800.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	103.500.000	
1.01.2.22.0.00.02.0220	SD NEGERI TUNJUNGSEKAR 05	283.680.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	283.680.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	283.680.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	106.380.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	177.300.000	
1.01.2.22.0.00.02.0221	SD NEGERI WONOKOYO 01	241.920.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	241.920.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	241.920.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	90.720.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	151.200.000	
1.01.2.22.0.00.02.0222	SD NEGERI WONOKOYO 02	115.200.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	115.200.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	115.200.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	64.800.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	50.400.000	
1.01.2.22.0.00.02.0223	TK N PEMBINA 01	25.000.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	25.000.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	25.000.000	
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	25.000.000	
1.01.2.22.0.00.02.0224	TK N PEMBINA 03	25.000.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	25.000.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	25.000.000	
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	25.000.000	
1.01.2.22.0.00.02.0225	TK N PEMBINA 2	25.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	25.000.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	25.000.000	
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	25.000.000	
1.01.2.22.0.00.02.0226	TK NEGERI PEMBINA 5	25.000.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	25.000.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	25.000.000	
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	25.000.000	
1.01.2.22.0.00.02.0227	UPT Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus	725.526.272	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	725.526.272	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	725.526.272	
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	725.526.272	
1.01.2.22.0.00.02.0228	Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar	197.103.488	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	197.103.488	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	197.103.488	
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	197.103.488	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	376.506.774.571	
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	376.506.774.571	
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	289.806.032.094	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	128.413.331.942	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.624.000	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	59.624.000	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	125.350.572.108	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	125.187.486.108	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	163.086.000	
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	172.490.000	
1.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	45.000.000	
1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	127.490.000	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79.338.000	
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	79.338.000	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.479.779.334	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.514.100	
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	396.856.000	
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.500.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	866.909.234	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	144.310.000	
1.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	144.310.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	653.780.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	270.000.000	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	383.780.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	473.438.500	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.600.000	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	254.870.000	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	148.310.000	
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.658.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	152.194.180.152	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	16.747.102.700	
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	7.964.900.000	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	222.070.000	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	5.866.780.000	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.447.572.700	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	245.780.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	135.104.477.452	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	63.652.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	111.760.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	82.350.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	76.610.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.008.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	9.000.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	68.325.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	33.840.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	59.049.300	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	124.480.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	100.000.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	834.695.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	165.050.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	185.522.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	105.940.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	47.510.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	111.106.000	
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1.229.690.272	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	234.000.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	130.755.927.880	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	293.882.000	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	292.080.000	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	100.000.000	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	342.600.000	
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	245.820.000	
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46.780.000	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	50.000.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	219.390.000	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	81.390.000	
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	81.390.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	138.000.000	
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	138.000.000	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	223.250.000	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	73.250.000	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	73.250.000	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	150.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	150.000.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	8.755.880.000	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.000.000.000	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	55.000.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.700.880.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.700.880.000	
1.02.0.00.0.00.01.0001	UPT Laboratorium Kesehatan Daerah	1.273.200.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.273.200.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.273.200.000	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.273.200.000	
1.02.0.00.0.00.01.0002	Rumah Sakit Umum Daerah	53.571.926.900	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.000.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	40.000.000.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	40.000.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	12.571.926.900	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6.931.686.900	
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	300.000.000	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.115.320.000	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	1.570.366.900	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	946.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.000.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.965.320.000	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4.965.320.000	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	674.920.000	
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	674.920.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.000.000.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.000.000.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.000.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Janti	2.951.970.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.880.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.880.000.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.880.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	71.970.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	71.970.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	71.970.000	
1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas Dinoyo	2.316.970.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.220.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.220.000.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.220.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	96.970.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	96.970.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	96.970.000	
1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Mojolangu	1.589.600.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.514.600.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.514.600.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.514.600.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	75.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	75.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Kendalsari	1.794.205.700	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.694.205.700	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.694.205.700	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.694.205.700	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	100.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Arjuno	1.295.000.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.220.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.220.000.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.220.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	75.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	75.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Rampal Celaket	1.238.800.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.163.800.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.163.800.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.163.800.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	75.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	75.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Bareng	1.859.968.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.784.968.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.784.968.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.784.968.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	75.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	75.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Kedungkandang	3.525.182.465	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.425.182.465	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.425.182.465	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.425.182.465	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	100.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Gribig	1.979.055.720	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.904.055.720	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.904.055.720	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.904.055.720	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	75.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	75.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Arjowinangun	1.945.800.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.870.800.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.870.800.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.870.800.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	75.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	75.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0013	Puskesmas Mulyorejo	2.324.949.785	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.224.949.785	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.224.949.785	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.224.949.785	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	100.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0014	Puskesmas Ciptomulyo	1.871.400.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.796.400.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.796.400.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.796.400.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	75.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	75.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.0.00.0.00.01.0015	Puskesmas Kedalkerep	2.423.506.888	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.323.506.888	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.323.506.888	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.323.506.888	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	100.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0016	Puskesmas Pandanwangi	1.594.182.019	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.519.182.019	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.519.182.019	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.519.182.019	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	75.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	75.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0017	Puskesmas Polowijen	1.659.000.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.559.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.559.000.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.559.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	100.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0018	Puskesmas Cisadea	1.486.025.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.411.025.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.411.025.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.411.025.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	75.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	75.000.000	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	408.993.501.055	
1.03.1.04.2.10.10.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	408.993.501.055	
1.03.1.04.2.10.10.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	406.688.897.735	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.957.106.582	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.336.457.633	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	326.023.900	
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	23.620.000	
1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	23.970.000	
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.120.000	
1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	12.820.000	
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	561.257.024	
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	378.646.709	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.202.901.549	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.003.392.901	
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	199.508.648	
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	291.816.048	
1.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	291.816.048	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	262.309.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	262.309.000	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.193.908.200	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.720.000	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	268.591.200	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	370.888.000	
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	155.110.000	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	354.599.000	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.122.980.136	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	488.786.636	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.368.862.500	
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	265.331.000	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.546.734.016	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.273.776.500	
1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.272.957.516	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.483.350.000	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	979.490.000	
1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	979.490.000	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	503.860.000	
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	503.860.000	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	763.470.000	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	763.470.000	
1.03.03.2.01.14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	497.210.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	266.260.000	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.758.195.750	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.758.195.750	
1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	535.540.000	
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1.951.550.000	
1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	428.180.000	
1.03.05.2.01.09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	693.135.750	
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	2.149.790.000	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	59.714.288.531	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	59.714.288.531	
1.03.06.2.01.02	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	255.040.000	
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	24.854.358.500	
1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	29.098.239.700	
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	5.506.650.331	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	26.705.061.631	
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	26.705.061.631	
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	20.441.661.266	
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6.263.400.365	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	37.515.809.673	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	37.515.809.673	
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	997.005.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	587.961.250	
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	32.796.108.823	
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	3.134.734.600	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	4.740.440.000	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	4.740.440.000	
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	384.280.000	
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	4.356.160.000	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	238.249.400.432	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	238.249.400.432	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	10.016.610.000	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	21.474.368.000	
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	117.532.686.962	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	40.443.920.272	
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	42.814.255.198	
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.983.780.000	
1.03.10.2.01.20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	2.983.780.000	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.033.020.000	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	466.170.000	
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	466.170.000	
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	387.490.000	
1.03.11.2.02.02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	387.490.000	
1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	179.360.000	
1.03.11.2.03.03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	179.360.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	4.768.755.136	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	2.100.720.000	
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1.954.760.000	
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	145.960.000	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2.091.345.136	
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1.793.210.000	
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	298.135.136	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	576.690.000	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	576.690.000	
1.03.1.04.2.10.10.0001	UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi	1.355.646.848	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.355.646.848	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.355.646.848	
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	1.355.646.848	
1.03.1.04.2.10.10.0002	UPT Pengolahan Air Limbah Daerah	948.956.472	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	948.956.472	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	948.956.472	
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	607.630.550	
1.03.05.2.01.14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	341.325.922	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.269.966.224	
1.03.1.04.2.10.10.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.269.966.224	
1.03.1.04.2.10.10.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.069.966.224	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	284.830.000	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	93.110.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	93.110.000	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	191.720.000	
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	191.720.000	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	505.110.000	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	505.110.000	
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	505.110.000	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.280.026.224	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.280.026.224	
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1.280.026.224	
1.03.1.04.2.10.10.0003	UPT Rumah Susun Sederhana Sewa	3.200.000.000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3.200.000.000	
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	3.200.000.000	
1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	3.200.000.000	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	40.336.408.027	
1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	31.979.836.529	
1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	29.534.534.641	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.136.582.249	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	265.075.712	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67.214.000	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	97.861.712	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.988.351.117	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.947.551.117	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	40.800.000	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	883.110.000	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	641.130.000	
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	241.980.000	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	903.035.270	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.726.000	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	144.000.000	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	92.543.270	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	615.766.000	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	162.126.000	
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	162.126.000	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	326.617.250	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	170.252.174	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.163.000	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105.202.076	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.608.266.900	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.528.266.900	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.397.952.392	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.888.629.712	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	4.466.825.712	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.928.370.000	
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	493.434.000	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.509.322.680	
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.209.562.680	
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	299.760.000	
1.05.0.00.0.00.01.0001	UPT Pemadam Kebakaran	2.445.301.888	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.445.301.888	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.062.022.888	
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	97.101.800	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	379.921.088	
1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	200.000.000	
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.185.000.000	
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	200.000.000	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	383.279.000	
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	383.279.000	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.356.571.498	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.356.571.498	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.098.056.798	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	268.480.000	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	78.360.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48.200.000	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	141.920.000	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.080.958.203	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.041.988.203	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	38.970.000	
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.200.000	
1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.200.000	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.000.000	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45.000.000	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	444.387.250	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.107.650	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	284.279.600	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	429.818.000	
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	212.608.000	
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	217.210.000	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	421.969.830	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	271.969.830	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	399.243.515	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	221.361.400	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	17.980.000	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.912.115	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	83.990.000	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.258.514.700	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	219.004.700	
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	219.004.700	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.040.990.000	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	501.280.000	
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	285.290.000	
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	194.420.000	
1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	60.000.000	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	788.430.000	
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	596.510.000	
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	191.920.000	
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	210.090.000	
1.05.03.2.04.06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	210.090.000	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	34.033.481.211	
1.06.2.08.2.14.06.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	34.033.481.211	
1.06.2.08.2.14.06.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	34.033.481.211	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.167.422.675	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	207.800.100	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	96.110.000	
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	87.780.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.910.100	
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.646.652.207	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.642.152.207	
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.500.000	
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	71.000.000	
1.06.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	71.000.000	
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	224.330.000	
1.06.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	224.330.000	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.159.035.873	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	210.619.962	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	129.330.000	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.000.000	
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.734.085.911	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	357.415.745	
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	357.415.745	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.508.328.750	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	115.392.000	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	325.410.000	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.067.526.750	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	992.860.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	600.000.000	
1.06.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	9.500.000	
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	323.360.000	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.826.708.000	
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	40.000.000	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2.786.708.000	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.586.708.000	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.200.000.000	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	15.364.067.900	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	5.458.498.300	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	4.352.570.000	
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	24.730.000	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	224.120.000	
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	13.890.000	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	825.133.300	
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	1.500.000	
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.975.000	
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	14.580.000	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	9.905.569.600	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	21.240.000	
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	9.842.273.600	
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	6.930.000	
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	19.786.000	
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5.240.000	
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	4.100.000	
1.06.04.2.02.14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	6.000.000	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	113.989.712	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	13.530.000	
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	7.150.000	
1.06.05.2.01.03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	6.380.000	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100.459.712	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100.459.712	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	289.520.000	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	239.520.000	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	153.645.000	
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	50.000.000	
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	35.875.000	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	50.000.000	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	271.772.924	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	271.772.924	
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	271.772.924	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	21.475.442.315	
2.07.2.18.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21.475.442.315	
2.07.2.18.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21.475.442.315	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.364.532.215	
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	116.420.000	
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.000.000	
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	94.420.000	
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.076.430.526	
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.048.235.526	
2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	28.195.000	
2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.275.000	
2.07.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.275.000	
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	197.700.000	
2.07.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	197.700.000	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	643.954.960	
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.892.540	
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	196.839.520	
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	196.812.900	
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.590.000	
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	211.220.000	
2.07.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.600.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	275.732.000	
2.07.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	275.732.000	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.105.172.621	
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	576.139.760	
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	529.032.861	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.945.847.108	
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	558.523.024	
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.340.772.084	
2.07.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.552.000	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.811.850.000	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.722.280.000	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.722.280.000	
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	89.570.000	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	89.570.000	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	52.210.000	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	52.210.000	
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	52.210.000	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	246.850.100	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	246.850.100	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	93.850.000	
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	153.000.100	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.029.030.700	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.2.08.2.14.06.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.029.030.700	
1.06.2.08.2.14.06.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.029.030.700	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	561.068.000	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	98.990.000	
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	98.990.000	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	45.000.000	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	45.000.000	
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	417.078.000	
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	98.000.000	
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	319.078.000	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	436.710.000	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	274.994.000	
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	151.492.000	
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	123.502.000	
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	161.716.000	
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	161.716.000	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.002.474.000	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.720.000	
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	32.720.000	
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.969.754.000	
2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.969.754.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	99.000.000	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99.000.000	
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	49.000.000	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	929.778.700	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	165.909.600	
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	165.909.600	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	763.869.100	
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	331.570.100	
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	132.817.000	
2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	182.422.000	
2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	117.060.000	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	15.986.899.374	
2.09.3.27.3.25.02.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	15.986.899.374	
2.09.3.27.3.25.02.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	15.986.899.374	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.063.495.574	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	186.435.533	
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.430.000	
2.09.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100.285.533	
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.720.000	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.843.825.341	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.772.905.697	
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	70.919.644	
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	136.000.000	
2.09.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	136.000.000	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	681.914.700	
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000	
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.290.000	
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	574.224.700	
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	268.000.000	
2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	268.000.000	
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.094.320.000	
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	514.320.000	
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000	
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	330.000.000	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	853.000.000	
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	115.000.000	
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.000.000	
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	716.000.000	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.815.787.800	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	228.104.000	
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	178.104.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	50.000.000	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1.587.683.800	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	100.000.000	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.487.683.800	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	107.616.000	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	107.616.000	
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	107.616.000	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	134.446.442.492	
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	134.446.442.492	
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	122.513.479.492	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	99.221.029.992	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	173.455.000	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.775.000	
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	129.180.000	
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.500.000	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74.161.042.710	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	73.987.122.710	
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	173.920.000	
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	504.660.000	
2.11.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	504.660.000	
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	52.210.000	
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	52.210.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.650.766.900	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.210.000	
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.890.000	
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.210.000	
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	225.690.000	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	97.290.000	
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.097.476.900	
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.642.615.382	
2.11.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.213.599.520	
2.11.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	429.015.862	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.759.330.000	
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	338.260.000	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.100.000.000	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	321.070.000	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.276.950.000	
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.972.160.000	
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.548.420.000	
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	659.160.000	
2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	97.210.000	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.304.370.000	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	723.180.000	
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	483.900.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	239.280.000	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	581.190.000	
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	581.190.000	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	370.490.000	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	268.630.000	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	172.170.000	
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	96.460.000	
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	101.860.000	
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	101.860.000	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	7.894.620.000	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	7.894.620.000	
2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	186.490.000	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	7.708.130.000	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	108.280.000	
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	108.280.000	
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	108.280.000	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	591.083.100	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	591.083.100	
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	453.748.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	65.125.100	
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	72.210.000	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	400.670.000	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	400.670.000	
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	44.420.000	
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	356.250.000	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	283.280.000	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	283.280.000	
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	283.280.000	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	94.420.000	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	94.420.000	
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	94.420.000	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	12.245.236.400	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	12.245.236.400	
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	46.940.000	
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	516.233.900	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	11.328.200.000	
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	353.862.500	
2.11.0.00.0.00.01.0001	UPT Laboratorium Lingkungan	1.028.720.000	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.028.720.000	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.028.720.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.028.720.000	
2.11.0.00.0.00.01.0002	UPT Pengelolaan Sampah	5.817.300.000	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5.817.300.000	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	5.817.300.000	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5.817.300.000	
2.11.0.00.0.00.01.0003	UPT Pengelolaan Pemakaman Umum	1.048.855.000	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.048.855.000	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.048.855.000	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.048.855.000	
2.11.0.00.0.00.01.0004	UPT Pengelolaan Taman	4.038.088.000	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	4.038.088.000	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	4.038.088.000	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4.038.088.000	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	17.292.760.965	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17.292.760.965	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17.292.760.965	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.049.175.665	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	153.031.240	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.130.000	
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113.901.240	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.286.463.103	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.284.833.103	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.630.000	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000	
2.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.962.818.735	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.400.000	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.392.115.200	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	151.717.700	
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.960.000	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	388.625.835	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.836.421.487	
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.836.421.487	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	429.527.000	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	53.920.000	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.212.600	
2.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124.818.900	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	183.575.500	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	350.914.100	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	299.570.500	
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	51.343.600	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.321.491.360	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.321.491.360	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.162.545.360	
2.12.02.2.01.08	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	158.946.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1.531.410.480	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	1.531.410.480	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1.531.410.480	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	330.183.460	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	330.183.460	
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	330.183.460	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	60.500.000	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	60.500.000	
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	60.500.000	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.064.830.000	
1.06.2.08.2.14.06.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.064.830.000	
1.06.2.08.2.14.06.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.064.830.000	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	215.000.000	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	65.000.000	
2.14.02.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	65.000.000	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	
2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	90.000.000	
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	5.000.000	
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	5.000.000	
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	50.000.000	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	145.430.000	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	30.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5.000.000	
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	5.000.000	
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	5.000.000	
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	5.000.000	
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	5.000.000	
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	5.000.000	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	5.000.000	
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	5.000.000	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	5.000.000	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	5.000.000	
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	5.000.000	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	95.430.000	
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	90.430.000	
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	5.000.000	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.704.400.000	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	748.400.000	
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5.000.000	
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	323.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5.000.000	
2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5.000.000	
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	410.400.000	
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.956.000.000	
2.14.04.2.02.01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.598.000.000	
2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	358.000.000	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	34.052.209.455	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	34.052.209.455	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	33.238.511.455	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.492.784.075	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.781.000	
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.016.000	
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.765.000	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.812.256.808	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.799.636.408	
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12.620.400	
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	117.527.600	
2.15.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	109.090.000	
2.15.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.437.600	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	89.690.000	
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	89.690.000	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	704.840.349	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.500.000	
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	107.889.149	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.831.200	
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	58.500.000	
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	67.790.000	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	386.330.000	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.828.249.318	
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	183.142.368	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.303.694.600	
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.380.000	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	315.032.350	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.867.439.000	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.668.529.000	
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	198.910.000	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	14.745.727.380	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	794.072.700	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	794.072.700	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	590.922.760	
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	590.922.760	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	11.544.200.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	11.294.200.000	
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	250.000.000	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	471.370.520	
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	471.370.520	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.087.945.000	
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	502.240.000	
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	5.670.000	
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	580.035.000	
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	144.020.000	
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1.010.000	
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	143.010.000	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	95.710.400	
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	95.710.400	
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	17.486.000	
2.15.02.2.11.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	17.486.000	
2.15.0.00.0.00.01.0001	UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan	813.698.000	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	813.698.000	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	813.698.000	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	563.698.000	
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	250.000.000	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	31.884.407.941	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	31.884.407.941	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	31.884.407.941	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.595.852.920	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.902.477	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.902.477	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.735.952.004	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.724.952.004	
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.000.000	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	835.944.367	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	148.024.200	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80.000.000	
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	593.920.167	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.400.000	
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.400.000	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	534.494.072	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	209.785.000	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	324.709.072	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	405.160.000	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	334.270.000	
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.120.000	
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.770.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	6.813.830.286	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.813.830.286	
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	213.350.000	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	5.255.713.900	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	244.800.000	
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1.099.966.386	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	15.474.724.735	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13.183.894.745	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	13.183.894.745	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.290.829.990	
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	110.100.000	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	325.636.000	
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	144.445.500	
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	1.475.087.990	
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	235.560.500	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	38.408.945.481	
2.17.3.31.3.30.07.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	38.408.945.481	
2.17.3.31.3.30.07.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	38.408.945.481	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.757.363.380	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	236.990.000	
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	81.990.000	
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	145.000.000	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.023.024.150	
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.995.374.150	
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	27.650.000	
2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	75.395.000	
2.17.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	75.395.000	
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.267.603	
2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	70.267.603	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.870.032.501	
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	236.996.000	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	549.601.501	
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	243.435.000	
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	840.000.000	
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	114.730.000	
2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114.730.000	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.455.046.061	
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	273.172.000	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	445.327.761	
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	736.546.300	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.911.878.065	
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.536.878.065	
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.000.000	
2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	320.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	147.292.850	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	147.292.850	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	65.000.000	
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	82.292.850	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	200.450.000	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.450.000	
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	200.450.000	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	95.685.000	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	95.685.000	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	95.685.000	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.010.267.000	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.010.267.000	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.010.267.000	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	4.809.836.051	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	4.809.836.051	
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	187.725.900	
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	100.000.000	
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	156.379.176	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	4.302.745.375	
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	62.985.600	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	388.051.200	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	388.051.200	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	388.051.200	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	1.846.255.334	
2.07.2.18.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.846.255.334	
2.07.2.18.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.846.255.334	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	8.990.000	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8.990.000	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	8.990.000	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	548.990.000	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	548.990.000	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	548.990.000	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	964.039.776	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	964.039.776	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	959.899.776	
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	2.070.000	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	2.070.000	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	146.555.000	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	146.555.000	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	4.000.000	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	96.555.000	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	46.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	177.680.558	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	177.680.558	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	177.680.558	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	35.257.425.830	
2.19.3.26.0.00.02.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	35.257.425.830	
2.19.3.26.0.00.02.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	35.257.425.830	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.163.023.730	
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	230.228.000	
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	142.000.000	
2.19.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.228.000	
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.759.921.715	
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.749.021.715	
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.900.000	
2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	95.780.000	
2.19.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	95.780.000	
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	197.743.733	
2.19.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	197.743.733	
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.824.980.587	
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38.780.000	
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	187.980.600	
2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.475.000	
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.583.744.987	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	270.440.595	
2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	197.660.595	
2.19.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	72.780.000	
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.074.819.100	
2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	195.319.100	
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.038.000.000	
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	841.500.000	
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	709.110.000	
2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	308.640.000	
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82.550.000	
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	317.920.000	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.729.790.000	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.381.830.000	
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	126.255.000	
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	242.765.000	
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	637.020.000	
2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	267.530.000	
2.19.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	153.380.000	
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	154.880.000	
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	800.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	347.960.000	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	347.960.000	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	16.864.612.100	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	862.140.000	
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	241.630.000	
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	620.510.000	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	5.087.210.000	
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	5.087.210.000	
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	10.000.000.000	
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	10.000.000.000	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	915.262.100	
2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	57.210.000	
2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	739.552.100	
2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	118.500.000	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	500.000.000	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	500.000.000	
2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	500.000.000	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	517.102.500	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	517.102.500	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	517.102.500	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	517.102.500	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	517.102.500	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	114.415.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	18.325.000	
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	5.300.000	
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	102.962.500	
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	75.500.000	
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	200.600.000	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	415.161.412	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	415.161.412	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	415.161.412	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	415.161.412	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	329.882.500	
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.750.000	
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.715.000	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	269.156.000	
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	31.261.500	
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	85.278.912	
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	85.278.912	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.529.655.232	
1.01.2.22.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.529.655.232	
1.01.2.22.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.529.655.232	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	503.531.160	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	51.470.000	
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	51.470.000	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	390.061.160	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	277.206.160	
2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	112.855.000	
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	62.000.000	
2.22.02.2.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	62.000.000	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	669.975.000	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	669.975.000	
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	90.705.000	
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	579.270.000	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	31.470.000	
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.470.000	
2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	31.470.000	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	102.680.000	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	102.680.000	
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	102.680.000	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	221.999.072	
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	221.999.072	
2.22.06.2.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	221.999.072	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	16.046.433.368	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah	16.046.433.368	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah	16.046.433.368	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.674.521.368	
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.328.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.081.500	
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.247.000	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.246.378.184	
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.227.486.684	
2.23.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18.891.500	
2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	47.210.000	
2.23.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	47.210.000	
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.990.000	
2.23.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	21.990.000	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	390.460.000	
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.500.000	
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93.340.000	
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.600.000	
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	276.020.000	
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.729.668.688	
2.23.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	729.668.688	
2.23.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000.000	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	797.071.273	
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	451.838.000	
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	340.233.273	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	433.414.723	
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	292.120.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.23.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	11.500.000	
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.010.000	
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	73.784.723	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.328.662.000	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.078.165.000	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	565.000.000	
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	37.720.000	
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	202.540.000	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	136.631.712	
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	136.273.288	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.497.000	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	25.380.000	
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	63.335.000	
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	90.000.000	
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	71.782.000	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	43.250.000	
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	43.250.000	
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	43.250.000	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	317.278.048	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah	317.278.048	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah	317.278.048	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	266.068.048	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	86.899.624	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	86.899.624	
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	165.673.424	
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	165.673.424	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	13.495.000	
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	13.495.000	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	51.210.000	
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	51.210.000	
2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	51.210.000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.016.173.000	
2.09.3.27.3.25.02.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.016.173.000	
2.09.3.27.3.25.02.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.016.173.000	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.634.579.000	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	2.242.349.000	
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	2.242.349.000	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	392.230.000	
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	392.230.000	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	381.594.000	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	381.594.000	
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	381.594.000	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	7.902.986.001	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.19.3.26.0.00.02.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	7.902.986.001	
2.19.3.26.0.00.02.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	7.902.986.001	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.684.839.000	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	360.000.000	
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	360.000.000	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.264.839.000	
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	210.039.000	
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.500.000.000	
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	294.800.000	
3.26.02.2.03.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	260.000.000	
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	
3.26.02.2.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	60.000.000	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	102.632.001	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	102.632.001	
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	102.632.001	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	97.210.000	
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	97.210.000	
3.26.04.2.02.08	Perlindungan Hasil Kreativitas	97.210.000	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	4.018.305.000	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3.943.305.000	
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	361.188.000	
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	3.297.117.000	
3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	225.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	60.000.000	
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	75.000.000	
3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	75.000.000	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	2.061.478.300	
2.09.3.27.3.25.02.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.061.478.300	
2.09.3.27.3.25.02.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.061.478.300	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	857.971.500	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	571.923.000	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	386.272.000	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	185.651.000	
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	286.048.500	
3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	286.048.500	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	740.086.000	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	740.086.000	
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	740.086.000	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	402.472.000	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	186.136.000	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	186.136.000	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	216.336.000	
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	22.035.000	
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	194.301.000	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	60.948.800	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	60.948.800	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	44.172.000	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	16.776.800	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	15.851.073.604	
2.17.3.31.3.30.07.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	15.851.073.604	
2.17.3.31.3.30.07.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	15.851.073.604	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	164.516.400	
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	54.838.800	
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	54.838.800	
3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	54.838.800	
3.30.02.2.03.01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	54.838.800	
3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	54.838.800	
3.30.02.2.05.01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	54.838.800	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	14.387.001.504	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	14.014.502.704	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	7.692.877.076	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6.321.625.628	
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	372.498.800	
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	54.838.800	
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	317.660.000	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	250.000.000	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	250.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	200.000.000	
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	50.000.000	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	54.838.800	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	54.838.800	
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	54.838.800	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	391.570.900	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	391.570.900	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	361.570.900	
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	30.000.000	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	603.146.000	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	603.146.000	
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	600.076.000	
3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	3.070.000	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	14.909.613.289	
2.17.3.31.3.30.07.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	14.909.613.289	
2.17.3.31.3.30.07.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	14.909.613.289	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	14.769.713.289	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	14.769.713.289	
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	452.500.000	
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	295.770.000	
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	13.991.443.289	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.31.02.2.01.06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	30.000.000	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	39.900.000	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	39.900.000	
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	39.900.000	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	100.000.000	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	
3.31.04.2.01.01	Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	100.000.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	84.555.832.745	
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	84.555.832.745	
4.01.0.00.0.00.01.0001	Bagian Pemerintahan	1.757.536.595	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.000.000	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.727.536.595	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	1.582.837.795	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	137.900.000	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	980.058.800	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	464.878.995	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	144.698.800	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	144.698.800	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.0.00.0.00.01.0002	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	12.361.300.000	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12.361.300.000	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	12.361.300.000	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4.439.300.000	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	4.249.640.000	
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	3.672.360.000	
4.01.0.00.0.00.01.0003	Bagian Hukum	3.016.977.434	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.016.977.434	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3.016.977.434	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	869.280.000	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.303.967.434	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	843.730.000	
4.01.0.00.0.00.01.0004	Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	993.074.000	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	993.074.000	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	800.144.000	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	85.321.700	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	714.822.300	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	96.970.000	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	96.970.000	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	95.960.000	
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	95.960.000	
4.01.0.00.0.00.01.0005	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	1.519.497.000	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.519.497.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.519.497.000	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	460.310.000	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	150.000.000	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	909.187.000	
4.01.0.00.0.00.01.0006	Bagian Organisasi	1.273.396.100	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.273.396.100	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	107.471.400	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	107.471.400	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	1.165.924.700	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	186.909.100	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	55.989.000	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	547.138.600	
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	263.028.500	
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	112.859.500	
4.01.0.00.0.00.01.0007	Bagian Hubungan Masyarakat	10.006.795.993	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.006.795.993	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	10.006.795.993	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	423.451.200	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	8.971.796.793	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	611.548.000	
4.01.0.00.0.00.01.0008	Bagian Umum	53.627.255.623	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	53.627.255.623	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.539.913.825	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.196.583.036	
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	343.330.789	
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	512.859.536	
4.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	200.670.000	
4.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	184.700.000	
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	127.489.536	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	242.740.000	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	78.380.000	
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	164.360.000	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.292.227.500	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	250.230.000	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500.000.000	
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	196.412.500	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	142.920.000	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	387.970.000	
4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	55.000.000	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.160.000.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	599.695.000	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.865.497.043	
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.670.000	
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	271.947.200	
4.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	172.810.000	
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.069.559.843	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	245.510.000	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.575.232.769	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	224.347.560	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.900.000.000	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.741.800.000	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.709.085.209	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.809.686.950	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	220.096.450	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.682.853.500	
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	105.920.000	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.008.000.000	
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	599.892.000	
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	192.925.000	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	852.532.000	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	252.532.000	
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	
4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3.936.566.000	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.082.393.500	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.204.172.500	
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	650.000.000	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	84.567.820.633	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	84.567.820.633	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	84.567.820.633	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	55.857.065.108	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	165.481.345	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	140.911.125	
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.570.220	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.914.560.670	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.794.368.760	
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.191.910	
4.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	20.000.000	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.842.404.400	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.240.000	
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	46.697.400	
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.548.000	
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	81.240.000	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.515.679.000	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.526.380.314	
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.526.380.314	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.293.123.596	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	649.454.000	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	643.669.596	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.171.529.240	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.295.537.608	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	154.500.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	721.491.632	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	33.981.278.674	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	33.470.040.104	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	350.567.000	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	160.671.570	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.962.306.869	
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.962.306.869	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	28.710.755.525	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.804.037.600	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	198.992.600	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.007.757.000	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	597.288.000	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	948.802.400	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	198.000.400	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	198.000.350	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	156.800.550	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	198.000.550	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	198.000.550	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	14.110.510.550	
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3.366.770.000	
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3.353.950.000	
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3.799.990.000	
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3.391.800.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	198.000.550	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.842.097.500	
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1.082.740.000	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.311.307.500	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	100.000.000	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	437.000.000	
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	545.960.000	
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	365.090.000	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.028.987.475	
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	299.288.550	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	729.698.925	
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	40.000.000	
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	40.000.000	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	6.936.320.000	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2.468.200.000	
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	275.000.000	
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4.193.120.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	15.378.457.371	
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.378.457.371	
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.378.457.371	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.741.279.031	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.000.000	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.748.953.531	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.676.425.791	
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72.527.740	
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	32.200.000	
5.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	24.000.000	
5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.200.000	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.000.000	
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	41.000.000	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	821.722.100	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.845.000	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198.066.500	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	62.913.600	
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.525.000	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	552.372.000	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	229.080.000	
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	229.080.000	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	473.106.500	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	344.195.000	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	128.911.500	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	351.216.900	
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	193.383.700	
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.143.200	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	127.690.000	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.627.090.000	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.395.400.000	
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	351.360.000	
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	169.080.000	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	401.060.000	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	473.900.000	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	111.730.000	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	111.730.000	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	119.960.000	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	119.960.000	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.010.088.340	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.758.965.000	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	800.550.000	
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	243.220.000	
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	322.750.000	
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	129.440.000	
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	263.005.000	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.206.593.340	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	250.130.020	
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	97.210.000	
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	448.569.500	
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	178.252.320	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	88.461.425	
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	114.689.547	
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	29.280.528	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.044.530.000	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	107.260.940	
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	44.260.000	
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	289.080.000	
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	5.450.000	
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	294.460.000	
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	263.319.060	
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	40.700.000	
5.02	KEUANGAN	129.552.839.030	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	45.706.580.712	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	45.706.580.712	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.287.267.344	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	111.218.800	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.058.800	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72.160.000	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.643.532.874	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.549.298.090	
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	94.234.784	
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.114.000	
5.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50.114.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	285.738.000	
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	285.738.000	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.116.775.600	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.889.900	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	460.647.200	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	202.139.500	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	57.930.000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.359.169.000	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	985.130.000	
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	785.130.000	
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.184.804.970	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	526.120.000	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	182.125.800	
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	135.442.500	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	341.116.670	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	909.953.100	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	909.953.100	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	23.214.612.734	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.840.729.800	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	150.750.000	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	110.743.100	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	306.125.000	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	154.384.850	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	894.324.950	
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	224.401.900	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	750.756.800	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	281.335.900	
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	98.411.600	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	57.119.750	
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	53.619.750	
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	47.529.900	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	212.739.900	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	746.255.950	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	523.536.000	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	87.465.000	
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	75.444.950	
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	59.810.000	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	19.749.100.184	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	19.749.100.184	
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	127.770.000	
5.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	127.770.000	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.204.700.634	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.204.700.634	
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	62.490.000	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	264.840.000	
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	220.285.000	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	2.554.483.984	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	1.047.862.000	
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	283.299.850	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	412.740.000	
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	115.910.000	
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	66.464.800	
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	176.325.000	
5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pendapatan Daerah	83.846.258.318	
5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pendapatan Daerah	83.846.258.318	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	69.273.781.938	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	516.770.000	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	273.080.000	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	243.690.000	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56.863.339.400	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	56.654.150.840	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	209.188.560	
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	211.800.000	
5.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	211.800.000	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	657.700.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	657.700.000	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.880.617.550	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	82.379.400	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	492.063.350	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	249.000.000	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.327.314.900	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.692.500	
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	93.014.900	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	616.152.500	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.592.198.709	
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.592.198.709	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.449.006.279	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	179.056.848	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	899.685.447	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	370.263.984	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.102.350.000	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	603.500.000	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	498.850.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	14.572.476.380	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	14.572.476.380	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	412.812.560	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2.471.284.000	
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	776.855.584	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.275.274.240	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.817.090.000	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	2.515.930.100	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	665.837.120	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	3.200.807.120	
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	414.381.984	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	353.912.136	
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	668.291.536	
5.03	KEPEGAWAIAN	11.841.433.979	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	11.841.433.979	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	11.841.433.979	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.781.075.279	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.224.000	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	384.000	
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	840.000	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.698.202.922	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.689.872.260	
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.926.048	
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.404.614	
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.190.000	
5.03.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	24.190.000	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.285.274.657	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	213.390.100	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.189.600	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	159.892.200	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.840.000	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	869.962.757	
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	128.439.000	
5.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.224.000	
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.215.000	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	315.398.000	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.148.400	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.240.000	
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.490.000	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	214.519.600	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	328.346.700	
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	228.624.700	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.032.000	
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	51.690.000	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.060.358.700	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	508.355.700	
5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	96.069.300	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	168.346.400	
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	143.700.000	
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	100.240.000	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	410.088.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	85.673.000	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	324.415.000	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	774.470.000	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	146.640.000	
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	392.640.000	
5.03.02.2.03.07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	57.290.000	
5.03.02.2.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	40.680.000	
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	137.220.000	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	367.445.000	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	45.750.000	
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	140.520.000	
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	181.175.000	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.643.050.000	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	2.643.050.000	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	2.643.050.000	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.643.050.000	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	146.640.000	
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	146.640.000	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.496.410.000	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.496.410.000	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.144.600.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.144.600.000	
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.144.600.000	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.144.600.000	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	469.270.000	
5.05.02.2.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	469.270.000	
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	125.260.000	
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	125.260.000	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	383.220.000	
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	279.310.000	
5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	103.910.000	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	166.850.000	
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	82.860.000	
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	83.990.000	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	15.927.654.154	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah	15.927.654.154	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah	15.927.654.154	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.099.170.954	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140.720.000	
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	89.116.000	
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51.604.000	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.487.636.294	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.437.070.710	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	50.565.584	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.125.944.000	
6.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	74.616.000	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.051.328.000	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.065.559.750	
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	226.377.700	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.017.050	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	82.680.000	
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.870.000	
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	99.550.000	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	599.065.000	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	350.364.710	
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350.364.710	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253.286.800	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	99.957.300	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.389.500	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73.940.000	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	675.659.400	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	405.010.400	
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.979.000	
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	220.670.000	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.256.831.700	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.542.127.200	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	765.107.000	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	69.587.000	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	68.246.000	
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	477.667.200	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	161.520.000	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	714.704.500	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	94.224.500	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	620.480.000	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	571.651.500	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	264.922.500	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	264.922.500	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	306.729.000	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	66.576.000	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	74.174.000	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	97.626.000	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	68.353.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	257.119.579.196	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Klojen	44.369.219.043	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Klojen	20.389.067.425	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.419.979.434	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.260.100	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.320.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.080.300	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	349.800	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.510.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.439.692.894	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.427.963.950	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.728.944	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	121.650.000	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	121.650.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	556.380.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.050.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.220.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	206.650.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.460.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	458.186.440	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	146.640.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	311.546.440	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	424.560.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	343.560.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	391.250.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	136.600.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	224.650.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.860.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.360.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.360.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	13.500.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	13.500.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	790.877.991	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	564.360.151	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	42.756.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	490.104.151	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	31.500.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	226.517.840	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	226.517.840	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	82.550.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	82.550.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	82.550.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	64.800.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	64.800.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	64.800.000	
7.01.0.00.0.00.01.0002	Kelurahan Klojen	1.905.020.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	449.556.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	433.856.400	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	433.856.400	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	15.699.600	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	15.699.600	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.259.483.200	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	897.309.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.349.800	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	280.900.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	609.059.200	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	362.174.200	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	362.174.200	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	195.980.800	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	195.980.800	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	195.980.800	
7.01.0.00.0.00.01.0003	Kelurahan Rampalcelaket	1.976.463.045	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	325.013.945	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	305.660.445	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	305.660.445	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	19.353.500	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	19.353.500	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.495.935.600	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.142.148.600	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.562.500	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	804.078.100	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	317.508.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	353.787.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	353.787.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	155.513.500	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	155.513.500	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	155.513.500	
7.01.0.00.0.00.01.0004	Kelurahan Samaan	2.654.039.142	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	224.921.642	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	223.221.642	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	223.221.642	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.700.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.700.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.269.533.500	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.596.393.500	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.150.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	620.448.500	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	965.795.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	673.140.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	673.140.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	159.584.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	159.584.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	159.584.000	
7.01.0.00.0.00.01.0005	Kelurahan Kiduldalem	1.780.677.031	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	366.337.031	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	359.637.031	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	359.637.031	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	6.700.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	6.700.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.271.540.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	786.770.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	29.450.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	410.770.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	346.550.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	484.770.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	484.770.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	142.800.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	142.800.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	142.800.000	
7.01.0.00.0.00.01.0006	Kelurahan Sukoharjo	2.122.505.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	580.590.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	547.590.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	547.590.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	33.000.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	33.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.367.590.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	853.005.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.300.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	287.845.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	553.860.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	514.585.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	514.585.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	174.325.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	174.325.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	174.325.000	
7.01.0.00.0.00.01.0007	Kelurahan Kasin	2.353.710.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	304.479.400	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	302.504.400	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	302.504.400	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.975.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.975.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.885.381.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.164.932.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	25.630.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	588.572.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	550.730.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	720.449.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	720.449.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	163.849.600	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	163.849.600	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	163.849.600	
7.01.0.00.0.00.01.0008	Kelurahan Kauman	2.269.372.600	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	253.060.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	251.060.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	251.060.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2.000.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.872.312.600	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.264.112.600	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	19.780.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	494.062.600	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	750.270.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	608.200.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	608.200.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	144.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	144.000.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	144.000.000	
7.01.0.00.0.00.01.0009	Kelurahan Oro-Oro Dowo	2.149.815.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	398.250.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	390.950.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	390.950.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.300.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	7.300.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.607.565.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	941.565.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13.950.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	544.115.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	383.500.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	666.000.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	666.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	144.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	144.000.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	144.000.000	
7.01.0.00.0.00.01.0010	Kelurahan Bareng	2.767.012.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	471.475.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	460.475.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	460.475.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	11.000.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	11.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.132.037.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.490.987.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	19.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	956.112.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	515.875.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	641.050.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	641.050.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	163.500.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	163.500.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	163.500.000	
7.01.0.00.0.00.01.0011	Kelurahan Gadingkasri	2.325.757.800	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	357.238.500	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	355.964.500	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	355.964.500	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.274.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.274.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.807.619.300	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.401.119.300	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16.500.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	997.389.300	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	387.230.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	406.500.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	406.500.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	160.900.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	160.900.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	160.900.000	
7.01.0.00.0.00.01.0012	Kelurahan Penanggungan	1.675.780.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	369.080.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	363.305.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	363.305.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.775.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	5.775.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.136.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	685.500.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13.900.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	281.700.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	389.900.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	450.500.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	450.500.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	170.700.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	170.700.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	170.700.000	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Blimbing	50.999.358.347	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Blimbing	20.318.593.862	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.612.778.552	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.500.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.950.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.400.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.650.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.277.440.406	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.254.690.406	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	22.750.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	73.773.024	
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	73.773.024	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.000.000	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	505.391.650	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.147.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.519.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.090.400	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.877.250	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.600.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.500.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	361.658.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.900.000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	77.900.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	304.474.472	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.200.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.848.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	242.426.472	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	303.299.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	97.509.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.150.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.640.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	36.072.800	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.210.600	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.210.600	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	20.862.200	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	20.862.200	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	578.342.510	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	312.327.510	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	24.900.000	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	287.427.510	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	266.015.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	266.015.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	32.200.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	32.200.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	32.200.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	59.200.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	59.200.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	59.200.000	
7.01.0.00.0.00.02.0002	Kelurahan Blimbing	2.062.090.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	348.510.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	338.800.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	338.800.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	9.710.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	9.710.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.542.180.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	989.300.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	499.250.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	470.050.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	552.880.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	552.880.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	171.400.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	171.400.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	171.400.000	
7.01.0.00.0.00.02.0003	Kelurahan Polowijen	2.394.360.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	480.050.400	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	474.050.400	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	474.050.400	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	6.000.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	6.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.740.743.200	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.238.028.400	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	21.066.400	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	709.380.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	507.582.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	502.714.800	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	502.714.800	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	173.566.400	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	173.566.400	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	173.566.400	
7.01.0.00.0.00.02.0004	Kelurahan Arjosari	1.956.940.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	366.050.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	356.550.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	356.550.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	9.500.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	9.500.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.420.760.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	990.374.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	472.180.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	503.194.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	430.386.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	430.386.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	170.130.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	170.130.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	170.130.000	
7.01.0.00.0.00.02.0005	Kelurahan Purwodadi	2.850.750.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	445.695.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	420.395.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	420.395.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	25.300.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	25.300.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.239.505.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.483.305.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.875.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	825.130.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	646.300.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	756.200.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	756.200.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	165.550.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	165.550.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	165.550.000	
7.01.0.00.0.00.02.0006	Kelurahan Pandanwangi	3.563.260.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	434.221.200	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	425.151.200	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	425.151.200	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	9.070.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	9.070.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.961.629.200	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.865.679.200	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	913.579.200	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	932.100.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.095.950.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.095.950.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	167.409.600	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	167.409.600	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	167.409.600	
7.01.0.00.0.00.02.0007	Kelurahan Purwantoro	4.098.480.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	538.386.200	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	509.396.200	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	509.396.200	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	28.990.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	28.990.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.342.353.800	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.118.125.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	23.490.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	944.635.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.150.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.224.228.800	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.224.228.800	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	217.740.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	217.740.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	217.740.000	
7.01.0.00.0.00.02.0008	Kelurahan Bunulrejo	3.851.621.026	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	423.360.826	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	407.760.826	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	407.760.826	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	15.600.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	15.600.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.204.110.200	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.031.107.200	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	19.400.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.142.868.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	868.839.200	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.173.003.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.173.003.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	224.150.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	224.150.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	224.150.000	
7.01.0.00.0.00.02.0009	Kelurahan Kesatrian	2.197.940.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	406.163.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	386.738.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	386.738.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	19.425.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	19.425.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.631.820.600	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.022.451.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.620.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	571.531.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	432.300.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	609.369.600	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	609.369.600	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	159.956.400	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	159.956.400	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	159.956.400	
7.01.0.00.0.00.02.0010	Kelurahan Polehan	2.983.153.459	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	406.587.659	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	399.087.659	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	399.087.659	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.500.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	7.500.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.420.925.800	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.886.145.800	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.350.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.171.495.800	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	696.300.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	534.780.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	534.780.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	155.640.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	155.640.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	155.640.000	
7.01.0.00.0.00.02.0011	Kelurahan Jodipan	2.445.180.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	336.054.550	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	324.387.050	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	324.387.050	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	11.667.500	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	11.667.500	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.946.875.450	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.302.642.700	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17.548.500	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	704.344.200	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	580.750.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	644.232.750	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	644.232.750	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	162.250.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	162.250.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	162.250.000	
7.01.0.00.0.00.02.0012	Kelurahan Balarjosari	2.276.990.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	328.340.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	319.890.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	319.890.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	8.450.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	8.450.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.815.450.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.441.450.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.150.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	769.668.500	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	651.631.500	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	374.000.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	374.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	133.200.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	133.200.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	133.200.000	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Kedungkandang	54.772.592.916	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Kedungkandang	22.427.610.503	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.577.471.593	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.258.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.144.200	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.274.600	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.319.600	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.399.600	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.120.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.101.862.476	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.032.162.476	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	69.700.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.300.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.300.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	572.721.650	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.660.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.534.500	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.189.500	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.563.650	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	411.274.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.265.700	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.404.000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	84.861.700	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	349.800.272	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.100.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.517.500	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.600.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	236.582.772	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	307.263.495	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.810.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	238.453.495	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	119.428.400	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	98.179.200	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	98.179.200	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	21.249.200	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	21.249.200	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	646.376.110	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	493.248.310	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	25.584.200	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	205.782.800	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	261.881.310	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	153.127.800	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	153.127.800	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	58.135.200	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	58.135.200	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	58.135.200	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	26.199.200	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	26.199.200	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	26.199.200	
7.01.0.00.0.00.03.0002	Kelurahan Kedungkandang	2.553.947.500	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	375.497.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	367.497.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	367.497.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	8.000.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	8.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.027.250.500	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.642.800.500	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	947.700.500	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	683.100.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	384.450.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	384.450.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	151.200.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	151.200.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	151.200.000	
7.01.0.00.0.00.03.0003	Kelurahan Kotalama	3.698.545.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	194.770.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	189.400.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	189.400.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.370.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	5.370.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.356.525.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.368.625.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.840.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.177.085.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.184.700.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	987.900.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	987.900.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	147.250.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	147.250.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	147.250.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.0.00.0.00.03.0004	Kelurahan Mergosono	2.453.740.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	433.276.600	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	419.573.600	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	419.573.600	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	13.703.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	13.703.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.860.353.600	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.160.043.100	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.411.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	506.860.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	634.772.100	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	700.310.500	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	700.310.500	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	160.109.800	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	160.109.800	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	160.109.800	
7.01.0.00.0.00.03.0005	Kelurahan Bumiayu	3.011.162.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	416.422.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	398.422.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	398.422.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	18.000.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	18.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.424.340.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.844.140.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8.400.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	795.840.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.039.900.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	580.200.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	580.200.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	170.400.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	170.400.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	170.400.000	
7.01.0.00.0.00.03.0006	Kelurahan Wonokoyo	2.017.580.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	244.520.752	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	236.330.752	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	236.330.752	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	8.190.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	8.190.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.629.059.248	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.348.504.600	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	31.524.600	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	759.280.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	557.700.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	280.554.648	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	280.554.648	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	144.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	144.000.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	144.000.000	
7.01.0.00.0.00.03.0007	Kelurahan Buring	2.304.720.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	237.625.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	236.885.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	236.885.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	740.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	740.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.927.425.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.485.425.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14.650.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	552.275.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	918.500.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	442.000.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	442.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	139.670.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	139.670.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	139.670.000	
7.01.0.00.0.00.03.0008	Kelurahan Lesanpuro	2.611.116.811	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	244.631.411	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	237.726.411	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	237.726.411	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	6.905.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	6.905.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.215.285.400	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.535.875.800	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.090.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	905.785.800	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	627.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	679.409.600	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	679.409.600	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	151.200.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	151.200.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	151.200.000	
7.01.0.00.0.00.03.0009	Kelurahan Sawojajar	3.412.766.502	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	430.969.202	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	404.789.202	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	404.789.202	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	26.180.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	26.180.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.824.987.300	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.870.521.700	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	23.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	835.985.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.011.536.700	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	954.465.600	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	954.465.600	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	156.810.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	156.810.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	156.810.000	
7.01.0.00.0.00.03.0010	Kelurahan Madyopuro	3.366.340.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	224.220.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	206.872.800	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	206.872.800	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	17.347.200	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	17.347.200	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.990.920.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.045.320.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	19.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.184.820.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	841.500.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	945.600.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	945.600.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	151.200.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	151.200.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	151.200.000	
7.01.0.00.0.00.03.0011	Kelurahan Cemorokandang	2.420.660.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	371.770.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	360.647.100	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	360.647.100	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	11.122.900	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	11.122.900	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.925.090.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.333.245.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	604.045.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	709.200.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	591.845.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	591.845.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	123.800.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	123.800.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	123.800.000	
7.01.0.00.0.00.03.0012	Kelurahan Arjowinangun	2.438.640.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	330.104.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	325.204.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	325.204.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.900.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4.900.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.957.336.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.304.840.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.150.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	657.790.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	636.900.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	652.496.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	652.496.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	151.200.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	151.200.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	151.200.000	
7.01.0.00.0.00.03.0013	Kelurahan Tlogowaru	2.055.764.600	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	366.894.600	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	351.894.600	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	351.894.600	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	15.000.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	15.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.547.270.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.152.058.600	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	570.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	572.058.600	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	395.211.400	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	395.211.400	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	141.600.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	141.600.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	141.600.000	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Lowokwaru	52.993.137.497	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Lowokwaru	22.693.280.590	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.009.156.866	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.911.900	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.100.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.468.450	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.468.450	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.775.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.100.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.953.228.516	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.912.950.716	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40.277.800	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	71.760.000	
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	71.760.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	97.210.000	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	97.210.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	412.564.450	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.530.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.970.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.210.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.734.450	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.620.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94.082.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.892.000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.190.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.710.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.210.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	129.500.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.690.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.690.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.895.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	500.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	500.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	6.395.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	6.395.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	535.802.324	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	535.802.324	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	55.928.400	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	268.610.724	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	211.263.200	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21.346.400	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	21.346.400	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	21.346.400	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	120.080.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	120.080.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	120.080.000	
7.01.0.00.0.00.04.0002	Kelurahan Lowokwaru	3.015.040.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	430.965.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	428.765.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	428.765.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2.200.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2.200.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.427.850.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.622.475.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17.910.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	805.940.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	798.625.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	805.375.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	805.375.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	156.225.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	156.225.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	156.225.000	
7.01.0.00.0.00.04.0003	Kelurahan Dinoyo	2.350.800.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	492.799.500	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	477.799.500	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	477.799.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	15.000.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	15.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.675.570.500	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.070.320.500	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	313.750.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	741.570.500	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	605.250.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	605.250.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	182.430.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	182.430.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	182.430.000	
7.01.0.00.0.00.04.0004	Kelurahan Sumber Sari	1.878.924.600	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	322.757.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	320.507.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	320.507.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2.250.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2.250.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.394.742.600	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	917.227.600	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	22.538.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	587.670.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	307.019.600	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	477.515.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	477.515.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	161.425.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	161.425.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	161.425.000	
7.01.0.00.0.00.04.0005	Kelurahan Ketawanggede	1.620.030.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	326.460.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	306.920.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	306.920.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	19.540.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	19.540.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.173.395.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	888.425.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17.625.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	611.275.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	259.525.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	284.970.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	284.970.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	120.175.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	120.175.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	120.175.000	
7.01.0.00.0.00.04.0006	Kelurahan Jatimulyo	2.589.597.666	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	444.168.666	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	424.573.666	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	424.573.666	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	19.595.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	19.595.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.980.929.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.214.621.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8.950.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	662.601.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	543.070.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	766.308.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	766.308.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	164.500.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	164.500.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	164.500.000	
7.01.0.00.0.00.04.0007	Kelurahan Tunjungsekar	2.032.828.600	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	255.356.550	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	253.440.300	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	253.440.300	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.916.250	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.916.250	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.591.486.950	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	837.201.150	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16.844.900	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	417.756.250	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	402.600.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	754.285.800	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	754.285.800	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	185.985.100	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	185.985.100	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	185.985.100	
7.01.0.00.0.00.04.0008	Kelurahan Mojolangu	3.255.719.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	350.362.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	343.562.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	343.562.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	6.800.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	6.800.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.735.757.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.526.157.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.350.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	796.622.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	724.185.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.209.600.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.209.600.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	169.600.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	169.600.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	169.600.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.0.00.0.00.04.0009	Kelurahan Tulusrejo	2.522.659.541	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	411.802.191	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	408.942.191	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	408.942.191	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2.860.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2.860.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.939.723.400	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.223.525.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14.850.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	454.725.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	753.950.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	716.198.400	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	716.198.400	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	171.133.950	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	171.133.950	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	171.133.950	
7.01.0.00.0.00.04.0010	Kelurahan Tasikmadu	2.087.600.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	349.706.300	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	349.081.300	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	349.081.300	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	625.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	625.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.583.812.800	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.167.599.900	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14.745.900	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	759.255.400	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	393.598.600	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	416.212.900	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	416.212.900	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	154.080.900	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	154.080.900	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	154.080.900	
7.01.0.00.0.00.04.0011	Kelurahan Tunggulwulung	1.913.267.500	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	376.990.600	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	375.990.600	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	375.990.600	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.000.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.367.576.900	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	806.792.500	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.100.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	513.567.500	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	281.125.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	560.784.400	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	560.784.400	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	168.700.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	168.700.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	168.700.000	
7.01.0.00.0.00.04.0012	Kelurahan Tlogomas	3.192.850.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	288.804.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	266.304.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	266.304.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	22.500.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	22.500.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.746.046.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.309.285.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.090.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.672.931.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	625.264.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	436.761.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	436.761.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	158.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	158.000.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	158.000.000	
7.01.0.00.0.00.04.0013	Kelurahan Merjosari	3.840.540.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	375.900.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	361.100.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	361.100.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	14.800.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	14.800.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.296.440.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.586.440.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.100.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.722.240.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	853.100.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	710.000.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	710.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	168.200.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	168.200.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	168.200.000	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Sukun	53.985.271.393	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Sukun	22.362.564.329	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.573.964.329	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.780.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.550.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.550.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.150.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.530.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.470.145.779	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.435.305.779	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	34.840.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.810.750	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	43.810.750	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	426.073.800	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	266.848.800	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.000.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.225.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.131.628	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.131.628	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	406.022.372	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103.610.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.313.300	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	231.099.072	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.000.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	73.520.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60.000.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	13.520.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	13.520.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	697.060.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	547.060.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	25.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	219.560.000	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	302.500.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	150.000.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	150.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.500.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.500.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.500.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.520.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.520.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.520.000	
7.01.0.00.0.00.05.0002	Kelurahan Sukun	3.723.368.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	501.154.100	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	491.764.100	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	491.764.100	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	9.390.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	9.390.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.051.813.900	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.134.123.900	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	22.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	889.448.700	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.222.675.200	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	917.690.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	917.690.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	170.400.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	170.400.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	170.400.000	
7.01.0.00.0.00.05.0003	Kelurahan Ciptomulyo	2.032.790.200	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	370.740.200	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	366.605.200	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	366.605.200	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.135.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4.135.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.508.450.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.011.050.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13.190.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	478.330.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	519.530.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	497.400.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	497.400.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	153.600.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	153.600.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	153.600.000	
7.01.0.00.0.00.05.0004	Kelurahan Gadang	4.050.696.900	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	515.124.600	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	511.624.600	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	511.624.600	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3.500.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3.500.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.389.172.300	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.552.141.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.966.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.709.475.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	821.700.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	837.031.300	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	837.031.300	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	146.400.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	146.400.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	146.400.000	
7.01.0.00.0.00.05.0005	Kelurahan Kebonsari	2.488.020.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	327.916.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	322.971.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	322.971.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.945.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4.945.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.008.904.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.598.300.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.250.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	777.550.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	808.500.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	410.604.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	410.604.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	151.200.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	151.200.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	151.200.000	
7.01.0.00.0.00.05.0006	Kelurahan Bandungrejosari	3.384.700.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	501.104.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	476.104.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	476.104.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	25.000.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	25.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.719.396.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.644.796.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	411.380.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.213.416.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.074.600.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.074.600.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	164.200.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	164.200.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	164.200.000	
7.01.0.00.0.00.05.0007	Kelurahan Tanjungrejo	3.841.592.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	315.492.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	311.492.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	311.492.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.000.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.365.300.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.369.900.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.800.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.354.200.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.003.900.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	995.400.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	995.400.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	160.800.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	160.800.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	160.800.000	
7.01.0.00.0.00.05.0008	Kelurahan Pisangcandi	2.265.940.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	442.645.600	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	429.925.600	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	429.925.600	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	12.720.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	12.720.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.637.794.400	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	930.384.800	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	39.303.200	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	319.280.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	571.801.600	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	707.409.600	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	707.409.600	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	185.500.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	185.500.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	185.500.000	
7.01.0.00.0.00.05.0009	Kelurahan Karangbesuki	2.622.679.964	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	417.976.464	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	383.226.464	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	383.226.464	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	34.750.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	34.750.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.034.659.500	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.377.694.500	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17.582.500	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	719.160.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	640.952.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	656.965.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	656.965.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	170.044.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	170.044.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	170.044.000	
7.01.0.00.0.00.05.0010	Kelurahan Bandulan	2.509.080.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	460.620.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	455.620.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	455.620.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.000.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	5.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.894.860.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.391.530.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	34.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	744.340.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	613.190.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	503.330.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	503.330.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	153.600.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	153.600.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	153.600.000	
7.01.0.00.0.00.05.0011	Kelurahan Mulyorejo	2.646.340.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	253.505.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	251.505.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	251.505.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2.000.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.229.635.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.772.785.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17.400.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.193.485.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	561.900.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	456.850.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	456.850.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	163.200.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	163.200.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	163.200.000	
7.01.0.00.0.00.05.0012	Kelurahan Bakalankrajan	2.057.500.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	350.000.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	350.000.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	350.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.529.140.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	990.454.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	541.854.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	428.600.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	538.686.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	538.686.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	178.360.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	178.360.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	178.360.000	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	54.059.314.513	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	54.059.314.513	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	54.059.314.513	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.272.247.045	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.233.000	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.601.000	
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	89.632.000	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.239.503.833	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.239.503.833	
8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.420.000	
8.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.420.000	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	806.089.304	
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	34.000.000	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	772.089.304	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	83.960.000	
8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	83.960.000	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	586.230.408	
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	91.163.200	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111.014.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	384.053.208	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	421.810.500	
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	344.960.500	
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.850.000	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	709.559.200	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	709.559.200	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	709.559.200	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	42.082.716.960	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	42.082.716.960	
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	41.308.536.960	
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	774.180.000	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	380.460.412	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	380.460.412	
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	380.460.412	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	898.761.896	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	898.761.896	
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	898.761.896	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3.715.569.000	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3.715.569.000	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3.715.569.000	